WARTA PEMERIKSA

EDISI 10 ■ VOL. IV ■ OKTOBER 2021

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

SILVER WINNER
PRIA AWARD
2021

KAWAL ARAH MASA DEPAN BANGSA LEWAT *FORESIGHT*

14
Foresight BPK Dapat Dukung Pembangunan Daerah

32
Tak Pernah Berhenti Belajar

68
BPK Angkat Dua Akademisi Jadi Anggota MKKE

Oktober merupakan bulan yang istimewa bagi Indonesia. Di bulan ini, kita memperingati hari Sumpah Pemuda yang merupakan salah satu tonggak utama sejarah kemerdekaan Indonesia. Tiga ikrar yang disampaikan pemuda ketika itu dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

Dengan Sumpah Pemuda, kita dapat mengerti akan pentingnya persatuan dan peran pemuda dalam perjuangan. Begitu pun dengan arti kepemimpinan serta kemampuan untuk dapat melihat jauh ke depan melampaui kondisi-kondisi yang ada di depan mata.

Semangat ini yang menjadi tema yang redaksi siapkan pada *Warta Pemeriksa* edisi Oktober 2021. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkatkan perannya dalam mengawal keuangan negara. Terkait itu, BPK pun mencoba mengoptimalkan peran *foresight* untuk memberikan tinjauan atas pilihan alternatif yang ingin diraih pada masa depan.

Salah satu wujud konkret BPK untuk memperkuat peran tersebut adalah dengan membuat buku pendapat *foresight* BPK yang berjudul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh (Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges of a Resilient Government)" dengan menggunakan metodologi *scenario planning*.

Melalui pendapat *foresight* tersebut, BPK berupaya mengungkap risiko dalam lima tahun ke depan terkait berbagai aspek akibat pandemi Covid-19. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko tersebut.

Ini merupakan satu tonggak bersejarah bagi BPK. Karena dengan terwujudnya pendapat *foresight* ini, maka BPK menjadi lembaga pemeriksa ke-11 di dunia dan ke-2 di Asia yang menjalankan peran *foresight*.

Selain *foresight*, redaksi juga menyiapkan laporan khusus mengenai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V Prof Bahrullah Akbar yang mengakhiri masa baktinya di BPK pada Oktober 2021. Di edisi ini, Bahrullah bercerita mengenai arti pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi auditor BPK.

"BPK adalah bagian dari *going consent organization* yang dinamis dan berkelanjutan. Sehingga banyak ruang, termasuk saya, untuk mengembangkan diri. Karenanya, saya mengharapkan teman-teman untuk dinamis dan dapat membuat nilai tambah, melakukan pembelajaran, terus mengembangkan diri," kata Bahrullah berpesan.

Di rubrik Sosok, kami menampilkan dua Kepala APP yang bercerita mengenai peran dan pentingnya APP. Khususnya terkait koordinasi dan komunikasi kantor Perwakilan dengan pimpinan.

Simak juga laporan redaksi terkait rencana pembentukan komunitas *e-sport*. Memang, saat ini ekosistem *e-sports* semakin berkembang di Tanah Air. Pemerintah bahkan memasukkan olahraga digital ini sebagai cabang eksibisi di perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Karenanya, BPK pun ingin terlibat dan mendukung ekosistem *e-sports* di Tanah Air.

Masih banyak informasi penting dan menarik lain yang bisa Anda dapatkan melalui edisi Oktober ini. Tak lupa redaksi mengucapkan, selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat membaca. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah
Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab
Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi
Dian Rosdiana

Kepala Sekretariat
Trisari Istiati

Sekretariat
Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Frenny Artiningrum S
Apriyana
Sudarman

Alamat Sekretariat
Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh
Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

4 MENGAWAL ARAH MASA DEPAN BANGSA LEWAT *FORESIGHT*

7 BPK UNGKAP 4 SKENARIO INDONESIA 5 TAHUN KE DEPAN

11 BPKP TUGASKAN TIM KHUSUS PELAJARI *FORESIGHT* BPK

14 *FORESIGHT* BPK DAPAT DUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

16 MENGAWAL PEMBANGUNAN PASCAPANDEMI

18 BPK PERWAKILAN GORONTALO SIAP INTERNALISASI SEMANGAT *FORESIGHT*

20 PENGUATAN *FORESIGHT* DENGAN *BIG DATA*

22 BPK AKAN PERIKSA PROGRAM 5.000 DOKTOR KEMENAG

24 BPK SAMPAIKAN PERKEMBANGAN *PROJECT* DI WGEA SC MEETING KE-18

26 WAKIL KETUA BPK JELASKAN PENGGUNAAN *BIG DATA* DI PERTEMUAN INTOSAI WGBD

28 WAKIL KETUA JELASKAN KETERLIBATAN BPK DALAM PENYUSUNAN VNR

29 BPK DAN ANAO BERBAGI PENGALAMAN PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*

31 BPK LATIH PEMERIKSA LINTAS NEGARA TERKAIT AUDIT SDGs

32 TAK PERNAH BERHENTI BELAJAR

Cara pandang dan pola kerja auditor harus teliti, cermat dan tidak membuka ruang pertanyaan sehingga terjadi kesalahan kesimpulan.

38 'BELIAU ADALAH SURI TELADAN DI BPK'

40 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), MUHAMMAD YUSUF ATEH 'PAK BAHRULLAH MEMPERKUAT SINERGI ANTARA BPKP DAN BPK DI DAERAH'

42 PROF BAHRULLAH AKBAR YANG KAMI KENAL

46 KEPALA APP V, ARIF AGUS 'TANTANGAN MENGKOORDINASIKAN TUGAS PERWAKILAN'

49 KEPALA APP VI, RIZAL ASSIDDIQIE 'BANGUN SISTEM PENGELOLAAN DATA'

52 PENELITI CORE INDONESIA, YUSUF RENDY MANILET '*FORESIGHT* BPK DAPAT MENJAGA ARAH PEMBANGUNAN'

54 BEBERAPA KALI BERUBAH NAMA

57 MEMBANGUN *AWARENESS* MILENIAL KALTARA LEWAT 'BPKAWAN MUDA'

60 ASSESSMENT CENTER TINGKATKAN KOMPETENSI DAN KINERJA PEGAWAI

62 COACHING CORNER, WADAH INSAN BPK GALI POTENSI DIRI

64 SIAP-SIAP, KOMUNITAS BPK ESPORTS SEGERA DIBENTUK

66 SEPERJUANGAN DALAM SATU JALUR KERETA

68 BPK ANGKAT DUA AKADEMISI JADI ANGGOTA MKKE

70 PENGELOLAAN KEUANGAN PILKADA SERENTAK MASIH PERLU DIPERBAIKI

72 TANTANGAN KEPEMIMPINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0/SOCIETY 5.0 DAN PANDEMI COVID-19

76 SATU LAGI, PEMIMPIN PERUBAHAN (BELAJAR DARI KEPALA PERWAKILAN JATIM)

80 BERITA FOTO

MENGAWAL ARAH MASA DEPAN BANGSA LEWAT *FORESIGHT*

Melalui peran *foresight*, BPK menghubungkan variabel-variabel untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif masa depan dengan skenario-skenario yang ada.

■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Workshop Eksekutif Foresight BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkatkan perannya dalam mengawal keuangan negara. Saat ini, BPK sedang mengoptimalkan peran *foresight* dengan memberikan tinjauan atas pilihan alternatif masa depan.

Salah satu wujud konkret BPK untuk memperkuat peran tersebut adalah dengan membuat buku pendapat *Foresight* BPK yang berjudul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh (Indonesia *Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges of a Resilient Government*)" dengan menggunakan metodologi *scenario planning*.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, melalui pendapat *foresight* tersebut, BPK mengungkap risiko-risiko dalam lima tahun ke depan terkait berbagai aspek akibat pandemi Covid-19. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko tersebut.

"*Foresight* diharapkan dapat memberikan gambaran tentang masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, sehingga dapat mencegah terjadinya krisis," kata Ketua BPK dalam Workshop Eksekutif Foresight yang dilaksanakan di Auditorium BPK, Selasa (21/9).

Ketua BPK menjelaskan, penyusunan *Foresight* BPK merupakan upaya untuk mengaktualisasikan dua prinsip yang ada di dalam

INTOSAI 12 *Principles on the Value and Benefits of SAIs- Making a Difference to the Lives of Citizens*. Prinsip pertama, yaitu "*Demonstrating ongoing relevance to citizens, parliament, and other stakeholders*" (Menunjukkan relevansi berkelanjutan bagi warga negara, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya). Sedangkan prinsip yang kedua adalah "*Being a credible source of independent and objective insight and guidance to support beneficial change in the public sector*" (Menjadi sumber yang kredibel untuk wawasan dan panduan yang independen dan objektif untuk mendukung perubahan yang bermanfaat di sektor publik).

"Dengan memberikan wawasan dan panduan yang independen terkait skenario-skenario di masa depan, maka BPK dapat meningkatkan manfaatnya dengan membantu pemerintah melihat risiko-risiko tersembunyi untuk mencegah terjadinya krisis. Dengan terwujudnya pendapat *Foresight* BPK untuk pertama kalinya, maka BPK akan memenuhi takdir sejarahnya menjadi lembaga pemeriksa atau *Supreme Audit Institution* (SAI) ke-11 di dunia dan ke-2 di Asia yang menjalankan peran *foresight*," kata Ketua BPK.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam kesempatan terpisah menjelaskan, ada tiga peran yang harus dijalankan sebuah SAI, berdasarkan INTOSAI *Accountability Organization Maturity Model*. Ketiga peran tersebut adalah peran *oversight*, *insight*, dan *foresight*.

"Ketiga peran atau *maturity model* tersebut bukan tahapan atau level, melainkan *positioning* yang harus dilakukan secara simultan," kata Wakil Ketua BPK dalam acara Workshop Anti Korupsi di kantor pusat BPK, Selasa (14/9).

■ Workshop Eksekutif Foresight BPK.

> **Dengan memberikan wawasan dan panduan yang independen terkait skenario-skenario di masa depan, maka BPK dapat meningkatkan manfaatnya dengan membantu pemerintah melihat risiko-risiko tersembunyi untuk mencegah terjadinya krisis.**

Dari sisi *oversight*, kata Wakil Ketua BPK, BPK berusaha meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan melalui pemeriksaan. Kemudian melalui peran *insight*, BPK dengan kapasitas yang dimiliknya memberikan wasasan mendalam tentang kebijakan publik.

Adapun dalam hal *foresight*, BPK memberikan tinjauan terhadap pilihan alternatif masa depan baik untuk diambil oleh masyarakat maupun para pengambil keputusan.

"Artinya kita melakukan *insight*, *oversight*, dan melengkapi diri kita dengan peran *foresight*," kata Wakil Ketua BPK.

Wakil Ketua BPK menambahkan, BPK dalam konteks *foresight* berupaya membuka wawasan secara luas dengan menghubungkan variabel-variabel untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif masa depan dengan skenario-skenario yang ada. "Ini yang sedang dikembangkan oleh BPK," katanya.

Wakil Ketua BPK menambahkan, penguatan peran *foresight* menjadi salah satu inisiatif strategis BPK dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024, yang salah satunya diwujudkan dengan menyusun buku *Foresight* BPK.

Menurut dia, ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai BPK melalui peran *foresight*. Fungsi *foresight* dari BPK diyakini dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan strategi dalam pengelolaan keuangan negara.

■ **Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono**

Tujuan kedua, BPK dapat memberikan alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah, sehingga sinergi dan kolaborasi antara lembaga terwujud untuk membangun bangsa secara bersama-sama.

Selain itu, peran *foresight* BPK bertujuan memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi. Hal itu dilakukan dengan mengidentifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil.

Foresight juga digunakan dalam evaluasi dan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah. "Jadi, seandainya ada hal-hal tertentu yang teori atau substansinya tidak valid dalam konteks pengambilan keputusan, maka kita menyampaikan kepada pemerintah bahwa hal tersebut harus dilakukan penelaahan ulang," katanya.

Wakil Ketua BPK mengatakan, peran *foresight* juga sudah banyak dilakukan oleh SAI negara lain yang menekankan perlunya melakukan eksperimen, inovasi, dan pembangunan kapasitas *foresight*. "BPK juga bekerja sama dengan SAI lain untuk saling tukar menukar pengetahuan antara SAI di regional maupun internasional. BPK pun berperan sangat aktif di dunia internasional. Bahkan, BPK menginisiasi adanya ASEANSAI atau lembaga pemeriksa se-ASEAN," katanya. ●

Tujuan dan Manfaat *Foresight* BPK

1 Kepercayaan diri

Fungsi *foresight* dari BPK diyakini dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan strategi dalam pengelolaan keuangan negara.

2 Alternatif

BPK dapat memberikan alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah, sehingga sinergi dan kolaborasi antara lembaga terwujud untuk membangun bangsa secara bersama-sama.

3 Fasilitasi

Melalui peran *foresight*, BPK memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi. Hal itu salah satunya dilakukan dengan mengidentifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil.

4 Evaluasi

Foresight juga digunakan dalam evaluasi dan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah.

Sumber: Paparan Wakil Ketua BPK dalam kegiatan Workshop Antikorupsi pada 14 September 2021.

■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam peluncuran buku pendapat *strategic foresight* pertama yang berjudul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" dan *website strategic foresight* BPK.

BPK UNGKAP 4 SKENARIO INDONESIA 5 TAHUN KE DEPAN

Kurangnya dukungan keuangan dan layanan dasar yang ditanggung oleh skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkontribusi pada runtuhnya sistem kesehatan nasional.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario. Hal itu disusun dengan menggunakan metode *scenario planning* dan data yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK, tren dalam negeri, regional, serta global.

"Bekerja sama dengan Deloitte dan 20 ahli, praktisi, dan akademisi dalam bidang kesehatan, ekonomi, keuangan, sosiologi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi. Selain itu melibatkan pimpinan kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah selaku pemangku maupun pelaksana kebijakan," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam peluncuran buku pendapat *strategic foresight* pertama yang berjudul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" dan *website strategic foresight* BPK pada Kamis (21/10).

Bekerja sama dengan Deloitte dan 20 ahli, praktisi, dan akademisi dalam bidang kesehatan, ekonomi, keuangan, sosiologi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi. Selain itu melibatkan pimpinan kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah selaku pemangku maupun pelaksana kebijakan.

■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna

> **Skenario yang disajikan dalam *foresight* BPK bukanlah prediksi tentang masa depan. Tetapi sarana untuk melihat kembali berbagai asumsi tentang masa depan. Agar kita tidak terlena dengan harapan-harapan dan agar mampu melihat lebih jernih kesiapan menghadapi masa depan," kata Ketua BPK.**

Empat skenario yang berhasil disusun BPK yaitu, pertama, Berlayar Menaklukkan Samudra. Ini merupakan skenario terbaik, yaitu ketika respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif dan tingkat keparahan pandemi mereda. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi krisis pandemi menjadi acuan bagi negara lain. Dengan kebijakan yang efektif, Indonesia berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi dengan membaiknya harga dan permintaan komoditas primer di pasar internasional serta stabilitas moneter dan kesinambungan fiskal.

Skenario kedua, Mengarung di Tengah Badai. Skenario ini menggambarkan kondisi ketika respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif di tengah pandemi yang makin memburuk. Pemerintah berhasil melakukan reformasi secara besar-besaran terhadap sistem kesehatan di tengah pandemi yang makin memburuk. Masyarakat beradaptasi dengan kehidupan sosial baru yang ditandai dengan adanya pembatasan sosial.

Skenario ketiga, kata dia, Tercerai-berai Terhempas Lautan. Ini merupakan skenario terburuk yang menggambarkan masa depan yang penuh risiko dan bahaya. Respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif dan tingkat keparahan pandemi makin memburuk.

Kurangnya dukungan keuangan dan layanan dasar yang ditanggung oleh skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkontribusi pada runtuhnya sistem kesehatan nasional. Pemerintah mendapat tekanan untuk menyediakan program bantuan pandemi yang berujung pada meningkatnya utang dan defisit anggaran serta kerentanan sosial ekonomi.

Skenario keempat, Kandas Telantar Surutnya Pantai. Skenario ini ditandai dengan meredanya pandemi namun respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif. Sektor kesehatan masih berada di bawah tekanan untuk memberikan layanan publik yang memadai karena beban keuangan dan gelombang pasien yang terabaikan di

berbagai rumah sakit.

Rencana pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan strategi ketenagakerjaan jangka pendek belum efektif. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah daripada pada masa prapandemi.

"Skenario yang disajikan dalam *foresight* BPK bukanlah prediksi tentang masa depan. Tetapi sarana untuk melihat kembali berbagai asumsi tentang masa depan. Agar kita tidak terlena dengan harapan-harapan dan agar mampu melihat lebih jernih kesiapan menghadapi masa depan," kata Ketua BPK.

Agung pun berharap upaya yang dilakukan BPK dapat menginspirasi pemerintah pusat dan daerah untuk memulai menerapkan *strategic foresight* untuk mengantisipasi ketidakpastian pada masa mendatang. Masyarakat dan para pengambil keputusan dapat memantau indikator atau *signpost* yang berguna untuk mengidentifikasi skenario yang sedang menjadi realitas melalui *website strategic foresight* BPK.

Selain itu, dia juga menyampaikan lima tema dalam skenario yang menurut pendapat BPK perlu diantisipasi pemerintah. Lima tema itu yakni reformasi kesehatan, reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia.

"Tema-tema tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena akan turut menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 maupun kemungkinan terjadinya pandemi, bencana, dan krisis global pada kemudian hari," kata Agung.

Agung menjelaskan, dalam tugas melakukan pemeriksaannya, BPK memiliki tingkatan yang disebut Pyramid of SAI's Maturity Role (Piramida Maturitas Peran SAI). Dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK memiliki tiga peran penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Peran *oversight* dan *insight* diwujudkan dalam tugas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta pemberian pendapat kepada pemerintah. Sedangkan peran *foresight* dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan.

Penyusunan *foresight* ini membuat BPK menjadi *supreme audit institution* ke-2 di Asia setelah Korea Selatan dan yang pertama di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan *foresight*.

Agung menambahkan, pendapat *foresight* ini disusun melalui proses yang intens dan sinergi bersama para pemangku kepentingan. Sebelum diluncurkan secara resmi, buku "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" telah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo pada 15 Oktober 2021 di Istana Negara. ●

Peran BPK memiliki tingkatan yang disebut Pyramid of SAI's Maturity Role (Piramida Maturutas Peran SAI). Dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK memiliki 3 peran penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

- Peran *oversight* dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran ini telah dilakukan BPK melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- Peran *insight* dilakukan dengan mendalami kebijakan publik untuk memberikan pendapat. Misalnya saja mengenai program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik serta menyarankan praktik terbaik untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat. Peran ini telah dilakukan dengan memberikan pendapat BPK. Terakhir, pada awal tahun ini BPK memberikan pendapat kepada pemerintah tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Otonomi Khusus Papua.

- Peran *foresight* dilakukan dengan memberikan gambaran kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya atas masa depan yang diharapkan. Peran ini belum pernah dilakukan sebelumnya. ●

BPKP TUGASKAN TIM KHUSUS PELAJARI *FORESIGHT* BPK

Kepala BPKP mengatakan, BPKP sebagai auditor intern pemerintah harus menyikapi dan mempelajari hal-hal yang disampaikan dalam *foresight* BPK.

■ **Muhammad Yusuf Ateh**

Twitter @BPKPgoid

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menyelesaikan penyusunan foresight (tinjauan masa depan) untuk membangun kembali Indonesia dari pandemi Covid-19. Ateh menyatakan, BPKP akan mempelajari secara detail mengenai skenario-skenario hingga tantangan yang diungkap dalam *foresight* BPK.

BPK sebagai Supreme Audit Institution (SAI) atau lembaga pemeriksa, terus berupaya memperkuat perannya bagi bangsa. Tak hanya menjalankan peran *oversight* dan *insight*, BPK kini juga menjalankan peran *foresight*. Melalui peran *foresight*, BPK ingin membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan.

Peran *foresight* tersebut secara resmi dijalankan BPK dengan meluncurkan Buku Pendapat Strategic Foresight pertama yang berjudul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" pada Kamis (21/10). Di hari sama, BPK turut meluncurkan *website* Strategic Foresight BPK. Adapun buku *foresight* BPK telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 15 Oktober 2021.

Ateh dalam wawancara dengan *Warta Pemeriksa* pada Kamis (21/10), menyatakan telah membaca sekilas hasil *foresight* BPK. "*Foresight* BPK berisikan skenario-skenario mengenai kemungkinan yang terjadi pada Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akibat pandemi Covid-19. Ini bagi kami sangat penting dan saya pun langsung meminta tim khusus untuk mempelajari *foresight* yang telah disusun BPK tersebut. Ini akan segera kita diskusikan," kata Ateh.

> ***Foresight* BPK berisikan skenario-skenario mengenai kemungkinan yang terjadi pada Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akibat pandemi Covid-19.**

Ateh mengatakan, BPKP sebagai auditor intern pemerintah harus menyikapi dan mempelajari hal-hal yang disampaikan dalam *foresight* BPK. "Akan kami tindaklanjuti dengan memberikan pandangan kepada pemerintah, misalnya hal apa yang bisa dilakukan di suatu kementerian dengan mengacu pada *foresight* BPK ini," ujar Ateh.

Menurut Ateh, hal serupa pun dilakukan BPKP terkait hasil pemeriksaan BPK mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ateh mengatakan, BPKP baru saja selesai membuat laporan per triwulan untuk diserahkan kepada Presiden, yang di dalamnya juga berisikan mengenai pemeriksaan BPK terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. "Masukan-masukan BPKP seperti apa, itu ada di dalam laporan tersebut."

Ateh menilai, peran BPK di masa pandemi ini sangat signifikan. Dia pun melihat bahwa BPK memiliki tekad yang besar untuk terus meningkatkan tugas dan fungsinya dalam mengawal keuangan negara.

Dia pun sangat mengapresiasi BPK yang sangat arif dalam melihat segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam menangani pandemi. "BPK mampu menempatkan diri dengan baik untuk membangun persepsi yang sama dengan pemerintah, mau bekerja sama dalam memahami permasalahan-permasalahan yang memang berbeda dan luar biasa akibat Covid-19. Pengawasan terhadap program-program pemerintah di masa pandemi ini, tentu membutuhkan pendekatan dan pemahaman yang berbeda dari sebelumnya."

Sinergi semakin erat

Terkait hubungan kedua lembaga, Ateh menilai sinergi antara BPKP dan BPK semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Ateh, BPKP dan BPK terus menjalin komunikasi secara intensif karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mengawal akuntabilitas keuangan negara.

Salah satu wujud sinergi tersebut terlihat dalam beberapa kegiatan yang digelar masing-masing lembaga. Pada Kamis (14/10), BPK mengundang Ateh untuk memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Teknis Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan AKN VI yang digelar di Magelang, Jawa Tengah.

Kemudian pada Senin (18/10), giliran Ketua BPK Agung Firman Sampurna memenuhi undangan BPKP untuk menjadi narasumber pada pelatihan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) Angkatan ke-16 yang diselenggarakan BPKP.

"Dalam berbagai pertemuan itu, tampak akan ada banyak sekali kerja sama di antara BPKP dan BPK. Saya kira, sinergi ini memang kita butuhkan karena Indonesia ini sangat lulas dan program yang dijalankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat banyak," katanya.

Ateh mengatakan, sinergi antara BPKP dan BPK selama ini memang sudah terjalin, termasuk di daerah. Ia menjelaskan, BPKP sebagai auditor internal, membantu dan mendampingi pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan keuangan agar bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Seperti kita ketahui, BPK sebagai auditor eksternal tentu tidak boleh memberikan pendampingan seperti itu. Nah, BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang membantu pemerintah daerah menyelesaikan 'PR' yang diberikan BPK. Saya senang sekali karena pimpinan BPK yang sekarang benar-benar mendorong adanya sinergi antara BPKP dan BPK," katanya. ●

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CARA PENGIRIMAN TULISAN KE MAJALAH WARTA PEMERIKSA DAN WARTA PEMERIKSA DIGITAL

MAJALAH WARTA PEMERIKSA

RUBRIK KOLOM

SYARAT

- Tema tulisan tentang pemeriksaan keuangan negara, keuangan negara, moneter, kebijakan, administrasi pemerintahan, sosial, ekonomi.
- Tulisan format doc minimal 7.000 karakter maksimal 9.000 karakter.

WARTA PEMERIKSA DIGITAL

KANAL SUARA PUBLIK

SYARAT

- Tema tulisan tentang pemeriksaan keuangan negara, keuangan negara, moneter, kebijakan, administrasi pemerintahan, sosial, ekonomi.
- Tulisan format doc maksimal 5.000 karakter.

Tulisan dikirim ke email :

wartapemeriksa@bpk.go.id

Pemuatan tulisan berdasarkan pada keputusan Rapat Redaksi Warta Pemeriksa.

FORESIGHT BPK DAPAT DUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

BPK juga perlu memiliki infrastruktur yang mendukung penyusunan *foresight*.

Sesuai dengan *Supreme Audit Institution* (SAI) *Maturity Model*, Badan Pemeriksa Keuangan berupaya mewujudkan peran tertingginya yakni melaksanakan *foresight*. Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V BPK Akhsanul Khaq mengatakan, saat ini BPK sudah melaksanakan peran rutinnya dalam melakukan *oversight* melalui pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain itu, BPK juga melaksanakan peran *insight* dengan memberikan suatu rekomendasi kepada entitas agar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak melenceng dari perencanaan.

"Kemudian, saat ini kita menuju langkah yang tertinggi yaitu *foresight*," ungkap Akhsanul kepada *Warta Pemeriksa*, Rabu (29/9).

BPK menerbitkan *foresight* yang pertama dengan judul "Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government" atau "Membangun Kembali Indonesia Pasca Pandemi Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh".

Akhsanul menyampaikan, *foresight* bermakna memberikan pandangan atas sesuatu yang belum terjadi. Dalam mewujudkan peran tersebut, BPK berupaya merangkum berbagai data yang ada dan kemudian menyusun *scenario planning* terhadap fenomena yang akan muncul dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang.

Sebelumnya, BPK sudah melaksanakan pemeriksaan terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) melalui pendekatan *audit universal*. Saat ini pun pemeriksaan terkait penanganan Covid-19 masih terus berlanjut salah satunya mengenai program vaksinasi. BPK kemudian melakukan analisis dan memberikan alternatif kebijakan kepada pemerintah di masa yang akan datang dengan segala konsekuensinya.

"Ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah sehingga dalam penanganan Covid-19 bisa lebih efektif di masa yang akan datang," ujarnya.

Akhsanul menilai, langkah BPK menerbitkan *foresight* dapat terus dikembangkan termasuk mendukung perkembangan daerah. Menurut Akhsanul, BPK bisa terlibat memberikan *foresight* dalam proses perancangan suatu program atau kebijakan yang berdampak signifikan.

Saat ini, Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V BPK tengah melaksanakan pemeriksaan tematik terkait kemandirian fiskal dan perizinan di daerah. Menurut Akhsanul, hal ini adalah dua hal yang dapat menjadi tema *foresight* BPK.

Dia mencontohkan, terkait isu kemandirian fiskal, BPK bisa membuat *scenario planning* dan proyeksi dalam lima tahun ke depan. Akhsanul meyakini, entitas di daerah pun menyambut positif *foresight* BPK. Dengan adanya *foresight* pemerintah daerah dan seluruh *stakeholders* bisa menyadari sejak dini konsekuensi yang terkait kemandirian fiskal di daerah.

"Kalau defisit anggaran tetap dilakukan, misalnya, dalam jangka waktu lima tahun kemudian apa konsekuensinya? Ada alternatif kebijakan apa yang bisa diambil? Artinya, mereka sangat terbuka dengan adanya *foresight* ini," ujar Akhsanul.

> **Terkait penanganan Covid-19 maka diperlukan data penanganan kasus atau data keuangan pelaksanaan program tersebut. Hal itu kemudian diramu dan dianalisis sehingga bisa menghasilkan *scenario planning*.**

Menurut Akhsanul, dalam penyusunan *foresight* unsur penting yang perlu ada yakni penentuan subjek yang strategis. Dia meyakini, seluruh AKN di BPK memiliki tema-tema unggulan yang cocok dibuatkan *foresight*.

Selain itu, ujar Akhsanul, diperlukan visi yang cermat dalam penyusunan *foresight*. Ini karena *foresight* tidak diterbitkan untuk saat ini melainkan untuk waktu yang akan datang.

Analisis *big data* juga memberikan peran penting. Menurut Akhsanul, dalam menyusun suatu skenario diperlukan dukungan data yang lengkap. Dia mencontohkan, terkait penanganan Covid-19 maka diperlukan data penanganan kasus atau data keuangan pelaksanaan program tersebut. Hal itu kemudian diramu dan dianalisis sehingga bisa menghasilkan *scenario planning*.

Dia mengatakan, data tersebut sangat besar karena menyangkut program yang diterapkan di seluruh Indonesia dengan dana triliunan rupiah. Dengan analisis *big data*, BPK bisa menentukan topik yang bersifat strategis berdasarkan hasil olahan data tersebut.

Kemudian, BPK juga harus memperkuat kolaborasi antarlembaga. Dia mengatakan, ada sejumlah pihak yang sudah mapan dalam memiliki pengetahuan terkait *foresight* seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

■ **Akhsanul Khaq**

"Dengan kita membangun *networking* akhirnya *foresight* yang kita lakukan itu menjadi suatu yang akuntabel dan memberikan manfaat kepada *stakeholders*," ungkap Akhsanul.

Ke depannya, Akhsanul mengatakan, BPK perlu terus melakukan peningkatan kapasitas SDM untuk bisa mempunyai visi terkait perbaikan di masa yang akan datang. BPK juga perlu memiliki infrastruktur yang mendukung penyusunan *foresight*. Ini karena BPK perlu melakukan simulasi-simulasi terkait *foresight* tersebut.

Selain itu, ke depannya perlu ada mekanisme baku pelaksanaan *foresight* di BPK. Hal ini agar memberikan dasar bagi seluruh satuan kerja (satker) di BPK dalam melaksanakan *foresight* dan kemudian memberikan hasil yang berkualitas.

Akhsanul berharap, ke depannya semakin banyak *foresight* yang bisa diterbitkan BPK. "Ini benar-benar membuka suatu cakrawala baru bagi BPK agar ke depannya bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada *stakeholders*," ujar Akhsanul. ●

MENGAWAL PEMBANGUNAN PASCAPANDEMI

Unsur penting yang perlu ada dalam *foresight* BPK adalah kemampuan dalam memberikan rekomendasi yang konkret dan bisa dimanfaatkan oleh entitas.

■ **Dori Santosa**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi. Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) VI BPK Dori Santosa menyampaikan, hal ini merupakan tujuan BPK menerbitkan *foresight* pertamanya.

Dori menyampaikan, pertanyaan penting dari *foresight* BPK adalah bagaimana kondisi Indonesia lima tahun setelah Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan ini, *foresight* BPK memuat perspektif jangka panjang yang menggambarkan kondisi yang mungkin dihadapi oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.

Dori menyampaikan, *foresight* BPK juga memberikan penekanan atas lima tema penting yang perlu diatasi oleh pemerintah. Kelima tema pokok tersebut adalah reformasi pelayanan kesehatan, reformasi perpajakan dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan *data governance*, dan kualitas sumber daya manusia.

"Keberhasilan pemerintah pada lima tema penting ini sangat menentukan skenario mana yang akan menjadi realita di masa mendatang," ujar Dori kepada *Warta Pemeriksa*.

Dori menekankan, peran *foresight* BPK berlaku di berbagai level pemerintahan, baik itu untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga, menurut Dori, perwakilan BPK di daerah pun dapat ikut menerapkan peran *foresight* dan ikut memfasilitasi pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan dalam situasi keti-

> **Dukungan sumber daya eksternal juga dibutuhkan seperti dukungan tenaga ahli dan komitmen pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data.**

dakpastian yang tinggi. Hal ini agar pemda mampu berada pada skenario terbaik pascapandemi Covid-19. Perwakilan BPK juga mengawal lima tema penting pembangunan yang menjadi fokus BPK dalam *foresight* tersebut.

Dori menilai, unsur penting yang perlu ada dalam *foresight* BPK adalah kemampuan dalam memberikan rekomendasi yang konkret dan bisa dimanfaatkan oleh entitas. BPK juga harus memperkuat SDM internalnya. Selain itu, BPK harus mampu memiliki basis data yang kuat sebagai referensi dalam memberikan rekomendasi.

"Kalau datanya lengkap dan valid maka akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan masukan," ungkap Dori.

Dori mengatakan, entitas pemerintah daerah juga menyambut baik dan mengapresiasi peran BPK perwakilan lewat pendampingan di masa pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, peran *oversight*, *insight*, dan *foresight* merupakan hal yang sangat penting karena BPK dan pemda bisa memiliki kesepahaman mengenai peluang, tantangan, dan risiko.

"Selain itu, juga mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan dalam situasi sangat tidak menentu yang sedang kita hadapi," ujarnya.

Dori menjelaskan, efektivitas *foresight* BPK ditentukan oleh kualitas penyusunan *scenario planning* dan *predictive modelling*. Dia menekankan, keberhasilan dalam menyusun hal itu ditentukan oleh kemampuan sumber daya internal BPK dan dukungan dari sumber daya eksternal.

Dukungan sumber daya internal antara lain adalah dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan agar BPK mencapai kemampuan *augmented intelligence*. Sehingga, BPK mampu memanfaatkan secara optimal kemampuan *machine learning* and *artificial intelligence* termasuk dengan membangun *big data* dan kemampuan *big data analytics*.

"Dukungan sumber daya eksternal juga dibutuhkan seperti dukungan tenaga ahli dan komitmen pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data," ujarnya.

Dori berharap, *foresight* BPK dapat menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi pemeriksaan saat ini dan merumuskan kebijakan pemeriksaan yang lebih baik di masa mendatang. Sehingga, pihaknya dapat memberikan kontribusi optimal pada kegiatan pemeriksaan baik dalam bentuk hasil pemeriksaan maupun rumusan bahan pendapat.

Menurut Dori, peningkatan peran BPK menuju peran *foresight* merupakan tantangan besar yang harus dijawab dengan akselerasi penguatan sumber daya yang ada di internal BPK. Selain itu, kesuksesan *foresight* juga membutuhkan kolaborasi dan sinergitas seluruh AKN.

"*Foresight* BPK dengan sendirinya berfungsi menjadi pengikat bagi seluruh AKN yang memeriksa sektor-sektor pembangunan tersebut," ujarnya.

Oleh karena sektor-sektor tersebut umumnya diperiksa oleh AKN yang berbeda, maka seperti halnya pemerintah, keefektifan BPK dalam menjalankan fungsi *foresight* juga akan sangat ditentukan sejauhmana eksistensi kolaborasi yang kuat antar AKN, yang perlu diawali dari kesamaan cara pandang mengenai *foresight* BPK atas skenario yang pernah, sedang dan akan terjadi baik itu di masing-masing sektor pembangunan/lintas sektor pembangunan, maupun di level *nation-wide* sebagai agregasi dari skenario pada masing-masing sektor. ●

BPK PERWAKILAN GORONTALO SIAP INTERNALISASI SEMANGAT *FORESIGHT*

Hal terpenting dalam *foresight* adalah kemampuan menangkap fenomena yang terasa saat ini dan menjabarkan skenario yang akan terjadi di masa mendatang.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana menilai, kehadiran *foresight* dapat membuat nilai BPK di mata masyarakat semakin bertambah. Dwi menyampaikan, kehadiran BPK di masa yang akan mendatang sangat bergantung terhadap produk-produk yang bisa dihasilkan untuk masyarakat dan *stakeholder*.

"Dengan adanya peran *foresight*, bukan hanya menjadi penanda kedewasaan BPK sebagai lembaga pemeriksa tapi juga bagaimana BPK memberikan suatu *future value* kepada masyarakat," ungkap Dwi kepada *Warta Pemeriksa*, Jumat (8/10).

Dwi menyampaikan, ketika melaksanakan peran *oversight* maka BPK akan menilai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, hal itu meningkat dalam peran *insight* BPK berupa rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan.

"Kemudian, *foresight* itu akan membicarakan masa depan. Dia akan memberikan pilihan-pilihan bagi masyarakat di masa yang akan datang," ujarnya.

Dwi menyampaikan, peran *oversight* sebagai upaya pemberantasan korupsi dan *insight* tetap penting. Akan tetapi, adanya strategi *foresight* bisa membuka ruang bagi BPK untuk memberikan suatu skenario penyelesaian masalah bagi masyarakat sebelum masalah itu terjadi.

"Artinya, BPK proaktif dalam menyelesaikan masalah bangsa," ujarnya.

Untuk mendukung hal itu, menurut Dwi, perlu ada internalisasi dari proses pemikiran *foresight* dalam setiap pemeriksaan di setiap perwakilan BPK. Dwi pun berupaya melakukan internalisasi semangat *foresight* tersebut dalam pemeriksaan reguler di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Menurut Dwi, hal terpenting dalam *foresight* adalah kemampuan menangkap fenomena yang terasa saat ini dan menjabarkan skenarionya di masa mendatang.

Dwi mengatakan, apabila saat ini BPK masih menggandeng sejumlah lembaga lain dalam penyusunan *foresight*, BPK harus mampu ke depannya untuk bisa mandiri. Sehingga, perlu ada penguatan internal di BPK agar insan BPK memahami fungsi *foresight*.

Menurut Dwi, pelaksanaan *foresight* BPK bisa ditarik hingga ke level daerah. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo saat ini tengah merencanakan pemeriksaan pada semester I 2022. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mampu membuka kesempatan masyarakat di suatu wilayah merasakan perbaikan kesejahteraan.

Dwi mengatakan, saat ini masih terdapat sekelompok masyarakat yang tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya karena terbentur ketersediaan sarana dan prasarana atau infrastruktur.

"Karena keterbatasan itu biaya hidup mereka menjadi mahal dan produksi hasil bumi yang mereka punya juga kurang berdaya saing," ujar Dwi.

■ **Dwi Sabardiana**

> **Dengan adanya peran *foresight*, bukan hanya menjadi penanda kedewasaan BPK sebagai lembaga pemeriksa tapi juga bagaimana BPK memberikan suatu *future value* kepada masyarakat.**

Menurut Dwi, dengan adanya perbaikan infrastruktur dan pembukaan akses ke wilayah tersebut, masyarakat setempat dapat mengembangkan desa wisata. Selain itu, hasil bumi dari kawasan tersebut juga bisa dijual dengan harga yang bersaing di pasar.

"Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan reguler tapi kita coba tingkatkan menuju *foresight*. Kami harapkan ini bisa menjadi model *foresight* untuk skala mikro," ujarnya.

Dwi menyampaikan, hal ini merupakan wujud upaya BPK dalam menangkap kebutuhan masyarakat. Pihaknya pun berupaya merancang pemeriksaan untuk mendukung hal itu dengan strategi pemeriksaan yang cukup berbeda dari biasanya.

"Ini karena persoalannya tidak hanya melibatkan pemerintah daerah tapi juga instansi vertikal di pusat," ujar Dwi.

BPK berupaya menjembatani dan memberikan solusi dari macetnya birokrasi karena ada kendala unsur pusat dan daerah yang tidak bisa saling menembus. BPK pun mencoba ikut serta memberikan solusi agar masyarakat dapat menikmati perbaikan taraf hidup.

Hal seperti ini, ujar Dwi, juga menjadi cara untuk menanamkan pengertian *foresight* kepada seluruh insan BPK terutama di Gorontalo. Dwi menekankan, *foresight* adalah upaya BPK untuk memberikan alternatif kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat.

"Kita bisa tanamkan dalam pekerjaan reguler. Teman-teman pemeriksa juga perlu mencermati bahwa ujungnya adalah pemeriksaan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ujarnya. ●

PENGUATAN *FORESIGHT* DENGAN *BIG DATA*

Untuk menuju level *foresight*, menurut Jariyatna, memang dibutuhkan kompetensi yang memadai.

■ **Jariyatna**

Penerbitan *foresight* yang pertama dinilai dapat menjadi cerminan dari berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Foresight* yang akan diberi judul "Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government" atau "Membangun Kembali Indonesia Pasca Pandemi COVID-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh" sangat penting baik untuk internal maupun eksternal BPK.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) Jariyatna mengatakan, penerbitan *foresight* semakin menunjukkan arah perkembangan BPK ke depan. "Ini perlu agar kita bisa merapatkan barisan dalam mewujudkan peran *foresight*," ujar Jariyatna kepada *Warta Pemeriksa*, Jumat (8/10).

Sementara itu, secara eksternal, adanya *foresight* akan menunjukkan lebih banyak peran BPK dalam pembangunan. *Foresight* BPK akan memberikan sejumlah skenario yang dapat dicermati untuk masa yang akan datang.

Pemanfaatan teknologi sangat berperan untuk mendukung kesuksesan *foresight*. Jariyatna mengatakan, analisis *big data* sangat kuat dalam memberikan pemahaman kepada pemeriksa terkait kondisi yang terjadi di lapangan.

"*Big data* memang bukan obat mujarab semua penyakit, tapi dengan *big data* itu dia bisa memberikan *red flag* kepada pemeriksa atau indikasi permasalahan yang signifikan," ungkap Jariyatna.

Dia mengatakan, peran terbesar pemanfaatan *big data* berada di tangan pemeriksa. Menurutnya, Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Litbang dapat mendukung pemerolehan dan pengolahan data untuk mendukung tercapainya tujuan audit.

"Pemeriksa bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang akan dihadapi, data apa yang tersedia, bagaimana bentuk datanya? terstruktur atau tidak terstruktur? siapa yang punya data? Nantinya, orang TI dapat membantu dalam mendapatkan dan mengolah data itu," ungkap Jariyatna.

Dengan menggunakan *big data*, *foresight*

> ***Big data*** **memang bukan obat mujarab semua penyakit, tapi dengan** ***big data*** **itu dia bisa memberikan** ***red flag*** **kepada pemeriksa atau indikasi permasalahan yang signifikan.**

yang disampaikan BPK juga akan didukung dengan argumentasi yang kuat karena berlandaskan data dengan jumlah banyak (komprehensif).

"Karena memang perlu data yang besar sehingga kita bisa melakukan analisis tren kedepan dan bisa mempertimbangkan berbagai *factor* atau keterkaitan antar kejadian dengan data yang besar," ujarnya.

Jariyatna mengakui, *foresight* adalah hal baru di BPK. Meski begitu, BPK memang sedang menuju titik tertinggi dalam piramida maturitas (kedewasaan) *Supreme Audit Institution* (SAI) tersebut. Saat ini, ujar Jariyatna, perwakilan BPK di daerah pun tengah berupaya menanamkan semangat *foresight* dalam setiap pemeriksaan.

"Saat ini yang kita lakukan adalah berupaya agar pemeriksaan yang telah dilakukan dapat berpengaruh terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas," ujar Jariyatna.

Dia mengatakan, salah satu yang dilakukan saat ini yakni mengejar penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Ketika baru mulai memimpin BPK Perwakilan DI Yogyakarta pada tahun lalu, tingkat tindak lanjut pemeriksaan di DIY berkisar di level 80-an persen. Saat ini, ujar Jariyatna, rata-rata tindak lanjut sudah mencapai level 90-an persen.

"Jadi kita memang sedang mengejar dan memperkuat lapisan bawah sebelum menuju *foresight*," ungkap Jariyatna.

Jariyatna mengaku terus memonitor tingkat tindak lanjut setiap bulan dan berharap ada kemajuan. Dia juga turut memimpin pertemuan secara virtual dengan entitas yang turut dihadiri inspektur daerah atau sekretaris daerah. Dengan hal itu, menurut dia, progres penyelesaian tindak lanjut bisa lebih cepat. Entitas pun memahami hal yang dimaksud BPK dalam rekomendasinya.

BPK Perwakilan DIY juga berupaya memberikan peran *insight*. Jariyatna mencontohkan, pada semester I 2021, pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan kinerja terkait pengembangan pariwisata. Dalam pemeriksaan itu, terdapat isu signifikan terkait pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan turunannya.

Dia menjelaskan, terdapat 18 ruang strategis cagar budaya yang ada DIY. Semua tata ruang tanah pada ruang strategis itu menjadi kewenangan kesultanan dan kadipaten. Kedua institusi itu pun harus membuat rencana tata ruang dan hal itu harus difasilitasi pemerintah daerah.

"Itu sampai sekarang belum berjalan sehingga risikonya adalah tumpang tindih pembangunan," ujar Jariyatna.

BPK Perwakilan DIY pun mencoba memberikan *insight* dan kemudian mengajak seluruh pihak terkait untuk berdiskusi bersama. Menurut Jariyatna, perlu ada rencana induk pembangunan yang disepakati dan itu akan menjadi pedoman pemda dalam mengeksekusi program atau kegiatan.

"Jadi bisa dihindarkan adanya tumpang tindih rencana dan realisasi di wilayah ruang strategis itu,"

Untuk menuju level *foresight*, menurut Jariyatna memang dibutuhkan kompetensi yang memadai. Diperlukan pula pemahaman masalah yang mumpuni dan bekal data yang banyak.

Dia menekankan, BPK Perwakilan DIY terus berupaya menyerap semangat *foresight* dan memberikan manfaat lebih kepada entitas. Dia mengatakan, salah satu tema *foresight* yang cukup menarik adalah pemanfaatan dana keistimewaan di DIY. Jariyatna menilai, dana tersebut sangat signfikan dengan anggaran setiap tahun mencapai Rp 1,3 triliun.

"Kita mencoba ke arah sana agar Pemda DIY punya rencana yang komprehensif terkait penggunaan dana tersebut," ujar Jariyatna. ●

BPK AKAN PERIKSA PROGRAM 5.000 DOKTOR KEMENAG

Akhsanul berharap, pemeriksaan ini bisa memberikan suatu kontribusi dalam pengelolaan SDM di Kemenag.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melaksanakan pemeriksaan kinerja atas program 5.000 doktor di Kementerian Agama. Pemeriksaan tersebut ditargetkan dapat rampung pada akhir semester II 2021.

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V BPK Akhsanul Khaq mengatakan, pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap sejumlah isu strategis yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satunya yakni terkait peningkatan sumber daya manusia di Indonesia.

"Tentu saja ini sangat strategis dan salah satunya diadakan di Kementerian Agama. Kementerian Agama mencanangkan program 5.000 doktor di tahun 2015 dan diharapkan selesai pada 2024," ungkap Akhsanul kepada *Warta Pemeriksa*.

Akhsanul menilai, program tersebut berkaitan erat dengan upaya penguatan kualitas SDM yang ada di Kemenag khususnya di perguruan tinggi. AKN V akan mencermati program tersebut mulai dari sisi perencanaan. Dia mengatakan, pemeriksaan akan menyoroti kesiapan Kemenag dalam menyusun peta jalan program tersebut. Hal ini penting karena peta jalan dapat menjadi kompas atau panduan dari program tersebut hingga 2024.

Kemudian, ujar Akhsanul, pemeriksaan akan berkaitan dengan pendanaan seperti memeriksa sumber dana penyelenggaraan program tersebut. Selain itu, BPK juga akan mencermati proses rekrutmen atau seleksinya.

Selain itu, menurut Akhsanul, hal yang penting untuk dicermati adalah kebutuhan dari pengguna akhir program tersebut yaitu Kemenag. Dia mengatakan, pengguna akhir dari program itu tentunya adalah perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Kemenag.

"Apakah program ini sudah mengakomodasi kebutuhan dari *end user* tersebut? Ini akan kita lihat," ungkapnya.

Kelanjutan karier para alumni program juga bisa menjadi sorotan. Dia mencontohkan, apakah ada penempatan alumni program tersebut di tempat-tempat yang memang membutuhkan tenaga dosen.

■ **Akhsanul Khaq**

"Misalnya, di Sorong itu mungkin kekurangan tenaga dosen. Apakah dengan adanya program ini bisa mengalokasikan tenaga dosen ke sana?" ujar Akhsanul.

Akhsanul berharap, pemeriksaan ini bisa memberikan suatu kontribusi dalam pengelolaan SDM di Kemenag. Dia menilai, program 5.000 doktor ini merupakan kegiatan yang besar dan strategis.

"Maka ini harus dikelola dengan baik sehingga benar-benar bisa meningkatkan kualitas dan memberikan kontribusi yang besar," ujar Akhsanul.

Dikutip dari situs Kemenag, program 5.000 Doktor merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sebagai bentuk keseriusan, program ini secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Desember 2014 di Istana Negara, Jakarta.

Program Beasiswa Studi (BS) yang selanjutnya disebut program Beasiswa 5.000 Doktor adalah program pemberian beasiswa studi S-3 di Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PT-DN) kepada para dosen, PNS dan pustawakan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negara (PTKIN), PNS tenaga kependidikan PTKIN, serta pegawai negeri sipil yang bekerja pada program Pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag. Program itu berupaya meningkatkan mutu, kapabilitas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. ●

PENDAPAT BPK

Definisi

✓ Pendapat BPK adalah penilaian, kesimpulan, dan rekomendasi BPK mengenai kebijakan dan/atau peraturan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✓ Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, "BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain karena sifat pekerjaannya.

✓ Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kriteria Pemberian Pendapat BPK

a. Terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
b. Makro, yaitu menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berdampak luas.
c. Strategis, yaitu mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau menyangkut hajat hidup dan masyarakat banyak.
d. Masif, yaitu permasalahan yang sering terjadi.
e. Isu aktual, yaitu permasalahan yang sedang menjadi isu.
f. Mendesak, yaitu penting untuk diselesaikan dengan segera.
g. Relevan, valid, lengkap, serta dapat diolah lebih lanjut.

Sumber Pendapat BPK

a. Internal, yaitu pendapat yang bersumber dari inisiatif BPK.
b. Eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan pihak di luar BPK.

✓ Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan menjadi dua jenis:
   a. Pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) oleh Direktorat EPP yang memenuhi kriteria pemberian pendapat.
   b. Pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat (UBP).

■ Isma Yatun

BPK SAMPAIKAN PERKEMBANGAN *PROJECT* DI WGEA SC MEETING KE-18

Anggota IV BPK Isma Yatun memaparkan kemajuan terkait penyusunan *guidance for sustainable transport*.

Badan pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai anggota *steering committee* (SC), menghadiri INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) Steering ke-18 yang diselenggarakan secara virtual pada 20-24 September 2021. Pertemuan dihadiri oleh lebih kurang 50 anggota SC WGEA.

Tujuan kegiatan ini yaitu melaporkan program WGEA, melakukan *update* perkembangan kegiatan dari organisasi regional, dan melaporkan status kegiatan sekretariat yang terdiri dari survei, *audit collection*, serta *greenlines newsletter*.

Dalam pertemuan ini, BPK memaparkan perkembangan dari masing-masing proyek yang ditangani. Misalnya saja Working Package 4 dimana BPK merupakan *project leader* bersama dengan lembaga pemeriksa atau *supreme audit institution* (SAI) Cina dan SAI Thailand. Perkembangan yang disampaikan yaitu penyusunan *guidance for sustainable transport*.

Kemudian terkait proyek Working Package 6, yaitu penyelenggaraan *training on auditing SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB atau Sustainable Development Goals)

Pada Rabu (22/9), BPK yang diwakili oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota IV Isma Yatun memaparkan kemajuan terkait penyusunan *guidance for sustainable transport*. Konsep kedua dari program ini telah dikirimkan ke Sekretariat WGEA untuk dimintakan masukan lebih lanjut dari anggota SC.

Pada paparannya, Anggota IV BPK menjelaskan beberapa poin penting terkait tujuan, *key milestones*, serta *outline* dari dokumen dimaksud. Pada kesempatan itu pula, Anggo-

> **BPK memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan terkait *sustainable transport*. Selain itu, juga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk belajar mengenai *plastic waste*, terutama terkait keterhubungannya dengan pencapaian SDGs dan *sustainable transport*.**

ta IV BPK mengundang negara anggota SC WGEA untuk dapat berpartisipasi dalam *side event* pada UN Conference on Sustainable Transport yang diselenggarakan oleh BPK pada Oktober 2021.

Sesi dilanjutkan dengan presentasi lebih mendetil mengenai konten dari masing-masing bab pada pedoman pemeriksaan tersebut. Penjelasan bab 1 dilakukan oleh Narunat Inkonglad dari SAI Thailand.

Kemudian bab 2 dilakukan oleh BPK diwakili oleh Erwansyah Nasrul Fuad (Kasubaud IV B1). Sementara bab 3 dan 4 dilakukan oleh Zhang Hongwei dari SAI Cina. BPK menjelaskan bab 2 seputar respons pemerintah dalam rangka mewujudkan *sustainable transport*.

Pada paparannya, BPK menjelaskan tentang perjanjian internasional dan kebijakan/program terkait *sustainable transport*. Perjanjian tersebut menjelaskan tentang pertama, *avoid-shift-improve approach*. Kedua, *transport strategic plan and funding*.

Ketiga, *public transport development*. Keempat, *transportation demand management*. Kelima, *clean fuels and green vehicles*. Keenam, *smart cities*, dan ketujuh *transit-oriented development*. BPK juga memaparkan pemain kunci dan peran mereka dalam mengelola *sustainable transport*.

Sementara pada Kamis (23/9), BPK diwakili oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Ida Sundari, yang memaparkan pelaksanaan Working Package 6, yaitu *training audit* SDGs. *Training* tersebut telah terlaksana pada 2-13 Agustus 2021.

Pada akhir paparan, diperkenalkan juga Balai Diklat Bali sebagai balai diklat internasional yang siap untuk memfasilitasi penyelenggaraan diklat internasional, termasuk diklat WGEA ke depannya. Selain menyampaikan paparan kedua *project* di atas, BPK juga dipercaya untuk menjadi moderator dalam *workshop* terkait *future strategy*.

■ **Ida Sundari**

■ **Erwansyah Nasrul Fuad**

Dengan terlibat aktif dalam pertemuan WGEA hari ketiga itu, BPK memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan terkait *sustainable transport*. Selain itu, juga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk belajar mengenai *plastic waste*, terutama terkait keterhubungannya dengan pencapaian SDGs dan *sustainable transport*. ●

WAKIL KETUA BPK JELASKAN PENGGUNAAN *BIG DATA* DI PERTEMUAN INTOSAI WGBD

Sebanyak 10 SAIs memberikan paparannya tentang *quality control in the context of big data auditing* sesuai dengan topik pertemuan.

■ **Agus Joko Pramono**

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menyampaikan *introductory speech* dalam Pertemuan ke-5 International Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Big Data Audit (INTOSAI WGBD). Presentasi ini terkait peran BPK sebagai Ketua Research Project on Auditing Technology Innovation.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada Rabu, 29 September 2021 secara virtual ini wakil ketua BPK berperan sebagai ketua delegasi dari BPK. Dia mengatakan bahwa hasil dari *research project* menunjukkan penggunaan *big data* pada sebagian besar *supreme audit institutions* (SAI) masih terbatas pada *introductory phase of implementing big data analytics*. Akan tetapi, beberapa SAI telah menggunakan *big data* untuk menjadikan audit lebih efisien dan efektif.

Paparan BPK dilanjutkan oleh Kepala Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Biro TI, Pingky Dezar Zulkarnain. Pada akhir presentasi, disampaikan rekomendasi dari *research project* ini, yaitu mendesain *big data governance framework* yang diperlukan untuk membantu SAI memanfaatkan big data.

Peran sebagai ketua *research project on auditing technology innovation* ini menunjukkan kepercayaan INTOSAI WGBD kepada BPK dalam bidang *big data*. Melalui sesi berbagi pengalaman, BPK juga memperoleh ilmu pengetahuan dan praktik terbaik yang dilakukan oleh SAIs untuk memanfaatkan *big data* dalam pemeriksaan mereka.

> **Hasil dari *research project* menunjukkan penggunaan big data pada sebagian besar *supreme audit institutions* (SAI) masih terbatas pada *introductory phase of implementing big data analytics*.**

■ **Pingky Dezar Zulkarnain**

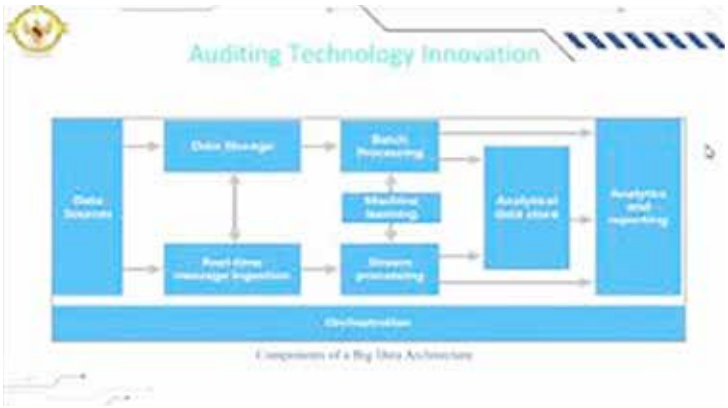

Berbagai pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat semakin menambah kemampuan BPK. Sekaligus membekali BPK untuk menjadi pelopor pengguna *big data* dalam pemeriksaan di komunitas nasional dan internasional.

Perwakilan BPK dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Biro Teknologi Informasi Pranoto dan Kepala Bagian Opersional TI Novis Pramantyabudi. Kemudian Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti serta Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti.

Pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 95 peserta tersebut dibuka oleh SAI Cina sebagai ketua dan SAI Amerika Serikat (AS) sebagai wakil ketua INTOSAI WGBD.

Pada sesi berbagi pengalaman, sebanyak 10 SAIs memberikan paparannya tentang *quality control in the context of big data auditing* sesuai dengan topik pertemuan kali ini. SAI Estonia memberikan paparan tentang *data quality-lesson learnt from Covid-19 monitoring project*. Paparan ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi SAIs lainnya dalam hal pemanfaatan *big data* untuk pemeriksaan Covid-19.

Sementara itu perwakilan dari African Organization of English-speaking Supreme Audit Institutions (AFROSAI-E) memberikan paparan yang berjudul "AFROSAI-E's Development for Making SAIs more Data-Driven". Paparan ini memberikan gambaran perkembangan penggunaan *big data* dalam audit oleh SAIs di wilayah Afrika. ●

WAKIL KETUA JELASKAN KETERLIBATAN BPK DALAM PENYUSUNAN VNR

Pada 2018 dan 2019, BPK melakukan pemeriksaan kesiapan dan implementasi SDGs yang hasil pemeriksaannya digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyusun VNR tahun 2019.

■ **Agus Joko Pramono**

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono kembali diundang untuk menjadi panelis dalam 5th South-East Asia Multi-Stakeholder Forum on the Implementation of Sustainable Development. Forum digelar virtual oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 28-30 September dan 3 November 2021.

Kali ini, topik yang diangkat yaitu "Building Back Better from Covid-19 while Advancing the Full Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development". Wakil Ketua berpartisipasi dalam *session 4 part 1*: Interview with 2021 VNR Countries: How Different Stakeholders Approached VNR.

Pada kesempatan itu, dia menjelaskan tentang keterlibatan BPK dalam penyusunan *voluntary national review* (VNR). Pada 2018 dan 2019, BPK melakukan pemeriksaan kesiapan dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang hasil pemeriksaan tersebut digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyusun VNR tahun 2019.

Selanjutnya, BPK melakukan reviu atas dokumen VNR tahun 2021. Tujuannya untuk menilai apakah pemerintah telah menyusun VNR tahun 2021 yang selaras dengan VNR tahun 2017 dan 2019. Hal itu dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK terkait SDGs dan melakukan *due process* sesuai dengan Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition.

"Sementara itu, tantangan yang dihadapi BPK dalam melakukan reviu adalah melakukan validasi data dalam waktu yang singkat. Maka untuk ke depannya, BPK akan kembali melakukan reviu atas dokumen VNR Indonesia yang disusun oleh pemerintah," jelas Wakil Ketua BPK.

Selain Wakil Ketua BPK, *session 4 part 1* juga menghadirkan panelis yang merupakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan. Misalnya saja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Indonesia, Kementerian Luar Negeri Lao PDR, Parlemen Malaysia, dan *private sector* dari Thailand.

Di kesempatan ini, Wakil Ketua BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara Bernardus Dwita Pradana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti. ●

BPK DAN ANAO BERBAGI PENGALAMAN PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*

Perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi informasi yang masif telah mengubah cara berkerja dan berinteraksi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali menyelenggarakan *information technology knowledge sharing* sesi III secara virtual, Selasa (5/10). Kali ini, tema yang diangkat yaitu "The Role of The SAI in Auditing the Implementation of E-Government". Ini merupakan kelanjutan program sebelumnya yang dilakukan pada Mei dan Juni 2021 sebagai implementasi kerja sama bilateral kedua institusi pada 2021.

Tujuan penyelenggaraan diskusi adalah saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman. Ini terkait pendekatan dan hasil pemeriksaan BPK dan ANAO dalam perannya memberikan jaminan kepada parlemen atas ketahanan dunia maya (*cyber resilience*) pemerintah. Fokus diskusi terpusat pada pemeriksaan atas implementasi sistem yang mendukung transformasi digital pemerintahan dan implementasi atas inisiatif *e-government* dua negara. Termasuk tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan serta *lessons learned* yang dapat diambil sebagai referensi pemeriksaan mendatang.

Kegiatan *knowledge sharing* dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian

Gage. Sementara itu sambutan pembukaan disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti dan Executive Director of System Assurance and Data Analysis Branch (SADA) ANAO, Lesa Craswell.

Dalam sambutannya, Selvia Vivi menyampaikan bahwa Indonesia telah memulai pengembangan *e-government* pada 2003 melalui Instruksi Presiden No 3 tahun 2003. Setelah

hampir 20 tahun berjalan, implementasi *e-government* di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk menjadi suatu sistem yang andal dan dapat diimplementasikan pemerintah pusat dan daerah.

Mengingat pentingnya isu tersebut, kata dia, pada 2018 BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sementara Lesa Craswell menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi informasi yang masif telah mengubah cara bekerja dan berinteraksi. Ketergantungan pada sistem TI semakin tinggi. Tuntutan publik untuk mendapatkan layanan yang baik, cepat, aman dan transparan pun meningkat. Oleh karenanya transformasi digital adalah langkah penting dan strategis menjawab kebutuhan tersebut. Tidak hanya di sektor swasta, namun juga sektor publik.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas layanan publik, satu hal yang dilakukan adalah implementasi *e-government*. ANAO dan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan memiliki peran yang sama untuk terus menangani perubahan dalam entitas sektor publik tersebut. Lesa menambahkan bahwa ANAO telah melakukan serangkaian pemeriksaan dengan fokus pada transformasi digital, manajemen strategi, dan operasional *cybersecurity* yang dimulai pada 2015.

Paparan pertama dari BPK disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kinerja atas Kebijakan *e-Government* tahun 2018, Cipto Nugroho. Sedangkan paparan kedua dari ANAO disampaikan oleh Acting Executive Director, Systems Assurance and Data Analysis Branch (SADA) Xiaoyan Lu dan Senior Director, Systems Assurance and Data Analysis Branch, ANAO Edwin Apoderado.

Dalam paparannya Cipto menyampaikan hasil pemeriksaan pada 2018 meliputi *overview e-government* yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat di Indonesia. Kemudian proses pemeriksaaan BPK atas *e-government* dan temuan signifikan beserta rekomendasi yang diberikan oleh tim terkait temuan tersebut.

Disampaikan, pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan *e-government*. Dengan ruang lingkup meliputi rencana strategis perencanaan, kebijakan koordinasi, kebijakan sumber daya, dan pencapaian target dalam perencanaan dengan dua entitas yang diperiksa, yaitu Kemenpan RB dan Kominfo.

Sementara, Xiaoyan dan Edwin dari ANAO menyampaikan beberapa topik. Pertama, *e-government* dan transformasi yang dilakukan oleh The Australian Public Service. Dijelaskan pula beberapa tonggak perubahan transformasi pada layanan publik di Australia yang dimulai pada 2010. Kemudian, pembentukan Digital Transformation Agency pada 2015 serta dilanjutkan penyusunan Digital Transformasi Agenda pada 2016 dan Establishment of Cyber Security Unit pada 2017.

Kedua, pemeriksaan *e-government* yang dilakukan oleh ANAO beserta hasil-hasil temuan pemeriksaan yang diperoleh. Saat ini, terdapat 84 *high cost IT project* yang diberada di bawah Pemerintah Australia yang menjadi fokus dalam pemeriksaan ANAO karena memiliki nilai yang sangat besar, vital, dan sangat strategis. Terdapat setidaknya 7 contoh pemeriksaan *e-government* yang pernah dilakukan ANAO.

Pemeriksaan itu meliputi *cybersecurity audits, records management in health, myGov Digital Services, costs and benefits of the reinventing the Australian Tax Office (ATO) program, administration of medicare electronic claiming arrangements, shared services*, dan *IT outages at the ATO*. Ketiga, studi kasus dalam pelaksanaan pemeriksaan program eCensus. Keempat adalah penjelasan mengenai pemeriksaan *e-government* lainnya yang pernah dilakukan oleh ANAO dan *lessons learned* yang diperoleh.

Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan kembali *IT knowledge sharing* sesi IV dengan tema pengembangan *enterprise resource planning* (ERP) dalam rangka transformasi digital yang rencananya diselenggarakan pada akhir 2021. ●

BPK LATIH PEMERIKSA LINTAS NEGARA TERKAIT AUDIT SDGs

Pelatihan internasional terkait pemeriksaan SDGs bukan yang pertama dan terakhir. BPK rencananya akan kembali menggelar pelatihan serupa pada semester I 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu *supreme audit institution* (SAI) yang telah melakukan pemeriksaan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. BPK pun dipercaya INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) untuk membagikan pengalaman pemeriksaan SDGs kepada SAI lain.

Amanah itu dijalankan BPK dengan menggelar *International Training on SDGs: Climate Action* pada 2-13 Agustus secara virtual. Pelatihan internasional diikuti SAI Filipina, Thailand, Myanmar, India, Uganda, Zambia, Fiji, dan Maladewa.

Kegiatan pelatihan diselenggarakan ke dalam dua bagian. Bagian pertama pelatihan digelar pada 2-5 Agustus 2021, yang mana seluruh peserta secara mandiri mempelajari materi yang telah diunggah pada BPK Learning Management System Platform. Adapun bagian kedua berupa *online class training* yang dilaksanakan pada 6-13 Agustus 2021.

Plt Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) periode sampai dengan 8 Oktober 2021, Ida Sundari mengatakan, pelatihan tersebut merupakan komitmen BPK sebagai anggota INTOSAI WGEA yang tergabung dalam Work Package 6. "Dalam Work Package 6 ini, BPK ditugaskan menyelenggarakan pertukaran pengetahuan mengenai pemeriksaan SDGs. BPK mendapatkan kepercayaan itu karena sudah melaksanakan pemeriksaan terkait SDGs, sehingga kita bisa membagikan pengalaman tersebut kepada SAI lainnya," kata Ida kepada *Warta Pemeriksa*, akhir September.

Ida menjelaskan, topik *climate action* dipilih sebagai tema pelatihan karena salah satu pemeriksaan yang telah dilakukan BPK berkaitan dengan iklim. Pengalaman pemeriksaan yang dilakukan BPK terkait iklim itulah yang dibagikan terhadap para peserta pelatihan.

■ **Ida Sundari**

Ada banyak materi yang terdapat dalam pelatihan SDGs tersebut. Ida menjelaskan, BPK memperkenalkan secara komprehensif mengenai SDGs kepada para peserta. Selain itu, ada juga materi terkait IDI's SDG Audit Model (ISAM) yang merupakan metode pemeriksaan atau prinsip-prinsip dalam melakukan pemeriksaan SDGs.

Dalam menggelar pelatihan tersebut, BPK juga bekerja sama dengan SAI Amerika Serikat. SAI Amerika Serikat membagikan pengalamannya terkait pemeriksaan *climate finance*.

Pelatihan pemeriksaan SDGs yang digelar BPK sangat bermanfaat bagi para peserta. Menurut pengamatan Ida, para perwakilan SAI yang mengikuti pelatihan memang belum memahami pemeriksaan SDGs. "Jadi pengalaman BPK itu sangat bermanfaat bagi SAI yang ikut serta," katanya.

Ida mengatakan, pelatihan internasional tersebut bukan yang pertama dan terakhir. BPK rencananya akan kembali menggelar pelatihan serupa pada semester I 2022. Menurutnya, rencana tersebut juga sudah disampaikan BPK dalam *steering committe* WGEA pada 20-24 September.

"Rencana BPK ini mendapat sambutan yang sangat baik. Mereka mengutarakan tertarik sekali dan berharap pelatihan bisa digelar secara fisik," ujar Ida. ●

TAK PERNAH BERHENTI BELAJAR

Cara pandang dan pola kerja auditor harus teliti, cermat dan tidak membuka ruang pertanyaan sehingga terjadi kesalahan kesimpulan.

Pimpinan Auditorat Keuangan Negara/Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar memasuki ruang tamu di kantornya, tempat *Warta Pemeriksa* menunggu, dengan salam dan senyum hangat di wajahnya. Wajah yang selalu dia tampilkan ketika bertemu dan berbincang dengan redaksi dalam setiap kesempatan. Tak lupa dia menyempatkan untuk menanyakan kabar dan menyampaikan senda gurau.

Seperti biasa, percakapan dengan Bahrullah pada awal Oktober 2021 itu juga berlangsung dengan hangat. Pada kesempatan tersebut, dia bercerita mengenai 35 tahun pengalamannya berkiprah di BPK hingga akhir masa bakti pada Oktober 2021. Bercerita mengenai BPK, banyak hal yang didapatkannya, baik suka dan duka selama mengabdi di BPK.

Akan tetapi, bagi dia, satu analogi yang dapat menggambarkan BPK dengan jelas adalah BPK merupakan organisasi pembelajaran. Karenanya, menjadi kewajiban para pemeriksa untuk meningkatkan kapabilitas melalui program pendidikan berkelanjutan.

"Jadi yang saya dapati dari BPK adalah pengayaan diri untuk terus mengembangkan diri. Pengembangan diri adalah bagian dari profesi pemeriksa dan *going concern organization* atas keberadan BPK yang selalu dinamis dan berkelanjutan. Sehingga banyak ruang di BPK untuk selalu mengembangkan diri, mengikuti proses perkembangan *auditee* dan mengikuti irama perubahan ilmu pemerintahan dan keuangan negara," kata Bahrullah kepada *Warta Pemeriksa* di Jakarta, awal Oktober lalu.

"Ujung dari proses perkembangan *auditee* adalah implmentasi anggaran dan proses akuntabilitas melalui sistem akuntansi. Karenanya, saya mengharapkan teman-teman untuk dinamis dan dapat membuat nilai tambah, melakukan pembelajaran, terus mengembangkan diri untuk selalu mempelajari imu akuntansi dan auditing saja melainkan keilmuan lainnya," ujar dia menambahkan.

Bagi Bahrullah, pendidikan memang merupakan hal yang penting. Ini dilatarbelakangi oleh kesulitannya dulu untuk bisa bersekolah lanjutan setelah lulus D3 APP dan memasuki dunia kerja di BPK. Karenanya, dia pun berprinsip untuk selalu memudahkan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pegawai BPK agar dapat bersekolah.

"Anekdot itu yang selalu saya jalankan ketika bekerja di BPK. Masuk jadi murid yang baik, keluar jadi guru yang baik. Seorang auditor ketika melakukan pemeriksaan, dia akan melakukan pembelajaran sejak perencanaan audit. Kemudian mengeksplorasi dan akhirnya memberikan rekomendasi. *Nah*, itu perlu pengetahuan dan pengembangan diri untuk dapat memberikan yang terbaik dalam setiap rekomendasi," papar pria yang gemar berolah raga ini.

Jika ada kesempatan, Bahrullah selalu berupaya untuk membantu rekan kerjanya meningkatkan kompetensi pendidikan. Karena itu, sepanjang kariernya, Bahrullah banyak menyekolahkan pegawai BPK bekerja sama dengan universitas swasta dan negeri. "Saya senang dan bahagia apabila dapat mendorong teman yang SMA ambil D3 atau S1, yang S1 ambil S2, dan yang S2 ambil S3. Sehingga diharapkan dapat menjadi auditor atau pemeriksa yang andal dan mumpuni," papar pria kelahiran Jakarta, 23 Maret 1959 ini.

> **"BPK adalah pengayaan diri untuk terus mengembangkan diri. Pengembangan diri adalah bagian dari profesi pemeriksa dan *going concern organization* atas keberadan BPK yang selalu dinamis dan berkelanjutan.**

> **Karena kerja kita itu membandingkan regulasi dan kondisi. Sama dengan kita memotret, melihat setiap momen yang pas dan melihat setiap hal yang tidak pas dalam bingkai untuk perbaikan.**

Bahrullah pun menekankan agar pegawai BPK tidak pernah berhenti belajar. Apalagi mereka yang berprofesi sebagai auditor yang memang harus dapat berpikir untuk melakukan pendidikan yang berkelanjutan, baik itu formal maupun nonformal, dan sesuai dengan tuntutan profesi.

Bahrullah menjelaskan, secara individu, seorang auditor setidaknya harus memiliki tiga hal. Pertama, auditor harus dapat memahami waktu (*time frame*). Kedua, memahami proses bisnis entitas, dan ketiga melakukan pendidikan berkelanjutan.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan cara pandang dan pola kerja auditor yang harus teliti, cermat, dan tidak membuat ruang untuk adanya kesalahan. "Untuk itu pendidikan bisa membuka wawasan kita dalam setiap kontekstual permasalahan audit yang dihadapi. Ini yang selalu berulang saya sampaikan kepada para pemeriksa," papar Bahrullah yang sejak muda bersama karyawan BPK lainnya berlatih karate, bermain sepak bola, dan selalu bersepeda dalam setiap kunjungan kerja.

Secara prinsip, dijelaskan, pekerjaan auditor adalah membandingkan kriteria dengan kondisi. Kriteria itu merupakan peraturan yang bersumber dari undang-undang atau regulasi. Sementara undang-undang bersumber dari kajian akademis. Karenanya, pekerjaan auditor untuk memahami regulasi sebagai bahan penilaian membandingkan antara kriteria dan kondisi senyatanya.

"Jadi diharapkan ilmu pengetahuan yang didapat melalui pendidikan formal maupun pelatihan menjadi latar belakang perubahan cara pikir dan cara pandang sebagai auditor untuk bekerja secara profesional, mandiri, dan berintegritas. Karena kerja kita itu membandingkan regulasi dan kondisi. Sama dengan kita memotret, melihat setiap momen yang pas dan melihat setiap hal yang tidak pas dalam bingkai untuk perbaikan," ungkap Bahrullah.

Dalam proses itu, kata dia, seorang auditor harus bersikap skeptis pada awal permulaan bekerja sampai pada tahap pelaporan. Baru kemudian memiliki sudut pandang positif dalam mengambil kesimpulan untuk rekomendasi. Ini mengingat, pemeriksa harus bisa menyajikan hasil yang dapat memberikan manfaat untuk entitas di setiap pelaksanaan tugas. Karenanya, jika ada kekurangan dan kesalahan, harus disampaikan kepada entitas agar dapat diperbaiki. Hal ini yang disebutnya sebagai action plan.

"Ini sejalan dengan istilah sekarang, 'Akuntabilitas untuk semua'. Jadi tidak lagi membicarakan mana yang salah dan benar. BPK dalam setiap pemeriksaannya sudah memasuki tahapan *insight* dan *foresight*, yaitu memberikan arah kepada perbaikan dan kebijakan. Namun bukan berarti oversight, yang terkait ekonomis, efesiensi, dan efektifitas menuju berkeadilan anggaran ditinggalkan. Tetapi merupakan *complemetary* atau saling melengkapi, termasuk juga peran BPK terkait dengan pemberantasan korupsi," demikian ungkap Bahrullah. ●

Kiprah Sebagai Wakil Ketua

Karena memiliki DNA pendidikan yang kuat membuat Bahrullah Akbar sangat menikmati masa saat menjadi wakil ketua BPK. Karena selama masa jabatan 2,5 tahun, yaitu pada 2017-2019, dia dapat berkonsentrasi penuh untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pegawai BPK.

"Jadi kalau ditanya soal wakil ketua itu saya *happy*. Karena saya bisa fokus meningkatkan SDM. Jadi saya dapat bekerja di dalam kepemimpinan kolektif kolegial untuk pengembangan teman-teman di BPK," ungkap dia.

Sebagai wakil ketua, Bahrullah banyak membantu mengupayakan berbagai hal. Misalnya saja terkait implementas kebijakan *risk management*, jabatan fungsional pemeriksa, dan kebijakan *talent pool*. Dia pun berupaya membangun 'Satu BPK' di bidang implementasi jaringan dan TI atas restu dan dorongan kepemimpinan kolektif dan kolegial BPK.

Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, maka BPK membina jabatan fungsional pemeriksa (JFP). Sampai dengan 2018, pengelolaan JFP diatur berdasarkan Permenpan Nomor 17 Tahun 2010. Lalu pada 2018, BPK mengajukan beberapa hal terkait perubahan pengelolaan JFP, sehingga terbit peraturan baru yaitu Permenpan Nomor 49 Tahun 2018.

Melalui masa transisi dua tahun, penerapan jabatan fungsional berlaku penuh pada Oktober 2020. Ini berbarengan dengan pemberlakuan sertifikasi profesi pemeriksa, sehingga lahir IPKN (Institut Pemeriksa Keuangan Negara) dan sertifikasi CSFA (Certified State Financial Auditior) sesuai dengan UU ASN.

Selain itu, terdapat perluasan penerapan JFP pada unit kerja Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Itama, dan Biro TI. Perluasan penerapan JFP dimaksudkan untuk memperluas karier pejabat fungsio-

> **Jadi kalau ditanya soal wakil ketua itu saya *happy*. Karena saya bisa fokus meningkatkan SDM. Jadi saya dapat bekerja di dalam kepemimpinan kolektif kolegial untuk pengembangan teman-teman di BPK.**

nal pemeriksa (PFP).

Bahrullah juga mencanangkan rencana 100 doktor dan penambahan 2.500 master di BPK sampai dengan 2025. "Ini adalah hasil kerja kolektif kolegial dan saya hanya membumikan keputusan Badan," ungkap Bahrullah.

Pembenahan SDM juga dilakukan melalui program pengembangan *leadership* dan *communication skill*. Ini merupakan program *reengineering* kepemimpinan BPK di level menengah. Progarm ini dilakukan dengan mengadakan pendidikan *short course training* di luar negeri. Salah satu tujuannya adalah agar dapat memberikan cara berkomunikasi yang baik dan mencari solusi di tingkat kepemimpinan jabatan pratama dan madya. Caranya, dengan melibatkan staf dan eselon di bawahnya untuk berinteraksi langsung dalam setiap *shortcourse* di luar negeri.

Pada masa jabatannya sebagai wakil ketua, ada lima *batch* yang dikirim untuk *shortcourse leadership and communication skill* di Maastrich School of Management-Belanda, Macquarie University-Australia, dan di CIPD-United Kingdom. Program yang setiap angkatan berjumlah 20 orang ini diharapkan dapat membangun kebersamaan antara staf dan pimpinan.

"Diharapkan program ini tetap berjalan dan dilanjutkan setelah pandemi usai. Karena dengan program ini, mereka yang ikut pendidikan dapat menjadi *peer* untuk rekan-rekannya. Sehingga pada akhirnya, dengan komunikasi yang lebih baik di antara peserta *shortcourse*, dapat mengubah budaya kerja BPK yang lebih baik."

Dalam hal peningkatan kinerja organisasi, BPK telah menerapkan penilaian mandiri (*self assesment*) menggunakan Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) atau Kerangka Pengukuran Kinerja Lembaga Pemeriksa. Ini untuk menyiapkan auditor BPK agar bisa menjadi auditor atau *reviewer* yang dapat memeriksa BPK negara lain. SAI PMF digunakan sebagai mekanisme yang komprehensif untuk menilai kinerja BPK.

Pelaksanaan ini dimulai ketika Bahrullah mengunjungi kantor pusat Intosai Development Initiative (IDI) di Oslo pada Juni 2018. Pengalaman ini kemudian digunakan untuk membangun SDM BPK yang berkualitas untuk dapat melakukan *self assessment* terhadap BPK. BPK juga menyusun MoU yang ditandatangani pada acara INCOSAI XXIII di Moskow pada 26 September 2019.

Kerja sama tersebut antara lain yang telah dilaksanakan pelatihan SAI PMF di Jakarta pada 30 Oktober yang diikuti oleh SAI Laos, SAI Vietnam, SAI Kamboja dan SAI Thailand. Dari Indonesia, kegiatan itu diikuti 22 orang peserta yang diharapkan dapat menjadi *peer reviewer* bagi lembaga BPK lainnya.

Bahrullah juga mendorong kemajuan BPK dari sisi literasi. Ini dilakukan dengan meresmikan Perpustakaan Riset BPK yang berada di kantor pusat BPK pada Juni 2018. Perpustakaan Riset BPK dibangun untuk mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Perpustakaan ini yang menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku, serta *e-books*, dan *e-journal*.

Perpustakaan BPK juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK. Ini bisa digunakan sebagai bahan untuk riset bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi (akuntansi dan auditing) dan Fakultas Hukum serta peminat riset tentang keuangan negara. ●

Melengkapi IHPD dengan LFAR

Berdasarkan amanat undang-undang, BPK ada di setiap provinsi. Karenanya, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Sejak menjadi Pimpinan Auditorat Keuangan Negara/Anggota V, yang membawahi pemeriksaan pemerintahan daerah di wilayah Barat, Bahrullah menyiapkan IHPD (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah) yang disampaikan kepada gubernur sejak pemeriksaan LKPD 2019. Isi IHPD adalah terkait pemeriksaan BPK terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

IHPD hanya diberikan kepada gubernur. Dengan begitu, gubernur juga dapat mengetahui temuan-temuan BPK di kabupaten dan kota. Ini sejalan dengan dengan undang-undang yang menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Dngan IHPD, gubernur dapat memahami persoalan yang ada dan menjadi bahan kolaborasi untuk membangun provinsi.

"Karena menurut undang-undang, gubernur adalah pembina dan pengawas pemerintahan di bawahnya. Selain itu, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, juga dapat menggunakan IHPD itu untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan. Sesuai UU 23 tentang Pemda tahun 2014," kata Bahrullah.

Satu pekerjaan yang tak lepas dari peran Bahrullah Akbar yaitu terkait dengan *long form audit report* (LFAR). Ini merupakan bentuk baru integratif audit yang selama ini telah dilakukan BPK melalui pelaksanaan audit laporan keuangan. Bahrullah pun melakukan *piloting* audit kinerja untuk daerah yang disebut dengan LFAR. Pemeriksaan kinerja tertentu atas kegiatan pemda paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan tahun berjalan.

Ada lima daerah yang diaudit dalam semester pertama 2019. Latar belakang dibuatnya laporan ini yaitu saat ini, 90 persen laporan keuangan pemerintah daerah mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selanjutnya, untuk menambah nilai tambah hasil pemeriksaan dengan fungsi *insight* dan *foresight* BPK. Selain itu, hasil *peer review* pemeriksaan BPK Polandia juga menyatakan bahwa BPK perlu meningkatkan jumlah pelaksaan audit kinerja.

Untuk itu, kata dia, BPK harus mengukur keberhasilan pencapaian daerah itu melalui kegiatan pada OPD tertentu yang mempunyai dampak pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat. Caranya yaitu dengan melakukan audit kinerja tertentu. "Jadi tidak hanya soal kewajaran penyajian anggaran saja, tapi ada *value* penggunaan anggaran. Walaupun tentunya diperlukan pengembangan selanjutnya terhadap audit kinerja tertentu yang terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah," ungkap Bahrullah.

Sekarang ini, kata Bahrullah, dengan adanya LFAR, buku laporan BPK mengalami perubahan. Sebelumnya, laporan BPK itu terdiri dari opini, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan. Sekarang strukturnya berubah, menjadi kepatuhan dan pengendalian internal menjadi satu dan ditambah pemeriksaan kinerja tertentu, semua hadil menjadi bahan IHPD. ●

Perjalanan Sejak 1985 Hingga 2021

Bahrullah Akbar bergabung dengan BPK pada 1985 dengan latar belakang sarjana muda. Ketika itu dia masuk pendidikan untuk menjadi penilik selama sembilan bulan. Dia bercerita, bagaimana ketika itu belajar dan kerja keras agar bisa lulus penilik (jabatan awal bagi sarjana muda). Pada waktu itu, ada empat jenjang Jabatan di BPK, verifikatur, penilik, pemeriksa muda dan pemeriksa.

Penempatan awal Bahrullah di Auditorat E2 yang membawahi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi. Itu adalah awal kariernya sebagai pemeriksa. Setelah itu, pada 1990, dia mendapatkan beasiswa untuk studi ke Inggris di University of Hull dengan golongan pangkat masih II/c. Sekembali dari luar negeri pada 1992, dia ditempatkan di Auditorat J yang membawahi pemeriksaan BUMN. Sampai dengan 1996 hingga kemudian mengajukan diri menjadi widyaiswara.

Jadi, dalam kurun waktu 1985-1996, Bahrullah menjadi auditor dan kemudian pada 1996 sampai 2003 menjadi widyaiswara. Ketika menjadi widyaiswara itu, sambil mengajar di beberapa kampus, dia mendapatkan kepangkatan akademis. Ini dimulai sejak 1993 di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai asisten hingga kemudian beralih tugas menjadi guru besar IPDN pada 2015.

Selama kurun widyaiswara, Bahrullah bersama widyaiswara senior BPK mengadakan FGD seri seminar akuntansi dan auditing. Kemudian bekerja sama dengan Uni-

IAEA Mengubah Paradigma

Bahrullah Akbar menjelaskan, pemikiran membuat LFAR juga bersumber dari pengalaman ketika BPK menjadi pemeriksa eksternal untuk Lembaga Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA). Penunjukkan BPK sebagai pemeriksa eksternal IAEA berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KBRI/PTRI di Wina pada 29 Januari 2015. Ketika itu diinformasikan bahwa ada kesempatan untuk menjadi pemeriksa eksternal IAEA tahun 2016-2017.

Atas dasar informasi tersebut, BPK pun memutuskan untuk mengajukan sebagai calon auditor eksternal IAEA. Ketika itu, Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari didampingi oleh Sekjen BPK Hendar Ristriawan, dan Kepala Direktorat Litbang B Dwita Pradana menyampaikan proposal auditor eksternal IAEA pada 3 Februari 2015. Penyampaian proposal tersebut bersamaan dengan acara Simposium bersama kedua Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Dunia (INTOSAI)-Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Wina, Austria.

Selanjutnya, delegasi BPK yang dipimpin oleh Bahrullah Akbar yang didampingi oleh Kaditama Revbang, Bahtiar Arif, Kasubdit Perencanaan Stategis, Felicia Yudhaningtyas, dan Kasubbag Kerja Sama Multilateral, Ade Indra Gumilar melanjutkan proposal wakil ketua BPK pada General Conference ke-59 IAEA di Wina. Agenda itu khususnya untuk menyukseskan pencalonan pemeriksa eksternal IAEA.

Akhirnya pada 17 September 2015, Presiden General Conference ke 59 IAEA, Filipo Formica, Duta Besar/Wakil Tetap Italia di PBB, menetapkan secara konsensus BPK sebagai auditor eksternal periode 2016-2017. Atas penetapan tersebut, Ketua Delegasi Bahrullah menyampaikan ungkapan terima kasih atas kepercayaan Sidang Umum IAEA kepada Indonesia.

Dengan pencapaian itu, maka BPK memulai babak baru sebagai auditor eksternal badan internasioal PBB. Hal ini pun terus berlanjut dengan keikutsertaan BPK sebagai auditor eksternal IMO dan secara individu auditor BPK menjadi auditor eksternal di IACA. Saat ini pun, wakil ketua BPK selanjutnya, Agus Joko Pramono menjabat sebagai Vice Chair Komite Penasihat Audit Independen PBB.

Terkait IAEA, tepat pada 8 Mei 2017, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pertamanya atas laporan keuangan dan kinerja IAEA tahun 2016 di Wina, Austria. Laporan yang disampaikan Bahrullah itu memuat 23 rekomendasi yang disampaikan BPK terkait dengan masalah keuangan dan kinerja. Di hadapan 168 negara anggota IAEA, BPK memperoleh apresiasi atas hasil penilaiannya.

Pemeriksaan BPK menjadi masukan perbaikan tata kelola keuangan dan kinerja IAEA. Tak heran kemudian hampir enam tahun BPK dipercaya memeriksa IAEA. Bahrullah menilai, penetapan BPK sebagai pemeriksa eksternal IAEA menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan paradigma auditor BPK untuk menaik ke level ke jenjang internasional. Ini pun terbukti yaitu bahwa auditor BPK dihargai dari segi kapabilitas dan profesional kerja. ●

versitas Padjadjaran Bandung, UPI YAI, dan STIE Muchtar Thalib untuk membantu para pegawai untuk menyelesaikan pendidikan izin belajar dari D3 sampai S3.

Beberapa buku sudah diterbitkan dari tangan beliau. Jurnal dan *paper* pun telah dipublikasikan. Misalnya saja jurnal BPK, "The Audit Policy". Tiada henti untuk merenung, belajar, dan mengajar menjadi motto yang sering berulang disampaikannya atau yang sering dikutipnya pada setiap kesempatan. Ini sejalan dengan kata bijak KH Dewantara, "Jadikan setiap orang sebagai guru dan jadikan setiap tempat sebagai sekolah".

Pada 2003 Bahrullah dibutuhkan di Kementerian Dalam Negeri dan kemudian menjadi staf ahli di Kabupaten Lingga, Kepri pada 2007 hingga 2011. Dia kemudian menjalani pengukuhan profesor di IPDN pada 2015. Dia juga mengikuti pencalonan Anggota BPK sebanyak tiga kali. Pertama pada 2004, kemudian 2009, dan 2011. Pada 2011, terpilih menjadi Anggota BPK dan kembali terpilih untuk periode kedua pada 2016-2021.

Pada masa depan, Bahrullah pun berpikir untuk tetap dapat berkontribusi dalam mengkoleksi data yang ada di BPK sehingga dapat menjadi "bacaan". Dengan begitu, masyarakat luas bisa memahami BPK dengan lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan posisinya sebagai ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN).

Untuk para pegawai BPK, Bahrullah berpesan agar ke depannya dapat dipikirkan peran mandatori BPK yang terkait dengan Kantor Perwakilan. "Jadi ini yang saya *drive* di LFAR dan IHPD. Bagaimana agar pola akuntabilitas BPK di pemerintahan daerah dapat menjadi lebih jelas dan berkualitas, dan *never say goodbye* untuk belajar dan mengajar," kata Bahrullah. ●

‘BELIAU ADALAH SURI TELADAN DI BPK’

Sosok Bahrullah Akbar memiliki kesan tersendiri bagi Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Menurut Wakil Ketua BPK, Bahrullah atau yang kerap disapa dengan sebutan Prof BA, merupakan suri teladan bagi insan BPK, termasuk dirinya.

Kontribusi Bahrullah bagi BPK pun dinilai sangat besar. Bahrullah selama masa baktinya, khususnya saat menjabat sebagai wakil ketua BPK, sukses membangun sumber daya manusia (SDM) BPK melalui berbagai programnya. Kepada *Warta Pemeriksa*, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono membagikan kesan-kesannya terhadap sosok Bahrullah yang memasuki masa purnabakti pada Oktober 2021. Berikut petikan wawancara dengannya.

■ Agus Joko Pramono

Bagaimana bapak melihat sosok Prof Bahrullah Akbar?

Saya adalah orang yang mempunyai kedekatan emosional dengan prof BA. Prof BA adalah guru saya. Guru saya dalam memahami BPK. Prof BA adalah salah seorang Anggota BPK yang tahu betul BPK, karena beliau berasal dari BPK.

Beliau tahu bagaimana memitigasi risiko internal di BPK. Beliau adalah orang yang memahami betul *culture* BPK itu seperti apa. Beliau adalah orang yang memahami betul cara berhadapan dengan personal-personal di BPK. Dan, beliau orang yang memahami betul model akuntabilitas di BPK.

Jadi, beliau bagi saya adalah guru. Beliau juga menjadi semacam standar bagi saya dalam memahami proses bisnis di BPK, dengan segala plus-minusnya yang ada di BPK.

Kenangan atau momen apa yang menurut bapak paling membekas dengan Prof BA?

Saya masih ingat betul, ketika saya baru menjadi Anggota BPK, saya masih sangat muda dengan jiwa yang masih meledak-ledak. Dan beliaulah orang yang 'mengerem' saya. Kemudian, beliau juga yang memperbaiki pola perilaku dan komunikasi saya di awal-awal menjadi Anggota BPK.

Saat itu, saat saya masuk ke BPK, saya merupakan Anggota BPK termuda. Dan saya ketika itu dengan jiwa muda yang masih meledak-ledak, melihat segala sesuatunya hanya 'hitam dan putih' saja. Yang saya lihat hanya benar atau salah, tidak ada kata lain selain itu ketika menghadapi orang.

Beliaulah yang menjadi tempat saya bertanya agar tidak kebablasan, agar tidak meruntuhkan organisasi, agar tidak terlalu konfrontatif dengan banyak orang. Bagi saya, Prof BA merupakan orang yang paling sabar.

> **Perannya dalam peningkatan SDM BPK sangat besar. Beliau terus mendorong dan menyemangati orang-orang di BPK untuk melanjutkan kuliah, mendorong orang untuk mengambil S2 dan S3. Bahkan, model pendanaan untuk menyukseskan program pendidikan itu juga beliau pikirkan.**

Hal apa yang bapak pelajari dari kepribadian Prof Bahrullah?

Satu hal yang saya masih belajar dari Prof BA, beliau adalah orang yang berhati bersih. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan dalam waktu panjang. Tidak ada. Jadi, semua permasalahan dihadapi secara kekeluargaan. Semua permasalahan dihadapi dengan tenang. Hal itu yang sampai hari ini saya masih belajar dari beliau.

Itu bukan hal yang mudah. Karena ini menyangkut karakter seseorang. Walaupun saya bukan orang dengan karakter seperti Prof BA, tapi karakter yang ditunjukkan Prof BA kepada saya, membuat saya menjadi lebih belajar lagi.

Prof BA juga merupakan orang yang sangat mengetahui jika ada keburukan sistem di BPK. Beliau tahu keburukan sistem itu ada di titik mana. Dan, beliau memperbaiki itu dengan tidak destruktif, melainkan selalu melakukan perbaikan dengan kacamata konstruktif.

Prof Bahrullah menurut saya juga orang yang sangat legawa dan saya sampai sekarang masih tetap menjadi muridnya.

Prof Bahrullah menginisiasi berbagai program saat menjabat sebagai wakil ketua BPK. Program-program Prof Bahrullah apa saja yang akan bapak teruskan?

Dahulu, sangat susah mencari orang dengan gelar doktor di BPK. Tapi sekarang, dengan beliau dulu mendorong program pendidikan bagi insan BPK, sekarang BPK dikenal sebagai lembaga yang bertaburan doktor dan bertaburan gelar profesi. Ini tidak terlepas dari jasa Prof Bahrullah. Dan saya tetap teruskan program Prof Bahrullah tersebut sampai saat ini.

Sekarang itu, orang kalau menyebut nama Anggota BPK, itu bisa setengah meter panjangnya karena ada banyak gelar di belakang nama. Tidak bisa dipungkiri, ini karena beliaulah yang menggembleng hal tersebut.

Perannya dalam peningkatan SDM BPK sangat besar. Beliau terus mendorong dan menyemangati orang-orang di BPK untuk melanjutkan kuliah, mendorong orang untuk mengambil S2 dan S3. Bahkan, model pendanaan untuk menyukseskan program pendidikan itu juga beliau pikirkan.

Program itu sampai sekarang saya teruskan. Saya tentu berharap program ini terus dipertahankan menjadi tradisi BPK, tradisi keilmuan. Prof BA juga orang yang sangat mendorong jurnal di BPK. Sampai hari ini, program itu saya teruskan. ●

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), MUHAMMAD YUSUF ATEH

'PAK BAHRULLAH MEMPERKUAT SINERGI ANTARA BPKP DAN BPK DI DAERAH'

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menilai sinergi antara BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin kuat dan erat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut pria yang akrab disapa Ateh, hal tersebut tidak terlepas dari peran Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar. Ateh mengatakan, Bahrullah selalu mendorong adanya sinergi antara BPKP dan BPK, termasuk dalam kegiatan pemeriksaan keuangan daerah.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Ateh pun menceritakan sejumlah pengalaman dan kesan-kesannya dengan Bahrullah Akbar yang mengakhiri masa baktinya di BPK pada Oktober ini. Berikut petikan wawancara dengan Kepala BPKP.

Sejauh mana bapak mengenai sosok Bahrullah Akbar?

Saya sudah sejak lama kenal dengan pak Bahrullah. Kami mulai dekat ketika sama-sama melakukan kunjungan kerja Maastricht, Belanda. Saat itu, pak Bahrullah menjabat sebagai Wakil Ketua BPK dan saya masih menjabat sebagai deputi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Saya melihat, beliau merupakan sosok yang sangat ramah dan *low profile*. Ketika itu, saat kami *mengobrol*, itu kami langsung klik. Dan sejak saat itu, kami terus melakukan komunikasi yang intensif sampai saat ini.

Seperti apa bentuk komunikasi tersebut? Dan sinergi apa saja yang telah bapak bangun dengan Prof Bahrullah?

Yang kami rasakan, kerja sama dengan beliau sangat baik sekali. Terutama, dalam membangun kerja sama antara BPKP Perwakilan dengan BPK Perwakilan. Tentu, sudah ada begitu banyak hal yang kami bahas bersama.

Sekarang, meskipun beliau akan melepaskan jabatannya sebagai Anggota V BPK, kami pun akan terus bekerja sama dengan beliau di Institut Pemeriksaan Keuangan Negara (IPKN). Sebab, pengurus IPKN di daerah itu banyak yang berasal dari Kantor Perwakilan BPKP. Jadi kami akan terus berhubungan dengan Prof Bahrullah.

> **Saya ucapkan terima kasih sekali atas jasa beliau memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BPK-BPKP di perwakilan. Dan, mudahan-mudahan upaya beliau tidak sia sia dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pengelolaan keuangan daerah.**

Twitter @BPKPgoid

■ **Muhammad Yusuf Ateh**

Pesan apa yang ingin bapak sampaikan kepada Prof Bahrullah yang pada Oktober ini memasuki masa pensiun?

Saya ucapkan selamat kepada Prof BA karena sudah menyelesaikan tugas di BPK. Kami terakhir bertemu di Magelang, jalan-jalan ke museum. Intinya, saya ucapkan selamat dan saya bangga bisa mengenal sosok Prof Bahrullah. Tentu, kami berharap bisa terus bertemu dan sama-sama bisa berbuat sesuatu untuk negeri ini.

Menurut bapak, sejauh mana peningkatan sinergi antara BPKP dan BPK, termasuk soal pemeriksaan di daerah?

Memang dalam dua tahun terakhir ini terutama, sinergi antara BPKP dan BPK sangat luar biasa. Bahkan, kami di beberapa tempat diminta oleh Pimpinan BPK untuk membantu melakukan pemeriksaan di daerah.

Dan, yang saya lihat, pak Bahrullah itu sangat sering berkeliling ke daerah. Beliau selalu mendorong sinergi dan kolaborasi antara BPK dan BPKP. Dan itu sangat membantu sekali, karena kalau Pimpinan BPK yang mendorong, itu realisasinya *kan* menjadi lebih cepat.

Pak Bahrullah saat berkelililng ke daerah-daerah, beliau juga sangat sering berkabar kepada saya, memberitahukan bahwa beliau sedang berada di suatu daerah. Jadi, memang komunikasi yang terjalin baik sekali dengan pak Bahrullah.

Saya ucapkan terima kasih sekali atas jasa beliau memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BPK-BPKP di perwakilan. Dan, mudahan-mudahan upaya beliau tidak sia sia dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pengelolaan keuangan daerah. ●

Prof Bahrullah Akbar yang Kami Kenal

OLEH: **HERY SUBOWO**

Prof BA begitu kami biasa memanggilnya. Pria kelahiran tahun 1959 ini adalah asli putra Betawi yang sukses dengan segudang prestasinya. Memulai pekerjaannya sebagai guru SMA kemudian ia merintis karir sebagai PNS di BPK. Mengawali tugasnya sebagai auditor pemeriksa, lalu berpindah jalur menjadi tenaga pengajar fungsional widyasiwara. Sempat diperbantukan di luar BPK menjadi staf Dirjen Keuangan Daerah hingga menjabat sebagai Staf Ahli Kabupaten Lingga. Garis tangan pulalah yang membawanya kembali ke pangkuan BPK tercinta. Berbagai amanah strategis pernah didudukinya, dari posisi sebagai Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, VI dan V, hingga amanah tertinggi sebagai Wakil Ketua.

Riwayat pendidikannya pun luar biasa. Diawali dengan menamatkan Akademi Pimpinan Perusahaan Kementerian Perindustrian untuk Program Diploma III. Tak puas dengan predikat sarjana muda, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana, di bidang Ilmu Administrasi dari Universitas 17 Agustus 1945. Dengan bekal beasiswa dari negara, ia pun menempuh S2 pada Universitas Of Hull England untuk memperoleh MBA-nya. Melengkapi kompetensi akuntansinya, ia mengambil pendidikan S1 akuntansi pada STIE Prof. Dr. Muchtar Tholib Jakarta. Ia kembali kuliah di Universitas Padjadjaran untuk mengikuti program pasca sarjana, dan beroleh doktor Ilmu Pemerintahan sebagai gelar tertinggi akademiknya.

Orientasi pada kompetensi mendorongnya untuk memperoleh beragam sertifikasi di bidang yang berbeda. Certified International of Project Management (CIPM) dari American Academy of Project Management adalah awalnya. Kemudian ia merintis Certified State Finance Auditor (CSFA) yang diterbitkan BPK. Lalu ia mendapatkan Certified Public Accountant (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Berikutnya Certified Forensic Auditor (CFrA) dari LSP Audit Forensik memperkuat kompetensi investigasinya. Selanjutnya ia memperoleh Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia. BPKP pun memberikan Certification of Goverment Chief Audit Executive (CGCAE) atas kontribusinya dalam meningkatkan kapasitas auditor internal sektor publik di Indonesia.

Figur pejabat publik ini dikenal dengan beragam penghargaan yang telah diterimanya. Sebut saja mulai penghargaan dari BPK Jepang, British Red Cross hingga Palang Merah Indonesia. Demikian pula Pin dan Brevet Kehormatan dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan institusi lainnya tak sedikit yang ia terima.

Antara lain Pin Kehormatan Sesko dan Brevet Terjun Payung dan Menembak Paskhas TNI Angkatan Udara. Kemudian Brevet Terbang Layang dari Federasi Aerosport Indonesia. Juga Brevet Penyelam dari TNI AL dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Hingga Brevet Penyidik dan Brevet Terjun Payung Brimob POLRI pun pernah disematkan didadanya.

Banyaknya kontribusi dan prestasi yang telah ditorehkan membawanya ke berbagai gelar penghormatan. Wingdiktekkal Kodik TNI Angkatan Udara menganugerahkannya gelar Warga Kehormatan. Kemudian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Gojuryu Karatedo Shinbukan Indonesia juga menyebutnya sebagai Anggota Kehormatan. Lalu Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan predikat padanya sebagai Alumni Kehormatan. Bamus Betawi mengangkatnya sebagai Anggota Majelis Tinggi sebagai salah satu sesepuh Betawi yang "di-tua-kan". Bahkan Kesultanan Tidore pun memberikan gelar adat Nyili Gulu Gulu atau Duta Besar untuk wilayah jauh bagi Kesultanan.

Abdi negara dan pejabat publik yang loyalitasnya kepada negara tak diragukan, yang ditunjukkan dengan berbagai tanda kehormatan. Sebagai birokrat ia menerima lengkap Satyalencana Karya Satya X, XX dan XXX tahun atas masa bhakti dan pengabdian, kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah ia telah tunjukkan kesetiaan, sehingga menjadi teladan atas disiplin, kejujuran, dan kecakapan. Kontribusinya mengawal harta negara juga ditandai dengan Satyalencana Wirakarya sebagai ajang pembuktian atas dharma bhakti yang telah ditunjukkan. Tak heran jika Bintang Mahaputera Nararya pun Presiden anugerahkan, atas jasa luar biasa dan manfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

Hari-hari pengabdiannya di BPK banyak diisi dengan inisiatif startegis perubahan. Mereformasi jabatan fungsional pemeriksa berbasis jabatan dan menerapkannya pada unit penunjang pendukung sebagai satker perluasan. Kedudukan Badiklat pun ditingkatkan, menjadi center of excellence pusat unggulan, memfasilitasi pembelajaran tentang pemeriksaan keuangan negara bagi lebih banyak pemangku kepentingan. Merintis merit system dalam MSDM melalui talent pool untuk keperluan seleksi jabatan. Menggagas sertifikasi CSFA untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemeriksaan. Menerapkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah dan Long Form Audit Report untuk meningkatkan kualitas dan manfaat laporan hasil pemeriksaan. Dan tak lupa kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral pun lebih diperluas dan ditingkatkan.

Rajin berbagi pengetahuan dan bertukar pengalaman. Mengajar sudah dilakoninya dengan menjadi guru SMA paska lulus DIII Akademi Pimpinan Perusahaan Kementerian Perindustrian. Setelah lama bertugas di bidang pemeriksaan, ia berpindah jalur ke Pusdiklat menjadi widyaiswara memberikan banyak pelatihan. Ia menekuni tugasnya sebagai dosen khusus dengan berbagai kegiatan pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian. Karir dosennya mencapai puncak sebagai guru besar IPDN di bidang ilmu pemerintahan. Sering menjadi narasumber di berbagai kesempatan dan pernah menerima rekor MURI peserta terbanyak yang menyita perhatian. Aktif mendorong manajemen pengetahuan dengan menulis banyak artikel dan berbagai buku teks rujukan. Dalam rangka mendukung pemahaman publik tentang Keuangan Negara ia mendirikan Perpustakaan Riset BPK dan menerbitkan jurnal tata Kelola keuangan negara (TAKEN) untuk memfasilitasi dan mempublikasi hasil penelitian.

Urgensi pendidikan selalu ia jadikan fokus perhatian. Kerjasama dengan perguruan tinggi selalu diupayakan dengan merintis hubungan, menetapkan kesepahaman dan menyepakati perjanjian. Dari kuliah umum untuk berikan pencerahan hingga menjadikan BPK sebagai tempat magang dan penelitian. Dari kelas khusus bagi karyawan hingga mencarikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Ia juga concern pada pendidikan informal melalui partisipasi dan penyelenggaraan, berbagai seminar, workshop dan pelatihan, untuk memperluas wawasan, menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan. Baginya pendidikan adalah keniscayaan, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban selama hayat di kandung badan.

Legacy dalam mengembangkan dunia profesi diakui oleh banyak kalangan. Bersama Prof Mardiasmo ia menginisiasi berdirinya Kompartemen Akunan Sektor Publik meski saat itu belum beroleh gelar akuntan. Ia juga ikut mengawal tata kelola keuangan negara dalam berbagai regulasi dan peraturan serta intensif membina audit di sektor publik pemerintahan. Atas insiatif dan kontribusi tersebut Ikatan Akuntan Indonesia memberikan Akuntan Award sebagai penghargaan. Ia juga merintis sertifikasi Cerified State Finance Auditor (CSFA) bagi pemeriksa keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian memfasilitasi terbentuknya Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) sebagai wadah pembinaan.

Luwes dan supel dalam pergaulan menjadikannya "berterima umum" di semua kelompok dan lintas golongan. Kepada semua orang selalu ramah dan sopan, membuatnya dihormati teman sekaligus disegani lawan. Sejak mahasiswa ia memang dikenal sebagai organisatoris dan piawai dalam hal kepemimpinan. Kemahiran komunikasi membawanya memimpin banyak organisasi kemasyarakatan. Mulai dari Resimen Mahasiswa Jayakarta sebagai komandan hingga Bamus Betawi dengan posisi Sekjen yang ia emban. Kemampuan negosiasinya mampu menengahi berbagai konflik antar kepentingan. Selalu mencari jalan tengah dalam merumuskan kebijakan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terpinggirkan.

Atensinya sangat tinggi kepada seluruh karyawan. Dalam menjalin hubungan kerja ia tidak membedakan mana atasan dan mana bawahan. Di setiap event acara dan pertemuan ia berusaha menyatu dengan seluruh warga BPK mulai dari staf pelaksana, pemeriksa, pejabat struktural hingga pimpinan. Seringkali ia meluangkan waktu untuk mendengarkan berbagai keluhan sambil terus mengupayakan solusi atas beragam permasalahan. Pikirannya fokus untuk mempermudah bermacam urusan, meringankan beratnya persyaratan, mengurangi bertumpuknya beban dan menyederhanakan kerumitan. Kepada staf selalu ia berikan kesempatan berkarir di pekerjaan, memperluas pengalaman, dan meningkatkan kesejahteraan.

Humoris dan senang melontarkan joke bahan candaan. Suasana pertemuan yang tadinya kaku dan formal selalu bisa ia cairkan. Tak jarang kami terpingkal dengan kisah lucu dari berbagai pengalaman di sela-sela ia memberi arahan. Bahkan suasana rapat yang "menegangkan" bisa mendadak mencair ketika ia melemparkan guyonan. Berbincang dengannya menjadikan lawan bicaranya merasa nyaman, tidak mudah bosan, dan tidak dalam kondisi tertekan karena dapat secara leluasa memberikan masukan dan bertukar pandangan. Gaya bahasanya cenderung santai, sederhana dan tidak berlebihan meski sesuatu yang serius sedang dibicarakan. Serius tapi santai dan santai tapi serius adalah suasana khas di setiap pertemuan.

Agamis dengan kematangan berkarakter pribadi. Selalu memberikan semangat motivasi dengan postingan yang menginspirasi. "Jangan lupa bahagia" adalah kalimat yang selalu disampaikannya setiap hari. Baginya bukan kebahagiaan yang harus disyukuri, namun bersyukurlah agar dapat mendatangkan kebahagiaan sejati. Menurutnya lagi hidup ini harus selalu menerima apapun kondisi yang sedang hadapi, dengan sabar dan syukur sebagai kunci kebahagiaan yang hakiki. Gaya hidup sederhana menjadi ciri khas penampilannya sehari-hari. Menurutnya kemewahan tidak akan mendatangkan penghormatan sejati, namun kesederhanaan justru akan meninggalkan kehormatan abadi, sampai kita kembali menghadap Ilahi Rabbi.

Keluarga dan karir baginya adalah saling menunjang melengkapi, keduanya bukan merupakan pilihan dikotomi. Bu BA begitu kami memanggil Ibu Ferri sang istri, selalu setia mendampingi. Dalam setiap event kebersamaan dengan kami, pasti ada Bu BA yang selalu setia menemani. Setidaknya ini mengajarkan kepada kami bahwa LDR bukan sebuah opsi. Kebersamaan bukan untuk sekadar bisa saling menjaga hati, namun juga perlu untuk mendukung keberhasilan tugas suami. Karena di belakang kesuksesan karir suami, ada istri yang selalu menyemangati. Tidak hanya untuk sekadar tampil kompak mesra dalam bernyanyi, bahkan Bu BA sudah kami anggap sebagai ibu dari para anggota Dharma Wanita kami.

Berjiwa seni tinggi. Baginya pengembangan diri harus harus seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Menurutnya auditor tidak hanya perlu melatih ketrampilan kognisi, namun juga harus sering mengasah kreativitas dan imajinasi. Terbukti dengan kepiawaiannya dalam menuang-

kan pikiran dan perasaan melalui bait panjang puisi. Seringkali ia pun melontarkan pantun yang mencairkan suasana dalam berbagai pertemuan dan seremoni. Di sela kunjungan ke daerah ia sempatkan untuk mencari barang antik dan bernilai seni. Tak lupa berbagi pemandangan indah melalui fotografi. Dan tentunya jago melantunkan apapun lirik lagu dalam menyanyi. Komitmen pada seni menjadikannya pegiat kebudayaan dan kesenian asli Betawi.

Aktif berolah raga menjaga kesehatan jasmani. Baginya olahraga tidak selalu untuk mengejar prestasi, tapi yang lebih penting adalah bisa meningkatkan imunitas diri. Karenanya ia gemar meluangkan waktu bersepeda setiap hari, baik secara kolektif, bersama keluarga dan istri maupun saat sedang sendiri. Dalam tim sepakbola BPK RI ia dikenal sebagai kiper yang andal dalam menghalau serangan dan eksuksi pinalti. Di beberapa kesempatan terlihat kompak bermain ganda tennis meja bersama istri. Shooting bolanya sering masuk ke dalam ring basket yang jauh dan tinggi. Memiliki brevet terbang layang, selam, menembak dan terjun payung dari berbagai induk organisasi. Dan jangan lupa ia adalah penyandang Dan V dari GOKASI.

Rampungkan semua tugas amanah dengan cermat dan rapi. Di ruangan kerjanya terdapat roadmap bagaimana BPK melakukan reformasi birokrasi dan milestone apa yang akan ditinggalkannya sebagai legacy. Dari apa yang sejak awal ia inisiasi, sebagian besar hasil dan manfaatnya kini sudah mulai kita nikmati. Dengan kapasitas yang ia miliki, tentu kita berharap ladang pengabdian berikutnya sudah menanti. Meskipun kehilangan sosok Pimpinan, Bapak, Kolega dan Sahabat yang baik hati, kami tetap berharap tidak akan putus hubungan silaturahmi. Dan testimoni ringan inipun harus kami akhiri, dengan sejumput asa dan doa untuk kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan dan kebahagiaan bagi Prof BA dan Ibu Feri.

Jakarta, 25 Oktober 2021
Testimoni Singkat - Opini Dari Para Sahabat

KEPALA APP V, ARIF AGUS

TANTANGAN MENGKOORDINASIKAN TUGAS PERWAKILAN

Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP) V Arif Agus mencoba untuk meraih beberapa pencapaian pada masa mendatang. Misalnya saja, mengkoordinasikan percepatan penyelesaian tindak lanjut yang berlarut-larut. Dia juga menyebut bakal memperbaiki database monitoring kasus aparat penegak hukum (APH) di Perwakilan serta berkoordinasi dengan Perwakilan dalam menyongsong pelaksanaan tematik kinerja tahun 2022. Hal tersebut dia coba capai meskipun menghadapi beberapa kendala, termasuk keterbatasan jumlah personel di APP. Saat ini, hanya terdapat empat pegawai dengan penempatan di APP dan enam tambahan pegawai penempatan sementara di APP. Berikut hasil wawancara *Warta Pemeriksa* dengan Arif Agus.

■ **Arif Agus**

Bisa Bapak jelaskan latar belakang pembentukan Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP)?

APP dibentuk dengan beberapa pertimbangan. Misalnya saja pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, luasnya wilayah, banyaknya jumlah satker, dan perlunya kesamaan kebijakan serta sinergi pemeriksaan.

Beberapa contoh kegiatan pemeriksaan yang melibatkan peran APP, antara lain, pertama, pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan oleh 16 kantor Perwakilan. Pekerjaan ini membutuhkan kesamaan kebijakan pemeriksaan. Untuk itu, APP mengkoordinasikan pembentukan dan pelaksanaan tugas Pokja LKPD dalam menyusun kebijakan pemeriksaan LKPD yang akan diterapkan oleh seluruh pemeriksaan di entitas wilayah AKN V.

Kebijakan itu antara lain, kebijakan atas pemeriksaan/perlakuan akuntansi atas saldo akun dalam laporan keuangan. Kemudian kebijakan atas permasalahan dalam pemeriksaan yang sering terjadi untuk dibuatkan FAQ sebagai pedoman pemeriksaan.

Contoh kedua, sinergi pemeriksaan kinerja tematik yang dilaksanakan di tingkat pusat. AKN V maupun yang melibatkan satuan kerja (satker) lainnya membutuhkan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pokja untuk menyusun perencanaan hingga pelaporan.

Ketiga, perlunya dukungan data dari satker pemeriksaan sebagai informasi dan bahan pertimbangan kebijakan pimpinan. Hal ini antara lain terkait pemantauan penyelesaian pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada tingkat pusat dan kantor Perwakilan yang juga membutuhkan proses lebih lanjut oleh Tortama KN V dan Anggota V.

Kemudian koordinasi dan pemantauan penyusunan rencana pemeriksaan dalam RKP masing-masing satker yang membutuhkan koordinasi untuk mensinergikan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh AKN V. Dengan begitu dapat berkontribusi dan memenuhi capaian tema strategis BPK yang tertuang dalam renstra BPK.

Contoh keempat, penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan bahan pendapat atas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh satker di AKN V (pusat dan daerah) membutuhkan

> **Berbagai upaya yang dilakukan APP, baik kegiatan/ program, analisis, dan kajian, serta hasil koordinasi, adalah untuk mendukung kinerja AKN V. Sekaligus juga menjadi pendorong pencapaian kinerja Perwakilan.**

koordinasi antara APP, satker terkait, dan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP).

Apa saja yang menjadi tupoksi APP?

Tugas APP diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perubahannya. Disebutkan, APP AKN V mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V.

Dalam melaksanakan tugas, APP menyelenggarakan beberapa fungsi. Pertama, perumusan dan pengevaluasian rencana aksi APP dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK. Kedua, perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi APP. Ketiga, pengoordinasian dan pengompilasian usulan kebijakan dan strategi pemeriksaan di lingkup tugas AKN V.

Keempat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan strategi, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di lingkup tugas AKN V. Kelima, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di lingkup tugas AKN V. Keenam, analisis isu-isu strategis berdasarkan hasil pemeriksaan di lingkup tugas AKN V. Ketujuh, pemantauan dan evaluasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas AKN V.

Kedelapan, penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan dukungan pemeriksaan di lingkup tugas AKN V. Kesembilan, pelaksanaan pengelolaan risiko di lingkup tugas APP. Kesepuluh, menyusun laporan akuntabilitas kinerja APP. Kesebelas, pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama KN V.

Untuk struktur organisasi, APP AKN V terdiri dari Subauditorat Pengelolaan Pemeriksaan I 9VB 1) yang melingkupi untuk BPK Perwakilan wilayah Jawa (meliputi enam kantor BPK Perwakilan di wilayah Jawa). Kemudian Subauditorat Pengelolaan Pemeriksaan II (VB 2) yang melingkupi untuk BPK Perwakilan wilayah Sumatra (meliputi sepuluh kantor BPK Perwakilan di wilayah Sumatra).

Bagaimana ruang lingkup dan koordinasi APP? Siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan APP ini?

APP mengkoordinasikan tugas-tugas perwakilan untuk wilayah Sumatera dan Jawa. Wilayah Sementara meliputi 10 kantor Perwakilan BPK dan Wilayah Jawa meliputi enam kantor Perwakilan BPK.

APP melakukan koordinasi atas kegiatan-kegiatan pemeriksaan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Terkait itu, koordinasi dan pemangku kepentingan atas kegiatan APP antara lain meliputi Anggota V, Tortama V, kantor Perwakilan BPK di wilayah Jawa dan Sumatra, dan satker dibawah Sekretariat Jenderal seperti Biro TI yang antara lain terkait dengan pemanfaatan portal untuk pemeriksaan, kebutuhan sarana prasarana pendukung pemeriksaan, dan Biro Keuangan terkait dengan penganggaran dan kebutuhan dukungan keuangan untuk tugas-tugas pemeriksaan. Kemudian EPP yang antara lain terkait dengan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan penyusunan IHPS.

Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi APP?

Ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Pertama, keterlibatan satker pusat dan kantor Perwakilan di AKN V dalam berbagai strategi pemeriksaan yang disusun untuk menjawab sasaran prioritas nasional dan Renstra BPK. Ini merupakan tantangan untuk mensinergikan kebijakan, kebutuhan jumlah objek pemeriksaan, penyusunan tema, dan perencanaan pemeriksaan yang tepat. Dengan begitu, dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Kedua, pemeriksaan tematik, baik nasional maupun lokal, membutuhkan sinergi dan koordinasi pemeriksaan yang melibatkan satker pusat (kementerian), kantor perwakilan BPK di wilayah V dan VI, serta AKN lainnya. Ketiga, percepatan penyelesaian

berbagai target dan keterbatasan waktu, seperti penyelesaian SIPTL dan TLHP, membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama antara APP dan masing-masing pimpinan satker. Keempat, koordinasi untuk memenuhi harapan penugasan untuk pengembangan pemeriksaan seperti Long Form Audit Report (LFAR) dan IHPD.

Sementara itu, beberapa kendala yang kami temui antara lain, keterbatasan jumlah personel di APP. Saat ini hanya terdapat empat pegawai (staf) tetap dengan penempatan di APP dan enam tambahan pegawai penempatan sementara di APP.

Bagaimana efektivitas APP jika dikaitkan dengan koordinasi dengan para kepala Perwakilan?

Peran dan tugas APP AKN V sangat efektif bila dikaitkan dengan koordinasi dengan para perwakilan di wilayah Sumatra dan Jawa. Tanpa APP yang menjadi penghubung dan koordinator para kepala perwakilan pelaksanaan tugas dari pimpinan AKN V, komunikasi dengan satker lain di BPK maupun instansi di luar BPK akan menjadi sulit dan lambat untuk diselesaikan.

Seperti dalam pemeriksaan tematik, APP menjadi koordinator bagi seluruh perwakilan maupun perwakilan dengan satker lain di BPK. Kebijakan BPK maupun dari pimpinan AKN V akan sulit untuk dimonitor dan dievaluasi implementasinya di perwakilan.

Apakah capaian APP, khususnya terkait TLRHP?

APP tidak mempunyai portofolio seperti Perwakilan, sehingga tidak mempunyai capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Akan tetapi APP mempunyai peran membantu pimpinan dalam memonitor capaian penyelesaian TLHP di Perwakilan. Kemudian mendorong percepatan TLHP dan menjadi koordinator bagi penyusunan kebijakan percepatan TLHP di Perwakilan.

Kami juga membantu pimpinan dalam mengevaluasi capaian penyelesaian TLHP dan menganalisis kendala serta hambatan perwakilan dalam menyelesaikan TLHP. Lalu, mendiskusikan permasalahan tersebut ke pimpinan dan para kepala perwakilan untuk dicarikan penyelesaiannya.

Pada September sampai Oktober 2021, APP membantu Perwakilan dalam melaksanakan percepatan TLHP. Sehingga dalam periode tersebut terdapat peningkatan Perwakilan yang mencapai persentase TLHP di atas 80 persen.

Apa dampak yang dihasilkan APP terhadap kinerja AKN V dan Perwakilan?

APP merupakan salah satu satker di bawah AKN V. Indikator kinerja utama (IKU) APP merupakan *cascading* dari kinerja AKN V. Sama seperti kinerja Perwakilan di lingkungan AKN V yang setiap tahun telah ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan AKN V.

Berbagai upaya yang dilakukan APP, baik kegiatan/program, analisis, dan kajian, serta hasil koordinasi, adalah untuk mendukung kinerja AKN V. Sekaligus juga menjadi pendorong pencapaian kinerja Perwakilan. Salah satunya mendorong Perwakilan untuk meningkatkan capaian TLHP dengan melakukan kegiatan percepatan TLHP.

Dampak kehadiran APP, selain mendukung kinerja AKN V juga sekaligus mendorong kinerja Perwakilan. Terkait prestasi, salah satu yang kami dapatkan adalah penghargaan terbaik sebagai pengelola risiko.

Apa target dan rencana APP ke depan?

Target APP adalah mencapai IKU yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Antara lain terkait dengan tingkat kepuasan atas dukungan pengelolaan pemeriksaan, tingkat pemanfaatan hasil pemanfaatan dan pengevaluasian atas hasil pemantauan TLRHP, serta tingkat pemanfaatan atas hasil analisis isu strategis dan kebijakan pemeriksaan.

Kami juga akan berkoordinasi dengan pimpinan dan Perwakilan dalam membuat panduan percepatan penyelesaian untuk TL yang berlarut-larut dan diusulkan status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti). Selain itu, kami akan memperbaiki *database monitoring* kasus APH di Perwakilan, berkoordinasi dengan Perwakilan dalam menyongsong pelaksanaan tematik kinerja tahun 2022. Terakhir, akan berkoordinasi dengan Perwakilan dalam men-*update* kebijakan pemeriksaan LKPD sesuai dengan isu-isu terkini. ●

KEPALA APP VI, RIZAL ASSIDDIQIE

BANGUN SISTEM PENGELOLAAN DATA

Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP) AKN VI Rizal Assidiqie menjelaskan telah melakukan pemetaan data yang dibutuhkan setiap tahun sebagai dasar membangun sistem informasi pengelolaan data. Dengan begitu, dia berharap Perwakilan dapat secara otomatis men-*update* data atau informasi yang dibutuhkan tanpa melalui penerbitan ND (nota dinas) yang berulang kali.

Harapan lain yang dia sampaikan yaitu peningkatan pemanfaatan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL). Ini mengingat, fungsi SiPTL saat ini belum mengakomodasi peran APP sebagai penghubung antara pimpinan dan Perwakilan. Berikut petikan wawancara *Warta Pemeriksa* dengan Rizal terkait peran APP AKN VI.

■ **Rizal Assiddiqie**

Bisa Bapak jelaskan latar belakang pembentukan Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP)?

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPK, BPK Memiliki Satker APP di AKN V dan AKN VI. Pembentukan ini tentu tidak terlepas dari luasnya cakupan wilayah pemeriksaan pada AKN V dan AKN VI.

AKN V membawahi BPK Perwakilan wilayah Barat yang terdiri 16 BPK Perwakilan Provinsi. Sementara AKN VI membawahi BPK Perwakilan wilayah Timur yang terdiri 18 BPK Perwakilan Provinsi.

Selain itu, AKN V dan AKN VI memiliki auditorat yang membawahi kementerian dan badan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemeriksaan di seluruh BPK Perwakilan Provinsi bersinergi dengan pemeriksaan pusat. Juga mendukung pencapaian tujuan organisasi BPK, yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Maka diperlukan unit organisai yang dapat mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pemeriksaan di lingkungan AKN V dan AKN VI.

Apa saja yang menjadi tupoksi APP AKN VI?

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, APP AKN VI memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI. Untuk melaksanakan tugas tersebut APP memiliki 11 fungsi. Pertama, perumusan dan pengevaluasian rencana aksi APP dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK. Kedua, perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi APP.

Ketiga, pengoordinasian dan pengkompilasian usulan kebijakan dan strategi pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI. Keempat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan strategi, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI. Kelima, koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI.

Keenam, analisis isu-isu strategis berdasarkan hasil pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI. Ketujuh, pemantauan dan evaluasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI. Kedelapan, penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan dukungan pemeriksaan di lingkup tugas AKN VI.

Kesembilan, pelaksanaan pengelolaan risiko di lingkup tugas APP. Kesepuluh, menyusun laporan akuntabilitas kinerja APP. Kesebelas, pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama KN VI.

Bagaimana ruang lingkup dan koordinasi APP?

APP berupaya menerapkan *whole of government* dalam lingkup sesuai tugas dengan bekerja melintasi batas-batas portofolio tugas guna menguatkan pengelolaan pemeriksaan di AKN VI. Kami turut mengawal pemeriksaan dari perencanaan strategis pemeriksaan, koordinasi perencanaan teknis, pelaksanaan *review ex-ante*, sampai pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh satker di lingkungan AKN VI. Kami juga berkoordinasi lintas satker lain seperti Direktorat PSMK dan Direktorat Litbang untuk memperkuat perencanaan strategis pemeriksaan, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan

untuk mengoptimalkan pemantauan tindak lanjut, Biro TI dalam rangka berperan aktif membangun *Big Data Analytics*, Biro Keuangan dan Biro Umum untuk memenuhi sumber daya pemeriksaan, serta Badiklat untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai.

Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi APP AKN VI?

Tantangannya adalah pertama dapat meningkatkan pemanfaatan hasil analisis isu strategis dan kebijakan pemeriksaan. Kedua, dapat meningkatkan kepuasan atas dukungan pengelolaan pemeriksaan. Ketiga, dapat meningkatkan pemanfaatan hasil pemantauan dan pengevaluasian atas hasil PTLRHP.

Sedangkan kendala APP dalam melaksanakan tupoksinya adalah keterbatasan informasi dan sumber daya untuk menangkap isu strategis dalam rangka memenuhi kepuasan atas dukungan pengelolaan pemeriksaan. Saya berharap kendala ini dapat diatasi dengan semakin berkembangnya *Big Data Analytics* serta kesukarelaan setiap satker untuk memberikan data dan informasi baik terkait hasil pemeriksaan hingga perencanaan pembangunan daerah.

Bagaimana efektifitas koordinasi APP dengan Perwakilan?

Selama ini koordinasi dengan para kepala Perwakilan melalui beberapa saluran. Mulai dari *whatsapp group* (WAG), pokja, diskusi secara daring maupun luring, surat berupa nota dinas, serta rapat koordinasi teknis. Dengan banyaknya saluran untuk berkomunikasi dan berkoordinasi itu mendukung semakin meningkatnya efektivitas komunikasi antara BPK pusat dengan Perwakilan.

Apa capaian APP?

Capaian APP atas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) adalah selama ini APP telah melaksanakan QA atas pemantauan dan evaluasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara semesteran. Masing-masing BPK Perwakilan Provinsi dan Auditorat VI A dan VI B mengajukan usulan status tindak lanjut, yaitu status 1 dan 4 secara berjenjang dari eselon III satker, eselon II, sampai dengan eselon I.

Sebelum usulan status yang diajukan satker naik ke Badan, APP membantu fungsi Auditorat Utama KN melakukan validasi atas usulan status 1 dan 4. Hasil validasi APP sebagai dasar Auditorat Utama Keuangan Negara VI mengesekusi untuk diteruskan ke Badan atau dikembalikan lagi ke satker pengusul.

Sebagai contoh, dalam semester I 2021, APP telah memvalidasi usulan status 1 dari seluruh BPK Perwakilan Provinsi pada lingkup AKN VI sebanyak 6.780. Dengan hasil validasi status 1 sebanyak 6.596, sementara sisanya masih status 2/3. Sedangkan 159 usulan status 4 hasil validasi APP mendukung usulan status 4 sebanyak 84 rekomendasi sementara sisanya belum memenuhi.

Status 1 artinya telah sesuai dengan rekomendasi, status 2 artinya belum sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan status 3 artinya rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan status 4 artinya rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Apa dampak yang dihasilkan APP terhadap kinerja AKN VI dan perwakilan?

Pertama, dampak yang dihasilkan APP yaitu mendukung pencapaian IKU AKN VI dan Perwakilan. Antara lain meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan. APP melaksanakan reviu opini atas opini pemda yang diusulkan tim pemeriksa naik ataupun turun serta pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Reviu opini merupakan bagian dari QA APP atas kualitas hasil pemeriksaan dengan melibatkan Pokja LKPD.

Kedua, APP berperan aktif menyusun kebijakan dan strategi pemeriksaan bersama perwakilan sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Kebijakan pemeriksaan LKPD dan Pemeriksaan Kepatuhan sampai saat ini telah dimanfaatkan oleh perwakilan untuk menjalankan tugas pemeriksaannya. Lebih lanjut, kebijakan Pemeriksaan LKPD secara tidak langsung telah mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan indikator ekonomi makro daerah secara transparan. Demikian pula kebijakan pemantauan tindak lanjut di lingkungan AKN VI telah mendorong peningkatan capaian penyelesaian TLRHP.

Apa target dan rencana APP ke depan?

APP akan berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemeriksaan melalui peningkatan kepuasan atas dukungan pengelolaan pemeriksaan. Kemudian, pemanfaatan hasil pemantauan tindak lanjut. Terakhir peningkatan pemanfaatan hasil analisis isu strategis dan kebijakan pemeriksaan.

Unuk itu, APP telah melakukan pemetaan data yang dibutuhkan setiap tahun sebagai dasar membangun sistem informasi pengelolaan data. Dengan begitu diharapkan Perwakilan secara otomatis akan men-*update* data atau informasi yang dibutuhkan tanpa melalui penerbitan ND yang berulang kali.

APP juga telah melakukan berkoordinasi dengan EPP, Litbang, dan Biro TI dalam upaya peningkatan pemanfaatan SiPTL. Sementara untuk peningkatan pemanfaatan isu stategi, APP telah bekerja sama dengan tim pokja LKPD untuk melakukan pengembangan kebijakan pemeriksaan yang lebih aktual dengan kondisi sekarang. ●

www.bpk.go.id

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

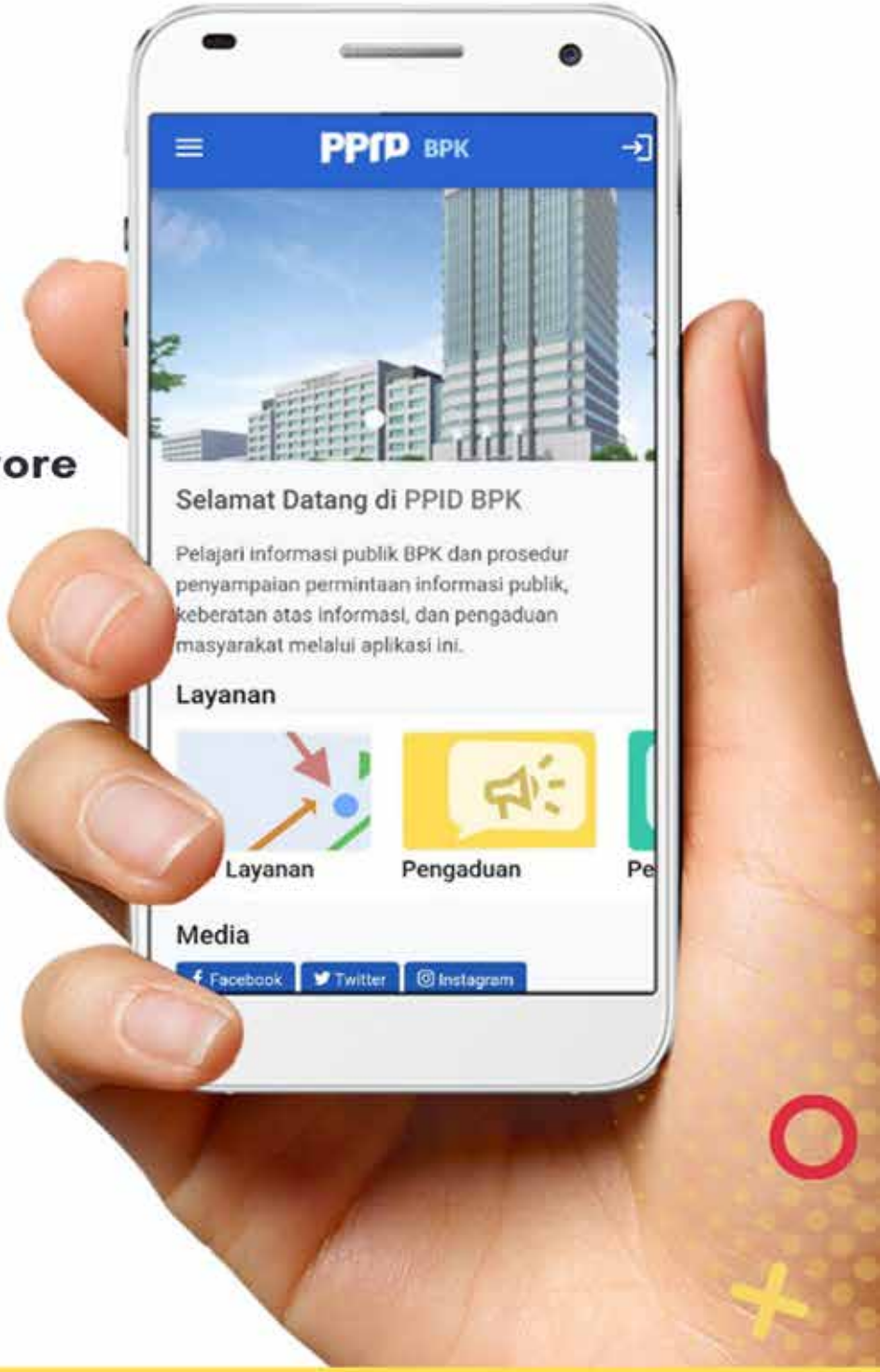

Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!

PENELITI CORE INDONESIA, YUSUF RENDY MANILET

FORESIGHT BPK DAPAT MENJAGA ARAH PEMBANGUNAN

Peran BPK dalam menerbitkan *foresight* dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk menghadapi tantangan dalam beberapa tahun ke depan. Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, BPK memiliki banyak data yang berasal dari berbagai pemeriksaan baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Yusuf, kolaborasi antara BPK dan lembaga penelitian dapat memperkuat peran *foresight* ke depan. Berikut petikan wawancaranya dengan *Warta Pemeriksa*.

BPK menerbitkan *foresight* pertamanya dengan memberikan sejumlah *scenario planning* mengenai apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depan. Bagaimana pendapat Anda terkait inisiatif BPK tersebut?

Saya kira sebenarnya BPK ini sudah sering menjadi acuan utama pemerintah baik di level pusat maupun daerah terutama untuk melihat penerapan *good governance*. Dari sana, sebenarnya kita bisa melihat peran BPK dalam menentukan arah pembangunan ke depan memang cukup krusial. Ini karena prinsip *good governance* juga secara tidak langsung akan menentukan banyak hal.

Seperti misalnya mengundang investasi. Kalau kita berbicara mengenai investor, tentu mereka akan melihat seberapa baik tata kelola pemerintahan di suatu negara sebagai salah satu pertimbangan mereka sebelum melakukan investasi.

Saya kira saat ini BPK sudah rutin melakukan pemeriksaan dan menghasilkan temuan-temuan yang sifatnya membangun. BPK juga memberikan rekomendasi yang tidak kalah penting untuk beberapa masalah yang sering kali ditemui dalam pelaksanaan kebijakan maupun penganggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan juga daerah.

> **Yang menjadi tantangan dalam jangka pendek adalah mengembalikan pertumbuhan ekonomi seperti sebelum terjadi pandemi. Sementara itu, dalam jangka menengah dan panjang bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih tinggi agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045.**

Ini merupakan modal penting ketika BPK berupaya menerbitkan pandangan atau prospek ke depan.

Data ini bisa dilihat menggunakan tren, misalnya, temuan atau masukan dari BPK yang diberikan ke beragam instansi di pusat dan daerah. Apakah data-data tersebut sudah ditindaklanjuti?

Karena, itu progres juga. Apakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mengalami progres di sana. Kalau misalnya, temuan itu justru ditemukan kembali pada tahun-tahun berikutnya itu tentu harus ada yang dilihat kembali apakah ada semacam *bottleneck* yang menghambat. Hal-hal itu akan mempengaruhi berbagai hal dalam pembangunan seperti yang saya contohkan tadi terkait keputusan investor.

Itu baru dari sisi investasi belum lagi kita berbicara mengenai konsumsi rumah tangga. Saya membaca temuan BPK pada 2020, banyak temuan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan pemerintah seperti misalnya bantuan sosial. Hal ini karena tidak ada data terpadu yang digunakan pemerintah.

■ Yusuf Rendy Manilet

coreindonesia.org

Ini menjadi penting karena kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga itu porsinya cukup besar dalam PDB kita. Untuk kelas menengah ke bawah, tentunya ketepatan penyaluran bantuan sangat mempengaruhi daya beli mereka. Sementara itu, ketepatan penyaluran bantuan juga sangat dipengaruhi oleh akurasi data yang digunakan pemerintah. Kemudian, pada muaranya hal itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga secara keseluruhan.

Apa hal yang perlu dilakukan BPK untuk memperkuat peran *foresight*?

Kalau dari kami sebagai peneliti, sebenarnya sering kali kami membutuhkan data detail yang mudah diakses. Memang harus kami akui ada juga oknum yang menggunakan basis data dari BPK untuk hal yang tidak bertanggung jawab.

Akan tetapi, pada dasarnya kami sebagai peneliti sangat membutuhkan dukungan data dari BPK untuk menganalisis temuan BPK yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga, saya kira kolaborasi itu menjadi hal yang penting.

Saya kira BPK perlu menggandeng lembaga *think tank* untuk bisa mengoptimalisasi data-data yang dihimpun BPK. Tidak tertutup kemungkinan juga bisa diadakan diskusi atau kegiatan bersama. Dalam forum itu, kedua belah pihak dapat membahas hal apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi baik dari perspektif BPK maupun dari lembaga penelitian itu sendiri.

Bagaimana pandangan Anda mengenai pembangunan dalam lima tahun ke depan pascapandemi? Apa hal yang perlu menjadi sorotan?

Kalau kita melihat pandemi Covid-19 ini telah menurunkan pertumbuhan ekonomi. Turunnya pertumbuhan ekonomi kemudian mempengaruhi target pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Visi 2045.

Kemudian, yang menjadi tantangan dalam jangka pendek adalah mengembalikan pertumbuhan ekonomi seperti sebelum terjadi pandemi. Sementara itu, dalam jangka menengah dan panjang bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih tinggi agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045.

Banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah mendorong sektor yang kemudian bisa berdampak besar terhadap perekonomian seperti industri manufaktur dan pertanian. Itu hal-hal yang bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan pertumbuhan ekonomi kita lebih inklusif. Betul bahwa pertumbuhan ekonomi kita dalam lima tahun ke belakang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar lima persen.

Tapi, yang perlu disoroti adalah apakah pertumbuhan ini sudah dirasakan oleh semua kelompok golongan. Ini yang perlu dipastikan karena beberapa penelitian menunjukkan angka ketidakseimbangan kepemilikan aset itu cukup tinggi. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin itu masih cukup tinggi. Ini yang menurut saya, kualitas pertumbuhan itu sendiri juga perlu menjadi sorotan dalam beberapa tahun ke depan.

Nah, untuk mengatasinya salah satunya bisa mengandalkan temuan-temuan dari BPK. Seperti misalnya, temuan mengenai akurasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Apakah persoalan akurasi data itu muncul terus-menerus atau akan ada perbaikan dari tahun ke tahun. ●

BEBERAPA KALI BERUBAH NAMA

Pegawai BPK akan bersepeda dan mengunjungi pegawai yang rumahnya berada di wilayah sekitar.

BPK Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan Perwakilan yang termasuk tua di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banyak hal yang dialami Perwakilan ini sejak pertama kali diresmikan pada 27 Mei 1981. Tercatat, sudah beberapa kali pula Perwakilan ini mengalami perubahan nama.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel Paula Henry Simatupang menjelaskan, pada usianya yang ke-34, Bepeka pun mulai mengembangkan sayapnya untuk mengimbangi tuntutan akan peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Pada perkembangannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semakin meningkat dan begitu pun tanggung jawab tugas pemeriksaan.

Karenanya, pada 1981 dibentuk Perwakilan Bepeka Wilayah III. "Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Bepeka Nomor 04/SK/K/1981 tentang Perwakilan BPK di Ujung Pandang dan Keputusan Ketua Bepeka No. 80/SK/K/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan. Perwakilan Bepeka Wilayah III di Ujung Pandang diresmikan pada 27 Mei 1981," kata dia kepada *Warta Pemeriksa* di Magelang, Jawa Tengah, belum lama ini.

Sepanjang sejarahnya, kata dia, BPK Perwakilan Sulsel mengalami beberapa perubahan nama. Perubahan nama untuk pertama kalinya adalah menjadi Perwakilan VII BPK RI di Makassar. Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 12/SK/I-VII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI.

Selanjutnya, kata dia, terjadi perubahan lagi menjadi Perwakilan BPK RI di Makassar berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 02/SK/I-VII.3/1/2006 sebagai perubahan keempat atas Keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Kemudian, berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 06/K/I-XIII.2/10/2008 tentang Nama Kantor Perwakilan BPK RI, nama Perwakilan BPK RI di Makasar menjadi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tak hanya nama, tambah Paula, ruang lingkup pemeriksaannya pun mengalami perubahan. Pada awalnya, Bepeka Wilayah III di Ujung Pandang mempunyai ruang lingkup pemeriksaan APBD dan BUMD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Teng-

> **Jappa-jappa berasal dari Bahasa Bugis yang artinya jalan-jalan. Jalan-jalan diindentikkan dengan senang/bahagia.**

gara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Jaya, dan Kalimantan Timur.

Dia menambahkan, Perwakilan III pada waktu itu memiliki tiga subauditorat. Ketiganya adalah Sub Auditorat III 1 yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Kemudian Sub Auditorat III 2 yang membawahi wilayah Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Terakhir, Sub Auditorat III 3 yang membawahi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Seiring dengan pembentukan BPK Perwakilan di masing-masing provinsi di wilayah yang sebelumnya dibawahi oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, maka terjadi perubahan ruang lingkup pemeriksaan. Perubahan itu meliputi pemeriksaan APBD dan BUMD di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.

Menjadi salah satu Perwakilan generasi awal di Indonesia, BPK Sulsel memiliki beberapa ciri khas dibandingkan dengan Perwakilan lain di Indonesia. Ciri khas itu antara lain budaya kerja Jappa Jappa (Jujur, Amanah, Perilaku Profesional dan Asertif). "Jappa-jappa berasal dari Bahasa Bugis yang artinya jalan-jalan. Jalan-jalan diiden-

■ **Paula Henry Simatupang**

tikkan dengan senang/bahagia. Sehingga diharapkan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kerja dengan hati yang bahagia yang kemudian memberikan dampak yang positif atas kinerja pegawai yang pada akhirnya dapat memenuhi harapan *stakeholder* BPK," tambah Paula.

BPK Perwakilan Sulawesi Selatan juga memiliki aplikasi e-Wako (Elektronik Wadah Komplain Bersama Kita Kawal Harta Negara). Ini merupakan wujud peningkatan mutu pelayanan dan mengoptimalkan penanganan pengaduan. Aplikasi ini merupakan sarana komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan kepada BPK Perwakilan Sulsel. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat memantau sejauh mana pengaduan yang disampaikannya telah ditindaklanjuti oleh BPK.

BPK Perwakilan Sulsel juga memiliki ECC (Employee Care Center) yang memiliki wilayah kerja untuk regional Timur. Yaitu mencakup seluruh kantor BPK di Sulawesi, Maluku, dan Papua. ECC diselenggarakan sebagai tempat tujuan pegawai untuk mendapatkan layanan bimbingan dan penyuluhan.

ECC hadir dalam bentuk kegiatan konsultatif yang representatif dengan harapan pegawai mendapatkan pendampingan yang maksimal dalam usahanya menyeimbangkan kesehatan jiwa sehingga dapat lebih optimal berkarya di unit kerja masing-masing.

"Pada masa pandemi pelayanan ECC dilakukan secara *online*, namun seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 layanan ECC dilakukan secara *online* maupun secara *offline* apabila dibutuhkan. Mungkin karena pem-

batasan kegiatan untuk berkonsultasi di ECC harus bertemu fisik. Tidak cukup jika hanya menggunakan Zoom," tambah Paula.

Dia mengatakan, BPK Perwakilan Sulsel juga memiliki tempat penitipan anak (TPA) sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini (paud). Ini untuk memfasilitasi pegawai yang kebanyakan berasal dari luar Sulsel yang memiliki anak-anak bayi hingga enam tahun.

BPK Perwakilan Sulsel juga telah melakukan kerja sama dengan hotel-hotel di wilayah kab/kota se-Sulawesi Selatan. Kerja sama misalnya terkait biaya akomodasi hotel untuk pemeriksa selama masa pemeriksaan. Dengan cara ini pemeriksaan lebih terkontrol karena harga sudah mengikat sesuai MoU dan pembayaran ditransfer langsung oleh bendahara ke rekening hotel.

Ada pula program Gowes Silaturahim (Gosilah). Jadi, pegawai BPK akan bersepeda dan mengunjungi pegawai yang rumahnya berada di wilayah sekitar. Ini merupakan program untuk mengenali karyawan secara lebih mendalam. "Dengan cara ini kita bisa lebih tahu bagaimana pegawai tersebut ketika berada di rumahnya. Akan tetapi karena pandemi, program ini sementara tidak dijalankan dulu," ungkap dia.

Pada masa mendatang, Paula mencoba untuk mencapai beberapa sasaran strategis yang dijabarkan berdasarkan Renstra BPK 2020-2024. Sasaran itu yakni meningkatkan kualitas dan layanan pemeriksaan. Untuk mencapai itu, BPK Perwakilan Sulsel menetapkan rencana aksi per triwulan atas pelaksanaan indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Rencana masa depan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan sebagai piloting pelaksanaan Investigatif Audit Task Force (IATF), dan tim IATF Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah dibentuk dalam minggu ke-3 Oktober 2021 sudah memulai tugasnya.

Salah satu yang sedang digerakkan adalah proyek perubahan beliau terkait "Strategi Pelaksanaan Pemeriksaan Investgatif" dimana pemeriksaan investigatif nantinya dapat dilaksanakan oleh masing-masing perwakilan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan permintaan pemeriksaan investigatif dari aparat penegak hukum. Sebagai langkah awal akan segera dibentuk Investigatif Audit Task Force (IATF) dan saat ini, sedang dilaksanakan piloting pada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dan piloting dilaksanakan di enam perwakilan lainnya yaitu Jambi, Banten, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan dan Gorontalo. ●

Kepala Perwakilan Sulsel sejak pertama sampai terakhir sebanyak 14 orang:

a. RA Sanusi, periode 1981-1986
b. Mohammad Bakri, periode 1986-1991
c. A Kadir Ismail, SH periode 1991-1995
d. Drs J Handjari, Ak, periode 1995-1997
e. Satiman Hadisiswojo, SH, MSi, 1997-2000
f. Drs Suratno KS, MSi, periode 2000-2004
g. Drs Supriyanto, periode 2004-2007
h. Abd Latif, SE, MM, periode 2007-2010
i. Ir Raden Cornel Syarief, periode 2010-2013
j. Tri Heriadi, SH, MM, periode 2013-2015
k. Drs Andi Kangkung Lologau, MM, Ak, CA, periode 2015-2016
l. Endang Tuti Kardiani, SE, MM, periode 2017
m. Drs Widiyatmantoro, periode 2018
n. Wahyu Priyono, SE, MM, Ak, CA, CSFA, periode 2018-Mei 2021

Pencapaian BPK Perwakilan Sulsel dalam 4 Tahun Terakhir:

- Berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada 2017.
- Memperoleh penghargaan peringkat 1 dalam kategori Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Wilayah Timur pada 2017 dari Sekretaris Jenderal BPK.
- Memperoleh skor indikator kinerja utama tertinggi atas seluruh satker eselon 2 BPK pada 2018.
- Memperoleh penghargaan peringkat 3 dalam kategori Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Terbaik pada 2018 dari Sekretaris Jenderal BPK.
- Memperoleh penghargaan sebagi satker dengan pengelolaan Dupak terbaik 2018 dari Sekjen BPK.
- Memperoleh penghargaan sebagai satker terbaik dalam Usulan Best Practices Tahun 2020 dari Ketua BPK.
- Memperoleh penghargaan keterbukaan informasi publik kategori kepatuhan laporan tahunan ke Komisi Informasi Sulsel selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2018, 2019, dan 2020 dari Komisi Informasi Provinsi Sulsel. ●

MEMBANGUN *AWARENESS* MILENIAL KALTARA LEWAT 'BPKAWAN MUDA'

Program ini secara khusus mengajak para mahasiswa untuk lebih mengenal BPK. Mahasiswa diundang ke BPK Kaltara untuk mengetahui tugas serta fungsi BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebagai kantor perwakilan termuda, memiliki beberapa target yang ingin dicapai. Salah satu target tersebut adalah menumbuhkan *awareness* atau kesadaran masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) terkait pentingnya tugas dan fungsi BPK dalam mengawal pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara Arief Fadillah mengatakan, BPK Kaltara dalam beberapa kesempatan telah berdiskusi dengan *stakeholder* mengenai *awareness* tersebut. Dari hasil diskusi, kata dia, diakui bahwa kepedulian masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah.

"Jadi, seperti pengaduan atau kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerah ini masih sangat rendah. Belum lama ini kami juga kami berkoordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian, hal yang sama juga diakui oleh instansi tersebut. Oleh karena itu, kita yang harus lebih aktif," kata Arief saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* pada Oktober.

■ **Arief Fadillah**

■ BPKawan Muda.

Untuk mendorong masyarakat yang lebih kritis dan aktif, BPK Kaltara pun membuat program khusus bernama 'BPK Kawan Maju Untuk Daerah' atau disingkat dengan 'BPKawan MUDA '. Program ini secara khusus mengajak masyarakat khususnya para mahasiswa untuk lebih mengenal BPK dan menyampaikan aspirasinya.

Dalam Program ini Mahasiswa diundang ke BPK Kaltara untuk mengetahui tugas serta fungsi BPK.

"Selain itu juga kami menyebarkan *polling* untuk menangkap aspirasi mahasiswa atas permasalahan-permasalahan atau issue-issue yang ada di tengah masyarakat. Hasil *polling* tersebut nantinya akan kami manfaatkan sebagai salah satu variabel dalam menentukan tema pemeriksaan," tutur dia.

Arief menjelaskan, program ini sejalan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh BPK Kaltara. Ia mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK Kaltara terkait pengelolaan PDAM juga dilatarbelakangi antara lain dari permasalahan dan keluhan masyarakat yang didapat dari berbagai media sosial maupun media massa. Dalam pemeriksaan PDAM ini kami juga mencoba mengaitkan dengan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diturunkan dari RPJMN kepada RPJMD dan Rencana Bisnis perusahaan (PDAM).

■ Pemeriksa di BPK Kaltara sedang melakukan *swab test*.

"Dalam program BPKawan MUDA selain menampung aspirasi dari mahasiswa, kami juga menampung keluhan. Adapun hasil polling Keluhan paling banyak disampaikan adalah terkait dengan peluang kerja, nah ini sejalan dengan audit tematik vokasi, hubungan dunia usaha dan dunia pendidikan, yang sedang kita lakukan," ujar dia kepada *Warta Pemeriksa*.

Program lainnya untuk mendekatkan BPK dengan masyarakat, khususnya kalangan muda, adalah dengan melakukan kegiatan bedah buku. Ada dua buku yang telah dibedah, yaitu buku "Kebijakan Publik oleh Dr. Riant Nugroho D" dan Buku "Amanah Sampai Akhir" yang diluncurkan Anggota VI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA. Kedua buku tersebut, tutur dia, berasal dari koleksi perpustakaan Kantor Perwakilan.

Kedua buku tersebut dipilih dengan harapan Mahasiswa dapat secara kritis menyikapi setiap kebijakan yang di ambil pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD untuk kesejahteraan rakyatnya.

Dengan semangat untuk meningkatkan *awareness* masyarakat, BPK Kaltara juga menggandeng Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelenggarakan kegiatan Mengaji Bersama Stakeholder Daerah atau disingkat MASDA. Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual satu kali dalam sebulan tersebut melibatkan/mengundang seluruh unsur stakeholder BPK dan BI di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan harapan untuk mempererat hubungan dengan stakeholder.

Terkait entitas pemeriksaan, Arief mengungkapkan bahwa jumlah entitas di Kaltara memang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan entitas di perwakilan lain. BPK Kaltara, tutur dia, hanya memiliki enam entitas pemeriksaan, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kendati demikian, entitas pemeriksaan di Kaltara merupakan wilayah perbatasan. "Jadi walaupun sedikit, tapi berbatasan langsung dengan Malaysia dengan garis perbatasan mencapai +1.038 km," hal ini merupakan tantangan katanya.

Selain itu, entitas di Kaltara terletak di wilayah kepulauan dan daratan yang pada saat pandemi sekarang hanya bisa diakses oleh angkutan air (sungai dan laut). Dengan demikian, akses untuk menjangkau entitas tidaklah mudah.

Di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan, BPK Perwakilan Kaltara tetap dapat menorehkan berbagai pencapaian. Dalam hal pemeriksaan, BPK Perwakilan Kaltara sukses meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi oleh entitas.

Arief mengatakan, rata-rata persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) di Kaltara pada 2016 berada pada 76,24 persen. Adapun saat ini, persentase TLRHP yang paling rendah adalah 87,89 persen, sedangkan yang tertinggi sekitar 95,10 persen untuk semester I 2021.

"Kondisi tersebut melebihi target dari Rencana Strategis BPK yang menetapkan tingkat TLRHP minimal mencapai 75 persen. Sedangkan dari sisi opini laporan keuangan, seluruh entitas disebut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)."

Adapun mengenai hal di luar pemeriksaan, BPK Kaltara telah memiliki bilik tes usap antigen yang terintegrasi dengan aplikasi e-Hac Kemenkes yang dapat digunakan sebagai dokumen perjalanan. "Bilik tersebut kami didirikan guna menghindari penularan Covid-19 di lingkungan BPK Kaltara. Perwakilan BPK Kaltara juga memiliki mess pegawai, yang pada masa pandemi ini beberapa unit juga digunakan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pegawai yang terinfeksi Covid 19 dengan gejala ringan." Pegawai yang sedang isolasi mandiri tersebut kami sediakan makanan, obat-obatan, vitamin dan kunjungan dokter agar kondisinya terpantau dan cepat segera pulih katanya.

"Dan yang lain, di bidang e-sport, BPK Kaltara meraih juara 1 pada turnamen e-sport yang digelar BPK RI dalam rangka HUT RI ke-76. Hal ini cukup membanggakan untuk daerah dengan akses jaringan internet yang terbatas, namun bisa meraih juara," tutur dia. ●

p-ISSN 2460-3937
e-ISSN 2549-452X

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

JAN - JUN EDITION
deadline MARCH 31

JUL - DEC EDITION
deadline SEPTEMBER 30

Auditors, researchers, academics, governance and accountability of state finances experts are *invited* to contribute their papers to

Jurnal
Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara

SINTA-2
ACCREDITED BY KEMENRISTEK/BRIN
NO. 200/M/KPT/2020

Articles should NEVER been published before and shall be written in ENGLISH. Articles are submitted to **jurnal.bpk.go.id** and follow the applied provisions.

Call for Papers

Indexed by:

sinta
Google Scholar
DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS
Crossref
ISJD
GARUDA
neliti

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Published article will be rewarded **Rp200.000/page**

Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Direktorat Litbang BPK RI
telp: 021-25549000, ext. 3311/3296
Hp: 0821 1192 9912
website: jurnal.bpk.go.id
e-mail: jurnal@bpk.go.id

Focuses on issues:
Public sector accounting; Auditing; Management and governance of state finances; Accountability of state finances; Public administration/policy related to state finances; State finance law.

jurnal | @jurnal.bpk | jurnal@bpk.go.id | jurnal.bpk.go.id

ASSESSMENT CENTER TINGKATKAN KOMPETENSI DAN KINERJA PEGAWAI

BPK merupakan salah satu pionir dalam penilaian dan pengujian kompetensi pegawai.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja para pegawainya. Hal itu salah satunya dibuktikan dengan adanya Assessment Center yang telah dibentuk sejak lama.

Menurut Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja BPK Agung Dodit Muliawan, Assessment Center lahir berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2002 dan Keputusan Sekjen BPK Nomor 114 tahun 2003. Dua ketentuan ini secara garis besar mendorong pembentukan metodologi suatu aktivitas pengangkatan pegawai BPK menjadi pejabat eselon.

"Dulu kalau pengangkatan pejabat ke dalam eselon itu berdasarkan daftar urut kepangkatan, kemudian berdasarkan dua peraturan tadi dibutuhkan satu metodologi untuk menjamin objektivitas bagaimana calon itu bisa dipilih secara objektif untuk menduduki jabatan tersebut," ucap dia kepada *Warta Pemeriksa*, 6 Oktober 2021.

Selanjutnya, latar belakang lahirnya Assessment Center juga sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2006-2010. Renstra BPK kala itu salah satu poinnya adalah menciptakan standar kompetensi dan mengembangkan Assessment Center untuk mendukung manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Dari sekian banyak ketentuan tersebut, akhirnya BPK melahirkan Assesment Center secara fisik di tahun 2010.

"Assessment Center BPK ini bertransformasi cukup panjang. Jadi tadi Assessment Center itu didirikan secara fisik tahun 2010 dimana BPK bisa dibilang salah satu pionir dalam penilaian dan pengujian kompetensi pegawai. Itu pun di tahun 2010 belum banyak instansi yang melakukan ini. Jadi BPK bisa dibilang lembaga

yang maju untuk penilaian kompetensi seperti ini," tutur dia.

Ia mengatakan, banyak orang mengartikan Assessment Center hanya sebagai tempat atau fasilitas, padahal Assessment Center adalah suatu metodologi. Metodologi untuk memetakan kompetensi atau menguji kompetensi seorang pegawai pada satu jabatan tertentu secara *multi tools* dan *multi assessor*.

Multi tools yang dimaksud adalah bahwa pengujian tidak boleh hanya menggunakan satu metode. Misalnya hanya wawancara, diskusi, atau hanya tertulis. "Sebaliknya, Assessment Center BPK menggunakan berbagai metode," katanya.

Sedangkan *multi assessor*, BPK melibatkan banyak assessor untuk melakukan penilaian individu. Hal ini dilakukan guna menekan penilaian yang subjektif. Semakin banyak assessor yang memetakan suatu asesi, maka diharapkan subjektivitasnya itu berkurang.

Di awal pendiriannya, Assessment Center hanya melakukan *assessment* pada pejabat pemeriksa atau auditor. Tapi kini fungsinya jauh lebih meluas. Bukan hanya untuk pemeriksa, tapi juga non-pemeriksa dan non-struktural. Begitu juga dengan pengujian bagi calon pegawai negeri sipil.

Ia menambahkan, Assessment Center BPK pada 2017 juga melakukan perbaikan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Untuk mengadopsi aturan tersebut, maka lahirnya New Assessment Center yang kemudian diresmikan ulang 26 April 2021.

"Saat ini kami memiliki 29 asesor terdiri dari 10 asesor jenjang pratama lalu 19 asesor jenjang ahli madya. Dan jumlah sarana dan prasarana yang kita miliki, asessor, kemudian kami baru saja mendapatkan akreditasi A untuk penilaian kompetensi untuk Assessment Center oleh Badan Kepegawaian Negara," tutur dia.

Tujuan *Assessment*

Agung Dodit menjelaskan, tujuan dan manfaat utama *assessment* adalah menilai kompetensi seseorang, yaitu apakah seseorang pegawai mampu atau tidak untuk alih jabatan. Selain kesiapan, assessment juga bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan pegawai BPK.

"Hal ini tentu bisa menjadi penilaian tersendiri bagi atasan, dimana lembaga mengetahui pegawai mempunyai kompetensi dimana, yang unggul dimana dan yang masih kurang dimana. Kekurangan ini bisa juga jadi masukan buat atasan terkait pengembangan atau peningkatan kompetensi."

■ **Agung Dodit Muliawan**

> **Assessment Center BPK menggunakan berbagai metode.**

Selain itu, hasil *assessment* juga penting untuk catatan Badan Diklat PKN BPK. Lewat hasil *assessment*, Badan Diklat mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengembangan atau peningkatan kopetensi yang bisa dipenuhi melalui kegiatan pelatihan.

"Hasil *assessment* kita sampaikan juga kepada pimpinan, sehingga akan menjadi masukan untuk pimpinan untuk kemudian memberikan semacam tugas tambahan atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang bisa meningkatkan ataupun menutupi kekurangan kompetensi yang ada di pegawai," katanya.

Soal sarana dan prasarana, BPK termasuk unggul dalam hal tersebut. BPK memiliki satu lantai khusus di BPK Perwakilan DKI yang didedikasikan untuk Assessment Center. Assessment Center juga dibangun senyaman mungkin agar tidak menganggu para pegawai atau pejabat pemeriksa yang akan mengikuti *assessment*.

Saat ini Assessment Center dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruangan khusus asessor dan ruangan untuk asesi. Ruangan ini sengaja dibuat terpisah agar asesi tidak mengetahui proses penilaian asesor.

"Nah kalau ruang untuk asesi sudah kami buat senyaman mungkin, bahkan kita mendapat *feedback* bintang 5, karena memang kita buat seperti itu, mengutamakan kenyamanan. Sehingga pada saat mengikuti *assessment*, pegawai tidak merasa gugup. Mereka pun akhirnya bisa mengeluarkan performa terbaik saat asesmen," katanya. ●

COACHING CORNER, WADAH INSAN BPK GALI POTENSI DIRI

Kegiatan Coaching Corner mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai BPK.

■ **Dino Yudha Anindita (kiri)**

Para pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki wadah baru bernama Coaching Corner. Melalui Coaching Corner, insan BPK bisa menggali potensi diri, membangkitkan motivasi dalam bekerja, hingga sekadar berbagi kisah inspiratif.

Coaching Corner diinisiasi oleh Dino Yudha Anindita yang merupakan Assessor Muda Biro SDM BPK. Dino menjelaskan, Coaching Corner mempertemukan para pegawai atau peserta yang kemudian disebut *coachee* dengan pegawai yang telah memiliki sertifikasi *corporate coach*.

"Di sini kita bisa membahas berbagai tema, bisa masalah performa, karier, hal lainnya," tutur Dino kepada *Warta Pemeriksa*, 28 September 2021.

Lalu dari mana Dino bisa memiliki ide untuk membentuk kegiatan ini? Ternyata kegiatan ini bermula dari tugas dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diikuti oleh Dino untuk membuat sebuah Aksi Perubahan. Dino yang memiliki sertifikasi *corporate coach* pun terpikir untuk membuat wadah tersebut.

Dino menjalankan Aksi Perubahan tersebut selama bulan Mei s.d. Juli 2021. Gayung pun bersambut, dimana ide tersebut didukung berbagai pihak. "Bahkan Para Pimpinan sudah memberikan dukungan tertulis untuk Aksi Perubahan Coaching Corner ini. Menurut saya dukungan ini menjadi sebuah pelecut semangat untuk menjalankan Coaching Corner agar dapat memberikan manfaat bagi pegawai dan organisasi," tutur dia.

Dino sebagai Project Leader kemudian membentuk tim *adhoc*. Tim *adhoc* merupakan kolaborasi dari Biro SDM yang berjumlah tiga orang dan dua orang dari Badiklat PKN. Promosi program pun sudah dilaksanakan pada bulan Mei baik lewat SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia), *whatsapp group*, dan *knowledge transfer forum*.

Tidak disangka, ternyata peminatnya sangat banyak hingga mencapai 81 orang dari 36 unit kerja. Karena peminatnya membeludak, Dino pun membagi sesi Coaching Corner dalam dua *batch*. Program pun digelar selama 34 hari kerja

atau dua bulan yang berisi 81 sesi *coaching* bersama 18 *coach* tersertifikasi.

"Kami mendapat 67 *feedback* positif dimana capaiannya dinilai sangat baik, bayangkan 34 hari kerja bisa menghasilkan 81 sesi *coaching*, mempertemukan 18 *coach* dengan 81 *coachee*, dimana dibagi dalam dua *batch*, yaitu 50 orang dan 31 orang," ungkap dia.

Program digelar via zoom dengan mempertemukan satu *coach* dan satu *coachee* (*one on one coaching session*). Dalam satu hari, ada tiga hingga lima pasang *coach* dan *coachee*.

Tiap *coachee* menentukan sendiri tema bahasan yang ingin dibicarakan dalam sesi *coaching*, asalkan masih dalam lingkup perihal pekerjaan kantor. "Jadi pada saat pendaftaran, itu selain memasukkan data diri pegawai, peserta juga memasukkan tema apa yang akan dibahas saat *coaching session*. Dan tema yang dibahas dalam *coaching session* ini kemudian saya gunakan untuk me*matching*-kan antara tema tersebut dengan *coach* yang sesuai. Jadi ada tema tertentu yang cocok untuk *coach* tertentu. Jadi biar peserta mendapatkan *coach* yang pas dengan tema yang sudah diajukan pada saat registrasi," ucap dia.

Ia mencontohkan, jika ada *coachee* yang ingin membahas mengenai *work-life balance* atau tentang pengembangan karier, maka akan dicocokkan dengan *coach* yang mengerti tema tersebut. "Dan ternyata problemnya itu teman-teman butuh didengar. Nah, Coaching Corner ini jadi jawaban dari pegawai yang ingin bercerita, ingin didengar tentang apa yang dialami, yang dipikirkan, dirasakan, tanpa kekhawatiran kalau cerita itu bisa bocor," tutur dia.

Secara umum, ucap dia, hal yang paling banyak dibahas dalam Coaching Corner adalah mengenai *work-life balance*, keberlanjutan karier, melanjutkan studi, permasalahan non-teknis pemeriksaan, pengembangan diri, dan pengembangan karier.

"Soal pengembangan karier ini, mereka sudah punya jalur karier atau pola karier yang diinginkan, tapi ternyata jabatannya mentok, jadi harus bagaimana. Nah disitu peran coach mendampingi untuk menemukan jawaban. Jadi *coach* itu tidak memberikan saran atau masukan, *coach* hanya mendengar dan mengajukan pertanyaan, kemudian yang menjawab dan mencetuskan ide solusi itu dari diri si *coachee* sendiri," ucap dia.

Ia pun bersyukur bisa bekerja sama dengan para *coach* yang berdedikasi tinggi pada tugas mereka di Coaching Corner. Padahal sebagian dari mereka memiliki tugas utama di unit kerja mereka masing-masing.

"Mereka para coach memiliki moralitas tinggi, artinya mereka merasa bertanggung jawab karena sudah diberi ruang untuk belajar oleh kantor meraih gelar sertifikasi *Certified Corporate Coach*. Sehingga moral untuk *giving back* ke organisasi, saya manfaatkan dengan membentuk Coaching Corner ini," tutur dia.

Ia menambahkan, melihat euforia selama Mei sampai dengan Juli 2021, masih banyak pegawai BPK yang ingin ikut program tersebut. Dino berencana untuk melanjutkan program Coaching Corner pada akhir tahun 2021 ini.

Dino pun sempat menggelar 10 sesi Coaching Corner yang dijalankan secara mandiri oleh dirinya. Hal itu ia lakukan sambil membuat konsep pedoman operasional standar dan juga terus menggalang dukungan kelembagaan.

Ke depan ia berharap Coaching Corner bisa melembaga. Sebab bila sudah melembaga, maka akan ada unit kerja yang secara terjadwal menggelar Coaching Corner. Selain itu, akan ada anggaran khusus yang bisa digunakan setiap bulan untuk menggelar Coaching Corner. "Saat ini dukungan yang ada masih perlu dikapitalisasi lebih lanjut menjadi dukungan kelembagaan. Sehingga ke depannya Coaching Corner mendapatkan dukungan sumber daya yang optimal," pungkas dia. ●

Soal pengembangan karier ini, mereka sudah punya jalur karier atau pola karier yang diinginkan, tapi ternyata jabatannya mentok, jadi harus bagaimana. Nah disitu peran coach mendampingi untuk menemukan jawaban. Jadi *coach* itu tidak memberikan saran atau masukan, *coach* hanya mendengar dan mengajukan pertanyaan, kemudian yang menjawab dan mencetuskan ide solusi itu dari diri si *coachee* sendiri.

SIAP-SIAP, KOMUNITAS BPK ESPORTS SEGERA DIBENTUK

Komunitas BPK Esports akan menjangkau seluruh BPK Perwakilan.

Ekosistem esports semakin berkembang di Tanah Air. Pemerintah bahkan memasukkan esports sebagai cabang olahraga eksibisi pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tak ingin ketinggalan untuk mendukung ekosistem esports di Tanah Air. BPK sempat menggelar turnamen esports Mobile Legends dan PUBG Mobile untuk dalam rangka menyambut HUT ke-76 RI. Saat ini, para pecinta esports di BPK bahkan sedang membentuk komunitas BPK Esports.

Salah satu pegawai BPK, Andi Wira Alamsyah, yang sangat aktif di dunia esports mengatakan, ia diajak bergabung dalam rencana pembentukan komunitas tersebut. Ia diminta bertanggung jawab untuk divisi Mobile Legends. Pria yang menjabat sebagai Kepala

■ **Andi Wira Alamsyah**

Subbagian Ketatausahaan AKN VI tersebut mengatakan, komunitas BPK Esports akan menjangkau seluruh BPK Perwakilan, yang mana seluruh anggotanya adalah staf BPK.

"Kami sudah berdiskusi soal pembentukan BPK Esports, mau seperti apa. Baru dibentuk sebulan ini, mungkin tahun ini insya Allah akan di-*launching* komunitas BPK Esports, yang tentu anggotanya khusus dari BPK saja," kata Wira, akhir September.

Wira sendiri merupakan pendiri klub esports bernama Brother Gamers Acme atau BGR Acme yang berbasis di Sulawesi Selatan. Ia mendirikan klub tersebut pada 2019. Semua bermuara pada kegemarannya bermain PUBG dan Mobile Legends. Lewat permainan, ia bertemu dengan teman-teman baru yang sama-sama menyukai *mobile game*.

Dari pembicaraan di dunia virtual itulah, Wira dan tim 'mabar'-nya benar-benar bertemu alias kopi darat. Ketika itu, teman-teman yang umumnya berusia muda atau berstatus mahasiswa ini akhirnya mengutarakan niatnya kepada Wira. Mereka butuh pemain atau orang yang bisa mengayomi mereka ketika bermain dan bisa menyokong pendanaan ketika harus mengikuti turnamen. Alih-alih hanya menjadi penyokong dana, Wira pun berinisiatif mendirikan BGR Acme atau BGRA pada Oktober 2019.

Awalnya, hanya terbentuk satu tim PUBG yang berisi lima orang, termasuk dirinya, dengan seorang cadangan. Namun seiring berjalannya waktu dengan berbagai turnamen yang mereka menangkan, terbentuk kembali satu tim khusus turnamen Mobile Legends yang terdiri dari lima orang. Kini tim inti BGRA terdiri dari satu tim PUBG dan dua tim Mobile Legends. Sehingga total ada lima belas orang plus beberapa cadangan.

"Saat ini level kami yang tadinya hanya di Makassar sudah masuk level provinsi, kami juga selalu ikut turnamen baik provinsi maupun nasional walau level amatir. Kemarin terakhir kami ikut seleksi PON, walaupun gagal tapi ini menambah pengalaman kami," ucap dia.

Sebagai *founder*, Wira bercita-cita menjadikan BGRA sebagai kawah candradimuka atlet-atlet amatir Sulawesi Selatan. Ia ingin melahirkan atlet-atlet profesional yang bisa bersaing di level nasional bahkan internasional. Meski klubnya masih setengah profesional, ia menjalankan klub layaknya profesional. Untuk membentuk *chemistry* di antara pemain, mereka wajib melakukan latihan setiap hari. Para pemain inti maupun cadangan juga wajib melakukan pertemuan minimal dua kali dalam sepekan. Ia pun memiliki *basecamp* atau rumah tempat berkumpul yang terletak tidak jauh dari Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Selatan.

Upaya tersebut tak sia-sia. Klub Esports bentukan Wira sudah memiliki 30 trofi turnamen yang dikumpulkan sejak 2019. Selain

itu, ternyata hobi para pemain di klubnya didukung para orang tua masing-masing.

"Saya lihat orang tua mereka senang saja, karena juara pun menghasilkan uang. Orang tua juga sudah terbuka cara berpikirnya. Yang penting sekolah mereka tidak terganggu, menjalankan hobinya dengan senang dan menghasilkan. Dan mereka *kan* kadang tinggal di *basecamp* dan ada saya yang mengawasi. Sejauh ini *sih* tidak ada orang tua yang *gimana-gimana*, percaya saja," ucap dia.

Dalam prosesnya, BGR Acme juga melakukan *scouting* pemain-pemain Sulawesi Selatan. Bila ada yang dinilai bagus, ia akan menghubungi dan mengajak bertemu, dan sebagian besar memang tertarik bergabung.

"Kalau bagus kami jadikan cadangan dulu. Atau kita lihat di lingkungan kita, kalau ada pemain-pemain bagus yang belum punya tim, atau sudah punya tim tapi timnya masih di bawah level kami, kami ajak untuk gabung," papar dia.

"Karena sering kali banyak pemain hebat namun timnya tidak mendukung. PUBG dan Mobile Legends adalah pemain tim, seorang pemain hebat pun tidak bisa mengalahkan satu tim."

Sejauh ini, ungkap Wira, timnya pernah menempati peringkat 6 dalam turnamen bergengsi bernama PUBG Mobile Community Cup (PMCC). Sementara untuk kompetisi di level Sulawesi Selatan, timnya pernah meraih juara kedua. Selain itu timnya juga pernah meraih juara di ajang turnamen esports Mobile Legends dan PUBG Mobile BPK. ●

SEPERJUANGAN DALAM SATU JALUR KERETA

Grup Jalur Serpong juga kerap bertukar informasi kuliner yang ada di sekitar stasiun.

Berawal dari kesamaan jalur berangkat dan pulang ketika menggunakan moda transportasi Commuter Line, sejumlah pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk komunitas Jalur Serpong. Sesuai namanya, komunitas tersebut berisikan pegawai BPK yang rutin pulang-pergi dari Stasiun Palmerah menuju Tangerang Selatan.

Jalur Serpong terbentuk pertama kali melalui grup *Whatsapp* pada 30 September 2019. Saat itu, terjadi demonstrasi besar di depan gedung DPR/MPR. Massa demonstran pun merembet hingga ke Kantor Pusat BPK dan Stasiun Palmerah.

"Karena waktu itu agak rusuh kita kemudian mencoba berkomunikasi supaya mengetahui kondisi kereta untuk pulang," ungkap salah satu anggota Jalur Serpong, Zikra kepada *Warta Pemeriksa*.

Pegawai dari Bagian Kerja Sama Internasional BPK tersebut mengisahkan, saat itu ada salah satu anggota komunitas yang memberanikan diri memeriksa kondisi stasiun. Ternyata, saat itu jalan menuju Stasiun Palmerah masih bisa dilalui. Bahkan, kondisi stasiun juga relatif sepi dan aman. Anggota grup kemudian bisa mengandalkan informasi tersebut dan bisa pulang ke rumah.

Dari momen tersebut, grup itu berkembang menjadi sarana bertukar informasi mengenai kondisi perjalanan kereta jalur Palmerah hingga ke kawasan Tangerang Selatan. Contohnya, kata Zikra, informasi kondisi stasiun atau kabar gangguan maupun keterlambatan kereta.

Rima Kusuma dari Bagian Hubungan Antar Lembaga BPK mengatakan, pegawai BPK memang jamak yang memanfaatkan moda transportasi kereta listrik dengan jalur tersebut. Terlebih lagi, banyak pegawai BPK yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) memilih berdomisili di sekitar Bintaro dan Tangerang Selatan.

"Termasuk kami yang kemudian memutuskan menggunakan Commuter Line sebagai moda transportasi untuk bekerja," ujar Rima.

Anggota Jalur Serpong seluruhnya sepakat kereta listrik merupakan moda transportasi yang paling bisa diandalkan untuk menuju kantor. Kereta listrik memiliki kelebihan durasi waktu tempuh yang relatif lebih pasti antara 25 hingga 30 menit.

Rima mengisahkan, dengan adanya grup tersebut, dia bisa berangkat menuju kantor bersama anggota grup lain. Berjalan kaki dari stasiun menuju kantor BPK pun menjadi tidak melelahkan karena bisa diisi dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tak hanya itu, grup Jalur Serpong juga kerap bertukar in-

formasi kuliner yang ada di sekitar stasiun atau dalam perjalanan menuju kantor.

"Kita juga suka sarapan bersama atau berbagi rekomendasi sarapan enak. Misalnya, di kantor KLHK. Setelah sarapan baru lanjut jalan lagi ke kantor," ujarnya.

Rizky Afiati dari Biro Umum BPK mengatakan, sejak Maret 2020 atau ketika pandemi Covid-19 mulai melanda, mayoritas anggota komunitas belum kembali menggunakan Commuter Line. Meski begitu, terdapat beberapa orang yang tetap berkereta untuk menuju kantor.

"Memang masih harus menggunakan kereta karena paling efektif dan cepat dibandingkan bawa kendaraan pribadi. Memang ada rasa takut karena pandemi, tapi ya kita berusaha jaga protokol kesehatan," ujarnya.

Rizky mengatakan, berupaya semaksimal mungkin menjaga protokol kesehatan di dalam kereta seperti tetap bermasker dan tidak menyentuh benda-benda yang ada. Selain itu, selama pandemi, dia lebih memilih untuk pulang atau pergi pada waktu yang tidak ramai. Dia mencontohkan, ketika mendapatkan jadwal masuk ke kantor, dia memilih naik kereta di atas pukul 07.00 WIB. Selain itu, menghindari pulang pada jam padat atau pukul 16.00 hingga 17.00 WIB.

"Malah lebih baik naik kereta di atas pukul 19.00 WIB itu justru kosong. Lebih merasa aman di jam-jam tertentu itu," ujarnya.

Selain itu, ujar Rizky, dengan adanya beberapa orang anggota komunitas yang sudah mulai berkereta pada masa pandemi, bisa berbagi informasi ke grup. Dia mencontohkan, beberapa informasi yang disebarkan seperti kondisi stasiun dan keramaian di kereta.

"Kita juga berbagi informasi mengenai aturan-aturan untuk naik kereta seperti butuh surat tugas atau keharusan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," ujarnya.

> **Kita juga berbagi informasi mengenai aturan-aturan untuk naik kereta seperti butuh surat tugas atau keharusan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.**

Rizky berharap, pandemi bisa segera usai dan bisa berkereta dalam keadaan normal kembali. Menurutnya, hal yang paling dirindukan dari keadaan tersebut adalah momen berbincang sambil menunggu kereta bersama rekan-rekan kerja di BPK. Hal itu selain dapat menyambung tali silaturahim juga dapat membantu melepas penat usai bekerja.

"Selain itu, sedih juga karena sekarang banyak toko-toko di stasiun yang harus tutup. Ya, mudah-mudahan pandemi bisa cepat selesai dan kembali naik kereta dengan normal," ungkapnya. ●

BPK ANGKAT DUA AKADEMISI JADI ANGGOTA MKKE

MKKE merupakan perangkat untuk memproses apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota maupun pemeriksa BPK.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memandu pengambilan sumpah dua Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK dari Unsur Akademisi di Kantor Pusat BPK, pada Rabu (13/10). Pengambilan sumpah ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 10/K/I-XIII.2/10/2021 dan Nomor 11/K/I-XIII.2/10/2021 tentang Pengangkatan Anggota MKKE BPK masa jabatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dari Unsur Akademisi.

Pengambilan sumpah yang dilaksanakan secara virtual tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri serta disaksikan oleh Pimpinan BPK. Adapun yang diambil sumpahnya sebagai Anggota MKKE BPK adalah Prof D Rusmin, M.B.A. dan Prof Dr Lindawati Gani, S.E., M.B.A., M.M., Ak., CA., FCMA., CGMA., FCPA (Aust). Lindawati Gani menggantikan Indriyanto Seno Adji yang telah habis masa jabatannya.

Dengan pengambilan sumpah tersebut, susunan Anggota MKKE BPK saat ini adalah Achsanul Qosasi (Ketua merangkap Anggota MKKE) dan Hendra Susanto (Anggota MKKE) dari unsur BPK, Mardiasmo (Anggota MKKE) dari unsur Profesi, serta Rusmin dan Lindawati Gani (Anggota MKKE) dari unsur Akademisi.

Setelah pengambilan sumpah selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah Anggota MKKE BPK. Hadir secara virtual yaitu Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Anggota V BPK/Pimpin-

an Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis, dan Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing.

Sebagai informasi, MKKE merupakan perangkat untuk memproses apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota maupun pemeriksa BPK. BPK pun tak segan memberikan sanksi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan MKKE terdapat insan BPK yang terbukti melanggar kode etik.

Ketua MKKE Achsanul Qosasi dalam wawancara dengan *Warta Pemeriksa* beberapa waktu lalu mengatakan, BPK sangat serius, bahkan aktif, menindaklanjuti beragam pelanggaran melalui MKKE. BPK bahkan tidak

segan menjatuhkan sanksi etik tingkat berat berupa pemberhentian secara tetap sebagai pemeriksa apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang berdampak negatif pada martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. "Ataupun berdampak negatif terhadap NKRI," tegas Achsanul.

Untuk itu, sesuai mandat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang dibentuk memiliki susunan keanggotaan yang cukup independen, yakni terdiri dari unsur Anggota BPK, unsur profesi, dan unsur akademisi.

Sebagai upaya mendukung penegakan kode etik, BPK juga memiliki fasilitas aplikasi *whistleblowing system* atau WBS yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik BPK. ●

PENGELOLAAN KEUANGAN PILKADA SERENTAK MASIH PERLU DIPERBAIKI

BPK masih mendapati adanya temuan berulang dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara terkait Pilkada Serentak.

■ Novy GA Pelenkahu

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar *focus group discussion* (FGD) dengan tema "Alternatif Solusi Perbaikan Sistem dan Mekanisme Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan Pilkada Serentak yang Lebih Transparan dan Akuntabel" pada Kamis, 30 September 2021. Salah satu tujuan digelarnya FGD ini adalah untuk merumuskan alternatif strategi dan solusi pengelolaan keuangan Pilkada Serentak yang lebih baik dan akuntabel.

Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Novy GA Pelenkahu saat membuka FGD menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara terkait Pilkada Serentak pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), BPK masih mendapati adanya temuan berulang. Beberapa temuan itu, yaitu keterlambatan proses pengesahan hibah langsung dan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penatausahaan dan pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tidak tertib.

"Dari hasil pemeriksaan pendahuluan kinerja

> **"Dari hasil pemeriksaan pendahuluan kinerja yang telah dilaksanakan BPK, terdapat permasalahan terkait sumber daya manusia pada KPU dan Bawaslu belum memadai karena pejabat pengelola keuangan yang belum kompeten, belum mendapat pelatihan, bimbingan teknis dan sertifikasi.**

yang telah dilaksanakan BPK, terdapat permasalahan terkait sumber daya manusia pada KPU dan Bawaslu belum memadai karena pejabat pengelola keuangan yang belum kompeten, belum mendapat pelatihan, bimbingan teknis dan sertifikasi," kata Novy.

Novy menambahkan, permasalahan lainnya adalah pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tidak memadai, antara lain, verifikasi bukti pembayaran belum terdokumentasi, bukti pembayaran yang belum lengkap dan terdapat bukti yang tidak riil, badan adhoc belum menyampaikan bukti pembayaran, serta kelebihan pembayaran honor jasa profesi.

Selain itu, terdapat permasalahan lainnya terkait sarana dan prasarana yang belum memadai. Beberapa permasalahan itu adalah aplikasi pengelolaan keuangan hibah belum terintegrasi dengan aplikasi keuangan Kementerian Keuangan. Kemudian, embukuan dan pelaporan keuangan belum didukung dengan aplikasi yang memadai.

Novy menjelaskan, FGD ini bertujuan untuk mendukung pemeriksaan terinci atas pengelolaan keuangan hibah Pilkada Serentak dalam rangka menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. "Kegiatan ini juga bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi dan solusi pengelolaan keuangan Pilkada Serentak yang lebih baik dan akuntabel," katanya.

Topik yang dibahas dalam FGD ini adalah konteks historis keputusan pendanaan Pilkada Serentak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mekanisme hibah pendanaan Pilkada Serentak. Selain itu, dibahas analisis desain dan implementasi mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pilkada Serentak melalui hibah APBD, isu dan permasalahannya serta alternatif solusi perbaikan mekanisme pengelolaan dana Pilkada Serentak.

Narasumber yang dihadirkan dalam FGD ini adalah Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan, Direktur Penyusunan Anggaran Bidang Polititik Hukum dan Keamanan (Polhukam) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan Dwi Pudjiastuti Handayani, Kepala Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan Edy Sutriono, Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Sudarso, dan Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Endah Martiningrum. Adapun yang bertindak sebagai moderator adalah Pengendali Teknis pada Auditorat Keuangan Negara I (AKN I) Eko Yulianto. Kegiatan FGD ini juga diikuti oleh para pemeriksa di lingkungan AKN I. ●

TANTANGAN KEPEMIMPINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0/SOCIETY 5.0 DAN PANDEMI COVID-19

■ OLEH **M. ARFAN KEMAL**
PEMERIKSA DI SUB AUDITORAT VII.B.2 BPK

Selain perubahan tak terduga yang terjadi begitu cepat, pandemi Covid-19 ini memberi efek negatif secara psikologis kepada sebagian besar individu, karena adanya ketidakpastian, dan ancaman kematian akibat virus.

Abad ke-21 adalah abad yang sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya karena terdapat tiga hal signifikan yang terjadi dan mampu mempengaruhi tatanan kehidupan dunia. Peristiwa pertama di tahun 2011, dunia memasuki era Revolusi Industri 4.0 atau sering disingkat IR4. Sebagian besar kegiatan manusia dalam era IR4 didukung oleh perpaduan antara *Information and Communication Technology* (ICT) dengan teknologi otomasi menggunakan *Internet of Things* (IoT), yang mengubah proses bisnis dan cara berbisnis dengan cepat, sehingga persaingan di segala bidang kehidupan menjadi semakin ketat.

Peristiwa kedua adalah lahirnya Society 5.0 atau S5 sebagai respon atas potensi degradasi peran manusia dalam era IR4 karena penggunaan ICT dan *Artificial Intelligence* (AI). Konsep S5 diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe dalam *World Economic Forum* (WEF) tahun 2019 di Davos, Swiss, yaitu konsep dimana AI akan mentransformasi *big data* segala bidang kehidupan dari internet melalui IoT, dan hasilnya menjadi suatu kearifan baru yang didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia, dan juga untuk kemanusiaan (Radiyta, 2019). Jika Masyarakat 4.0 memungkinkan orang untuk mengakses dan berbagi informasi melalui internet, Masyarakat 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari kemanusiaan itu sendiri" (Yunda, 2019).

Peristiwa ketiga adalah munculnya *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* 2 atau Virus Covid-19 di akhir tahun 2019. Sejak WHO menetapkan Covid-19 menjadi pandemi pada Januari 2020, grafik pertumbuhan ekonomi dunia turun tajam. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan *physical distancing*, *social distancing* sampai dengan *lockdown* yang kemudian berimbas ke berbagai sektor.

Situasi dan kondisi ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan khususnya bagi pimpinan dan manajer organisasi antara lain seperti, "Apakah rencana organisasi untuk menghadapi era IR4/S5? mampu diimplementasikan oleh seluruh pegawai?"; "Apakah seluruh sumber daya manusia yang kita miliki saat ini siap dan mampu beradaptasi dengan konsep digitalisasi dunia?" "Apakah organisasi telah menyusun rencana untuk menghadapi Pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai krisis?"; "Apa mungkin kegiatan organisasi dapat tetap berjalan sesuai rencana tersebut, dan kita dapat mencapai tujuan organisasi?".

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menuntut para pemimpin dan manajer bekerja ekstra keras baik dari sisi manajemen di mana mereka harus dapat membawa organisasi yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan staf atau bawahannya, maupun dari sisi kepemimpinan yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan, mengelola tingkat emosi diri sendiri dan para pegawai, memelihara kondisi kesehatan pribadi dan keluarga, serta mengambil keputusan dalam waktu singkat dengan informasi dan sumber daya terbatas.

Dengan demikian, seorang pemimpin diharapkan dapat "lulus ujian" menghadapi situasi dan perubahan yang tidak biasa atau tidak lazim, bahkan ekstrem. Permasalahan dalam ujian ini diharapkan membuat pemimpin keluar dari zona nyaman, dan melalui kapasitas yang dimilikinya, menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para pengikut atau bawahannya, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Kepemimpinan dan Revolusi Industri 4.0/ Society 5.0

Revolusi Industri 1.0 atau IR1 dimulai pada awal abad ke-18 yang ditandai dengan mekanisasi produksi untuk membuat aktivitas manusia menjadi efektif dan efisien. Kemudian IR2 lahir pada abad ke-19 dan ke-20 yang bercirikan produksi massal dan standardisasi mutu. Selanjutnya IR3 muncul di awal tahun 1970, yang ditandai dengan produksi massal menggunakan manufaktur berbasis otomasi dan robot. Sedangkan IR4 dimulai tahun 2011 dengan fokus pada kolaborasi teknologi *cyber* dengan otomasi manufaktur.

Menurut Kohler dan Weisz (2016), Revolusi Industri 4.0 atau IR4 merupakan sebuah pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan melakukan sinkronisasi waktu dengan melakukan penyatuan dan penyesuaian produksi. Sedangkan menurut Lifter dan Tschiener (2013) dalam Muhammad (2018), prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Selain itu, IR4 juga memadukan teknologi informasi yaitu *Internet of Things* (IoT) dengan proses manufaktur, dan menawarkan model bisnis baru dan sekaligus menciptakan nilai-nilai baru dalam suatu organisasi. Jadi, IR4 merupakan sistem manufaktur yang mengacu kepada proses transformasi yang cepat untuk melakukan desain, produksi, implementasi, operasi, produk, dan komponen. Hal ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 oleh pemerintah Jerman yang berinisiatif mempromosikan paradigma "disruptif" yaitu mengembangkan pabrik pintar (*smart factories*). Tujuannya adalah membuat proses manufaktur lebih efektif melalui integrasi antara mesin dengan jaringan cerdas, sehingga dapat menghasilkan produk lebih cepat, dan berkualitas tinggi.

Jadi, IR4 dapat disebut sebagai era Revolusi Digital atau era Disrupsi Teknologi karena penggunaan IoT dan otomasi menjadi hal yang dominan sehingga membuat persaingan kerja menjadi tidak *linear* (Muhammad, 2000). Konsep ini diharapkan menambah nilai efisiensi dan efektivitas pada lingkungan kerja dalam sebuah organisasi di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital. Hasil yang diharapkan adalah pengurangan signifikan atas biaya operasional, namun di sisi lain mempercepat proses produksi dan menghasilkan produk berkualitas tinggi.

Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya *Society 5.0* atau S5, yaitu komunitas yang berorientasi pada manusia yang mampu menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial, melalui sistem yang terhubung erat antara dunia maya dan dunia nyata. Atau dengan kata lain, dalam konsep IR4, manusia mengakses *database* di layanan *cloud* melalui internet atau dunia maya, untuk mencari, mengambil, dan menganalisis data dan informasi. Sedangkan pada S5, informasi *database* di dunia maya akan dianalisis oleh kecerdasan buatan atau AI dan hasilnya digunakan oleh manusia dalam berbagai bentuk di ruang fisik (Raditya, 2020). Dengan demikian, jika dalam IR4 memungkinkan siapa pun untuk mengakses dan berbagi informasi melalui internet, maka era S5 adalah era ketika semua teknologi adalah bagian dari kemanusiaan itu sendiri.

Kondisi ini menuntut sistem manajerial dalam organisasi atau perusahaan untuk menyesuaikan perannya mengikuti pola IR4 dan S5. Namun, tantangan yang dihadapi para pimpinan dan manajer bukan hanya mempersiapkan diri tetapi juga melatih SDM yang dimilikinya saat ini untuk menjadi pekerja cerdas dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital.

> **Memasuki Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, serta Pandemi Covid-19, pemimpin dan para manajer harus dapat memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan yang kompleks.**

Contoh perusahaan yang telah memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan IR4 dan S5 adalah PT Astra. Pada tahun 2014 PT Astra melakukan penelitian dalam rangka transformasi penggunaan internet yang semula sebagai *business enabler*, menjadi *business driven*. Kemudian pada tahun 2016 perusahaan ini mengambil langkah fundamental dengan membentuk *Initiative Digital Group Team Project* (IDGTP) yang terdiri dari perwakilan berbagai bisnis grup atau anak perusahaan. Tim diberikan fleksibilitas dalam melakukan perencanaan, implementasi dan pemantauan berbagai inisiatif digital yang dapat digunakan lintas perusahaan, lintas grup bisnis, lintas fungsi, dan lintas industri sehingga proses transformasi digital dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh (PT Astra *Annual Report*, 2018).

Berdasarkan uraian transformasi digital PT Astra, dalam era IR4 dan S5 dibutuhkan gaya kepemimpinan yang mengarah pada transformasi "digitalisasi" melalui manajemen pengembangan SDM dalam rangka mendukung seluruh kegiatan organisasi. Untuk itu seorang pemimpin perlu memiliki pendekatan inovatif yang mampu menciptakan suasana digitalisasi seperti tersedianya platform dan perangkat pintar yang saling terhubung, serta membangun cara baru untuk berkomunikasi serta berkolaborasi dengan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan.

Peran pimpinan dan para manajer semakin dibutuhkan karena era IR4 dan S5 adalah tentang daya saing dan inovasi. Organisasi perlu menyesuaikan kemampuan mereka untuk menangani tantangan baru. Selain manajemen perubahan, hal lain yang perlu dikembangkan secara kreatif dan analitis adalah literasi budaya "digital". Untuk itu peran pemimpin atau manajer adalah mendorong perkembangan ide-ide dan konsep baru dan mengimplementasikannya dengan benar sehingga dapat meningkatkan inovasi serta daya saing organisasi.

Kepemimpinan dan Pandemi Covid-19

Virus yang mewabah di hampir seluruh negara di dunia dalam waktu yang sangat cepat ini, membuat banyak pemimpin baik pemimpin negara, pemimpin organisasi, dan pemimpin kelompok berada dalam tekanan psikis yang sangat tinggi. Cakupan skala besar dan ketidakpastian yang dihadapi membuat Covid-19 dikategorikan sebagai krisis "*landscape-scale*" yaitu peristiwa tak terduga berskala luas atau besar yang terjadi dengan kecepatan luar biasa (D'Auria, 2020). Kondisi ini menyulitkan para pemimpin untuk mengatasinya, karena tingkat ketidakpastian tinggi menimbulkan disorientasi, perasaan kehilangan kendali, dan gangguan emosi yang kuat.

Ketika para pemimpin menyadari bahwa krisis tersebut telah menimbulkan dampak serius, mereka mulai melakukan respons. Tetapi mereka tidak dapat merespons sebagaimana dalam keadaan normal atau mengikuti rencana yang telah disusun sebelumnya, karena perubahan terjadi begitu cepat dan tak terduga (Howitt et.al, 2009). Selain perubahan tak terduga yang terjadi begitu cepat, pandemi Covid-19 ini memberi efek negatif secara psikologis kepada sebagian besar individu, karena adanya ketidakpastian, dan ancaman kematian akibat virus. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brooks, S. et.al (2020) atas tingkat gejala stres yang timbul pada manusia akibat Covid-19 menyimpulkan bahwa, sebagian besar efek psikologis negatif yang timbul antara lain kebingungan dan kemarahan, perasaan kesepian, dan ketakutan akan terinfeksi virus. Hal ini juga diperburuk dengan adanya karantina mencakup wilayah yang luas dan berdurasi lama.

Situasi dan kondisi ini secara langsung mempengaruhi organisasi di seluruh dunia, baik pada sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, maupun sektor lainnya. Bagi para pemimpin atau manajer organisasi tersebut, wabah ini memberikan tantangan jauh lebih besar, lebih beragam, lebih kompleks, dan lebih sulit dari era sebelumnya. Selain tantangan mengelola tingkat stres anggota organisasi/kelompok, diri sendiri, dan menghadapi para pemangku kepentingan, manajer juga harus menghadapi tantangan baru yaitu, pekerjaan yang dilakukan secara jarak jauh *(remote work)* lambat laun dapat mengurangi tingkat kolaboratif yang telah dicapai tim melalui komunikasi tatap muka. Hal ini akan segera menjadi kenyataan apabila jaringan telekomunikasi terbatas atau sering terganggu, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Selain itu *social distancing* dan *lockdown* yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menghambat distribusi rantai pasok, sehingga mempengaruhi produktivitas.

Menghadapi tantangan tersebut, para pemimpin diharapkan memiliki komitmen dan mampu menyesuaikan model dan ritme kepemimpinannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini, agar program untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat tetap terealisasi.

Menurut Gene Klann (2003), model kepemimpinan dari suatu organisasi merupakan kunci keberhasilan pada saat sebelum, ketika, dan setelah krisis. Seorang pemimpin yang berkualitas dituntut memiliki rencana mengenai langkah-langkah yang harus dilakukannya sehubungan dengan krisis tersebut, dengan mempertimbangkan durasi, tingkat keparahan, dan konsekuensi akhir dari sebuah krisis. Selama situasi krisis pemimpin juga harus mampu menjelaskan visi misi dan nilai-nilai organisasi melalui komunikasi efektif, serta kepedulian yang lebih kepada bawahannya.

Memanfaatkan Peluang dan Menjawab Tantangan

Memasuki Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, serta Pandemi Covid-19, pemimpin dan para manajer harus dapat memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan yang kompleks. Jadi mereka bukan hanya berperan sebagai pemimpin, namun juga harus dapat menjadi Project Manager dalam situasi "krisis". Para pemimpin dan manajer dituntut memiliki visi mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang literasi digital (*digital literacy*), dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam memproses dan menganalisis data yang akan digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan bisnis.

Menurut D'Auria (2020) hal yang dibutuhkan oleh para pemimpin saat terjadi krisis (dalam hal ini Pandemi Covid-19) bukanlah penanganan yang telah terencana sebelumnya, melainkan respons perilaku dan pola pikir yang dapat mencegah reaksi yang berlebihan terhadap krisis dan bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Salah satu konsep yang membahas mengenai respons yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau dalam hal ini *Project Manager*, disampaikan dalam laman *OnlinePMCourses*, terdiri atas tujuh prioritas yaitu:

1. *Protect your people*.
   Proyek, target, dan para pemangku kepentingan adalah prioritas. Namun prioritas kesehatan dan keselamatan manusia berada di atas semua. Himbau tim proyek untuk mengurangi kegiatan yang tidak perlu atau kegiatan yang berisiko tinggi, dan jadwalkan pertemuan melalui *video converence*, serta lakukan pekerjaan lebih banyak dari rumah (*work from home*);

2. *Put it on your risk register*.
   Bentuk kelompok kerja untuk menyusun dan mendiskusikan beberapa alternatif skenario penyelesaian target proyek. Kemudian identifikasi masing-masing risiko dari alternatif tersebut serta buat mitigasinya. Tentukan prioritas atas skenario, dan tetapkan langkah serta personil yang tepat untuk menanganinya;

3. *Consider if your project should be halted or delayed*.
   Lakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan seperti sponsor, dewan direksi, dan klien proyek. Lakukan hal tersebut secara pro aktif atau berinisiatif menghubungi mereka, dan bukan sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan atau persetujuan mereka atas alternatif, sekaligus menunjukkan bahwa Anda bukan hanya mengharapkan hasil, tetapi pemimpin yang mengetahui, dan sanggup mengendalikan situasi;

4. *Key into organizational responses*.
   Pimpinan puncak dan organisasi Anda membutuhkan respons dengan skala yang lebih luas. Untuk itu mereka juga membutuhkan informasi dari para manajer di bawahnya. Dengan kemampuan dan keterampilan yang Anda miliki, tidak ada salahnya menawarkan bantuan sebagai kontribusi dengan membawa pemikiran Anda ke tingkat pemikiran strategis organisasi, dan juga sebaliknya pemikiran organisas ke dalam skenario proyek yang Anda pimpin. Selain itu jangan lupa mendengarkan dan mempertimbangkan tanggapan dan masukan para pemangku kepentingan;

5. *Consider procurement commitments*.
   Anda mungkin perlu menunda pengiriman material atau menambah staf baru, meskipun ada prediksi bahwa laju proyek akan melambat. Namun jika Anda ingin tetap mempertahankan ritme pekerjaan agar tidak berhenti, Anda dapat bernegosiasi dengan para supplier atau vendor mengenai *advance purchasing*, *term of payment*, dan *delivery time* untuk mengurangi risiko kelangkaan atau ketersediaan barang, produk, material atau bahan baku;

6. *Keep talking*.
   Kondisi ketidakpastian dan ketakutan berpotensi menimbulkan kepanikan. Untuk mencegah hal tersebut, lakukan komunikasi efektif kepada seluruh pihak, bahkan dalam situasi dimana Anda tidak mengetahui apapun mengenai perkembangan terbaru. Setelah menyampaikan informasi mengenai skenario dan alternatif rencana yang telah disusun oleh tim kepada pemangku kepentingan, klien, dan sponsor secara transparan, sangat mungkin terdapat informasi atau peristiwa baru yang belum Anda ketahui. Segera lakukan update dan analisa apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi proyek, dan apa rencana perubahan yang akan dilakukan;

7. *Regular review cycle to reconsider plans and responses*.
   Lakukan evaluasi reguler dan rutin atas seluruh pelaksanaan proyek, agar Anda dan tim selalu siap untuk merespon yang adaptif apabila situasi berubah dengan cepat. Hal ini membantu Anda untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai fakta terbaru, dan langkah apa yang perlu dilakukan. ●

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

SATU LAGI, PEMIMPIN PERUBAHAN

(BELAJAR DARI KEPALA PERWAKILAN JATIM)

■ OLEH
DIAN INSANI AMBARWATI
ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR ITAMA BPK

Perubahan dalam organisasi tidak dapat dihindari. Dalam menyikapi perubahan, manajemen perlu melakukan serangkaian kegiatan terkait manajemen perubahan.

Manajeman perubahan adalah suatu rangkaian proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada manusia yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut (Poots dan LaMarsh dalam Wibowo, 2018:241)[1]. Mengapa berfokus pada manusia, karena hambatan utama atas keberhasilan perubahan adalah adanya resistensi dari manusia yang terlibat dalam perubahan. Individu-individu dalam organisasi adalah penggerak dari berjalannya proses di suatu organisasi. Individu-individu inilah yang membangun motivasi, menentukan sikap, membentuk nilai, yang tercermin dalam etos kerja.

Pemimpin Transformasional sebagai Motor Perubahan

Pemimpin adalah motor perubahan. Dalam mengelola perubahan, seorang pemimpin dapat memilih gaya kepemimpinan masing-masing. Namun demikian, banyak penelitian menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang paling tepat diterapkan dalam manajeman perubahan.

Robins (2007) dalam Hairudinor, dkk (2020)[2] menyatakan bahwa pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal terkait kebutuhan dan pengembangan diri individu di organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin transformasional mencoba menggairahkan dan mendorong anggota organisasi untuk mengembangkan diri dan potensinya sehingga akan mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Inti dari kepemimpinan transformasional adalah pemberdayaan. Dalam konsep pemberdayaan, setiap individu dalam organisasi didorong untuk lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang memengaruhi pekerjaan (Wibowo, 2018:408). Pemberdayaan memungkinkan setiap individu dalam organisasi membuat keputusan yang lebih besar, sehingga mereka bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar pula. Hal ini akan berpengaruh positif bagi organisasi bahwa setiap individu akan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi terebut.

Komitmen Perubahan BPK Perwakilan Jatim

Menyadari tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik, Perwakilan Jatim bertekad untuk melakukan perubahan demi memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai langkah nyata dari komitmen tersebut, Perwakilan Jatim giat melakukan inovasi.

Kata inovasi sering disandingkan dengan kata *invention* dan *discovery*, yang ketiganya berarti penemuan sesuatu yang baru. Saefullah dan Rusdiana (2016:10)[3] menjelaskan bahwa *discovery* berkaitan dengan penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, namun belum diketahui atau ditemukan sebelumnya. *Invention* diartikan sebagai penemuan hal-hal yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan inovasi (*innovation*) adalah suatu ide, benda, cara yang dirasakan baru bagi seseorang dan atau sekelompok orang. Merujuk pada penjelasan tersebut, inovasi dalam pembahasan ini mencakup pada kegiatan/ide yang terjadi di lingkungan BPK.

Kepuasan kerja pegawai tidak semata dipengaruhi oleh banyaknya pendapatan, namun termasuk faktor psikologis seperti penghargaan atas pekerjaan, kesempatan untuk maju, dan organisasi yang dihargai oleh masyarakat.

Dalam *booklet* Inovasi Perwakilan Jatim 2021, tercatat terdapat 13 inovasi yang telah dikembangkan di Perwakilan Jatim dan terdapat tiga inovasi lain yang dalam proses pengembangan. Salah satu inovasi Perwakilan Jatim adalah Whatsapp Layanan Pengaduan Masyarakat. Inovasi ini dibangun untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat melakukan pengaduan. Inovasi ini dibangun untuk menjawab isu strategis terkait keinginan masyarakat turut serta mengawasi pengelolaan keuangan negara. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran atas penyelenggaraan keuangan negara/daerah yang terjadi, menanyakan pertanyaan umum seputar BPK, permohonan informasi publik, atau memberikan keluhan/masukan lainnya.

Pilihan menggunakan media WA merupakan pilihan yang pintar karena WA relatif *user friendly* dibandingkan dengan media lainnya, misalnya via aplikasi *web-based* seperti yang biasanya digunakan oleh satker lain di BPK. Terobosan yang dilakukan oleh Perwakilan Jatim tersebut mendapatkan respons yang bagus dari masyarakat, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan WA Pengaduan, yaitu sebanyak 167 pada Semester II 2020 dan melonjak ke 354 pada Semester I 2021. Boleh dibilang, penggunaan WA ini adalah '*blue ocean strategy*', yang mana Perwakilan Jatim membuat trend baru dalam membangun pola komunikasi dengan *stakeholder*, dan menjadikan hal tersebut sebagai keunggulan kompetitif. Melihat kesuksesan Perwakilan Jatim, bisa jadi strategi komunikasi ini akan menjadi tuntutan *stakeholder* pada satker lainnya di BPK.

Adanya berbagai macam inovasi bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja di Perwakilan Jatim. Budaya berinovasi untuk mencapai tujuan perubahan mulai tumbuh sejak Joko Agus S menjadi Kepala Perwakilan Jatim di bulan Januari 2020. Untuk membangun budaya berinovasi, di tahun 2020 Joko Agus S menginisiasi adanya Lomba Ide dan Kreativitas untuk menjaring kreatifitas dan ide inovasi dari para pegawai.

Mengelola Resistensi

Setiap perubahan berpotensi menimbulkan resistensi. Weiner (2009) dalam Sudarsyah (2012)[4] menjelaskan bahwa perilaku resistensi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu *change valance* dan *change efficacy*. *Change valace* diartikan sebagai suatu persepsi tentang apa yang akan didapat dari adanya perubahan, sedangkan *change efficacy* terkait pertimbangan atas kemampuan pribadi dan organisasi dalam menghadapi perubahan.

Belajar dari Joko Agus S, beberapa hal baik dapat dijadikan contoh, antara lain adalah upayanya menggiring *mindset* pegawai untuk mulai berorientasi kepada pelayanan. Di samping mempunyai budaya kerja yang diberi *tagline* BPK JATIM (do the Best, disciPline, worK smart, enJoy, teAmwork, respecT, never glve up, stay huMble), timbul suatu konsesus bahwa perlu membuat slogan pelayanan yang diberi jargon MANTAP (Melayani, Akurat, Nyaman, Transparan, Adil, Paripurna). Pembentukan slogan tersebut melibatkan seluruh unit di Perwakilan Jatim dan telah disosialisaikan kepada seluruh pegawai.

Pada manajeman perubahan, tahapan membangun *mindset* adalah hal krusial. Keberhasilan membangun *mindset* menentukan kesuksesan upaya perubahan. Merujuk pada proses pembangunan *mindset* di Perwakilan Jatim, ketika pada diri pegawai telah terbentuk *mindset* bahwa memberikan layanan prima kepada masyarakat adalah tujuan dari organisasi, maka setiap individu dalam organisasi akan lebih menghargai perubahan dan bersedia terlibat di dalamnya karena merasa hal tersebut merupakan bagian dari tugas.

Keberhasilan membentuk *mindset* juga menjadi faktor penting dalam meyakinkan pegawai atas tuntutan *change valence*. Heidjrachman dan Husnan (2002)[5] mengungkapkan bahwa kepuasan kerja pegawai tidak semata dipengaruhi oleh banyaknya pendapatan, namun termasuk faktor psikologis seperti penghargaan atas pekerjaan, kesempatan untuk maju, dan organisasi yang dihargai oleh masyarakat. Dengan terbentuknya *mindset* bahwa perubahan yang dilakukan ter-

sebut memang sudah menjadi kebutuhan, maka pertanyaan atas "apa yang akan saya dapatkan dari adanya perubahan", dapat dijawab dengan faktor-faktor psikologis tersebut.

Kedua, terkait dengan *change efficacy*. Menjawab pertanyaan bagaimana saya (pribadi dan organisasi) dapat melakukan perubahan, Joko Agus S menjelaskan lahirnya berbagai inovasi tersebut dipilih melalui proses evaluasi dan diskusi yang matang. Pada dasarnya, tidak ada inovasi buruk. Namun, memang disadari bahwa ada proses seleksi untuk memetakan implementasi, risiko kegagalan, maupun sumber daya yang akan dikonsumsi. Dengan demikian, secara organisasi, dirinya yakin bahwa organisasi cukup mampu untuk mengeksekusi inovasi. Dari sisi individu pegawai, Joko Agus S menyadari bahwa kebanyakan pagawai enggan melemparkan ide inovasi karena takut terbebani untuk mendapatkan tanggungjawab menyelenggarakan inovasi yang diusulkannya. Itulah yang dihindari. Pegawai dilibatkan dalam membangun inovasi, namun sejatinya implementasi perubahan tersebut akan menjadi tanggungjawab komunal yang melekat pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian di organisasi, dan dirinya sebagai pimpinan organisasi yang bertanggungjawab atas perubahan yang terjadi.

Cara-cara yang dilakukan oleh Joko Agus S tersebut merupakan ciri dari pemimpin transformasional dalam membangun partisipasi. Dengan membangun partisipasi, pekerja akan merasa kontribusinya dihargai. Pendekatan tersebut tecermin dalam perilaku manajeman yang memberikan kesempataan kepada anggotanya untuk berbagi informasi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, merencanakan proyek, dan mengevaluasi hasil (Conner dalam Wibowo, 2018:66). Dalam melakukan pemberdayaan, manajemen tidak lepas tanggung jawab atas keputusan yang telah dilakukan. Keterlibatan anggota dalam hal ini bukan merupakan bentuk pelepasan prinsip manajeman kontrol, namun merupakan bagian dari manajeman kontrol itu sendiri.

Terkait dengan tantangan *change efficacy*, partisipasi anggota berperan penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Dengan adanya partisipasi, manajamen lebih mudah mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh para anggota. Umumnya, hal-hal yang diinisiasi oleh anggota akan mendorong adanya rasa memiliki sehingga mereka lebih menghargai proses yang dilakukan dan berupaya optimal memberikan kontribusi demi mencapai tujuan.

Ide membangun partisipasi pegawai melalui Lomba Ide dan Kreativitas juga merupakan terobosan dalam mencari solusi terkait adanya hambatan komunikasi antara manajeman dan staf. Kebanyakan, pegawai mungkin menilai pemimpinnya adalah teladan yang baik, namun hal tersebut mungkin masih dalam konteks segan atau sebagai bentuk rasa hormat. Belum terjadi ikatan kedekatan, sehingga pegawai belum nyaman untuk menyampaikan ide-ide.

Salah seorang peserta Lomba Ide dan Kreativitas di Perwakilan Jatim menyatakan, sejauh pengalamannya berada di BPK, dirinya belum menemukan sarana yang tepat untuk menyampaikan ide/gagasan kepada para pengambil keputusan di lingkungan kerjanya. Adanya lomba ide dan kreativitas yang dilakukan oleh Perwakilan Jatim, sangat bagus untuk menyalurkan ide yang selama ini hanya disimpannya saja. Walaupun tidak menang, dirinya menyatakan hal tersebut bukan masalah, karena tujuan mengikuti lomba bukanlah sekadar menang, namun kesempatan untuk bisa menyuarakan mimpi itulah yang terpenting. ●

---

1 Wibowo. 2018. Manajamen Perubahan (Edisi Ketiga). Depok : Rajawali Pers

2 Hairudinor, dkk. 2020. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organiasasi terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Administrasi Bisnis Vol 10 No.1. 2020

3 Saefullah, Asep dan Rusdiana, Ahmad. 2016. Manajeman Perubahan. Bandung : Pustaka Setia

4 Sudarsyah. Asep. 2012. Mengelola Perubahan Organisasi (Sebuah Perspektif Perilaku), Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. XIV No 1 April 2012.

5 Heidjrachman dan Husnan., Suad 2002, Manajeman Personalia. Yogyakarta : BPFE

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

ALUR PERMINTAAN INFORMASI

Pusat Informasi dan Komunikasi
Badan Pemeriksa Keuangan
(PIK BPK)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 2554 9000
ext. 3912
Fax : (021) 5795 0288
E-mail : ksbhumas@bpk.go.id
PO.BOX : 4300 JKT 10043
Website : www.bpk.go.id

Masyarakat
- Datang langsung ke PIK
- Via Telepon
- Via Fax
- Via PO BOX
- Website

Persyaratan
- Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
- Melampirkan:
  - Identitas diri (KTP)
  - Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/Lembaga
  - Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)

Petugas PIK akan mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta, kemudian memproses Permintaan Pemohon Informasi

Bila persyaratan sudah lengkap

Petugas PIK akan memberikan informasi yang diminta beserta Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

Bila persyaratan belum lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

1
Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam kampanye pencalonan Indonesia sebagai auditor eksternal UNIDO, 15 Oktober 2021.

2-3
Ketua BPK Agung Firman Sampurna meminta kepercayaan dan dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai auditor eksternal UNIDO periode 2022-2024 pada resepsi yang mengundang Duta Besar Negara Anggota UNIDO, 19 Oktober 2021.

4-6
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan Anggota VI/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Harry Azhar Azis memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis AKN V dan AKN VI yang dilaksanakan di Magelang, 14 Oktober 2021.

7-8
Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto memberikan kuliah umum dengan tema "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara: Tantangan dan Sinergi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel" di Politeknik Siber dan Sandi Negara, 11 Oktober 2021.

9
Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun menghadiri pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, 12 Oktober 2021.

10
Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun meninjau ruas jalan Tol Kalimantan Timur, daerah Titik Nol dan Ibukota Negara di Kalimantan Timur, 6 Oktober 2021.

11
Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun meninjau langsung jalannya pemeriksaan atas pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kota Balikpapan, 7 Oktober 2021.

12-13
Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional IPKN yang diselenggarakan di Magelang, 14 Oktober 2021.

Kuis

Hai, sahabat *Warta Pemeriksa*. Memperingati hari Sumpah Pemuda 2021, kami mengadakan lomba pantun. Dengan lomba ini kami berharap, berjuang di tengah kondisi pandemi Covid-19, kita dapat mengingat dan kembali menggelorakan semangat Sumpah Pemuda. Semangat untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu.

Kongres Sumpah Pemuda digelar di Jakarta, bukan di Bandung.
Indonesia mulai bersatu, tak hanya andalkan bambu.
Kalau punya waktu dan kreativitas, eh jangan bingung.
Ayo buat dan kirimkan saja pantun terbaikmu.

Silakan kirimkan pantun terbaik sahabat-sahabat sekalian paling lambat tanggal 20 November 2021. Jawaban dapat dikirim melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek **'Kuis'**. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Tentunya kami menyiapkan hadiah menarik untuk pantun terbaik. Kami tunggu partisipasi sahabat sekalian. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

Mengikuti perkembangan di masyarakat, *Warta Pemeriksa* kini sepenuhnya menggunakan platform digital. Pembaca dapat menikmati informasi yang kami sajikan melalui *Warta Pemeriksa Digital*. Kami juga tetap menawarkan pengalaman membaca majalah dalam format *e-magazine* yang dapat diakses dari laman resmi BPK dan *Warta Pemeriksa*.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

SEMAKIN MUDAH MENGAKSES INFORMASI MELALUI...

www.bpk.go.id

BPK RI Official

@bpkri

@bpkriofficial

08111907010

bpk.ri

PPID
EPPID Mobile

foto: wayhomestudio-freepik